

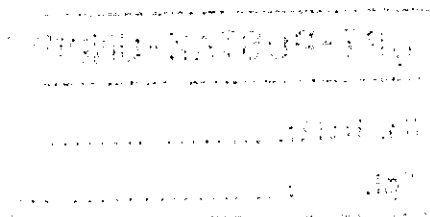
**EFEKTIFITAS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN PEMADAM KEBAKARAN (BPK)  
MANDIRI SEBAGAI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK  
( Objek Studi : Kota Banjarmasin )**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**ACHMAD SUGIANTO. HS  
NIM. L4B 099 104**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2001**

**EFEKTIFITAS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN PEMADAM KEBAKARAN (BPK)  
MANDIRI SEBAGAI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK  
( Objek Studi : Kota Banjarmasin )**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

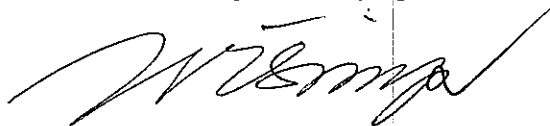
**ACHMAD SUGIANTO. HS  
NIM. L4B 099 104**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 16 Juli 2001

Dinyatakan Lulus/Tidak Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelas Magister Teknik

Semarang, Juli 2001

Pembimbing Pendamping



Ir. Wisnu Pradoto, MT

Pembimbing Utama



Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Teknik Pembangunan Kota

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

***Bersyukurlah Dengan Pemberian Yang Sedikit  
Karena Rasa Syukur Menghilangkan Sifat Kufur***

***Kupersembahkan  
Pada Orang Tua, Isteri &  
Anak  
Dan Seluruh Keluargaku***

## ABSTRACT

Physical conditions of Banjarmasin City, particularly its geological and hydrological conditions fall into a relatively low and plate category of a region. Banjarmasin is 0.15 to 0.50 meters above the sea level and influenced by tidal fluctuations, which lead to pools of water spread over the low areas. Consequently, the existing constructions are mostly of 'construction on stages' (or 'Rumah Panggung') types. The constructions are mostly semi-permanent and non-permanent and made from wood. Such a characteristic makes the region more prone to fire accidents than permanent constructions

From 1995 to 2000, Banjarmasin experienced 144 constructional fires with monetary loss amounted to Rp. 43,435,000,000, three individuals got killed and 1,654 households lost their houses. The fires during that period spread over East Banjar District (44 fires), West Banjar (61 fires), North Banjar (20 fires) and South Banjar (19 fires). The spread of these fires was approximately uniform among those four districts, but the one suffering the most was Kertak Baru Ulu Village of West Banjar District, which got 11 fires

Due to the limited capacity of Banjarmasin municipality in overcoming the fires, many private self-sufficient Fire Units had been formed. These Fire Units kept increasing in number until 2000; there were 83 such Units composed of one unit possessed by Banjarmasin municipality, 34 unit in East Banjar, 20 units in West Banjar, 19 units in South Banjar and 20 units in North Banjar. Self-sufficient Fire Units in such a number must certainly save some proportion of Banjarmasin municipality's budget for providing public services, particularly regarding fire accidents

These self-sufficient Fire Units mostly provided local services but also emergency services to some other areas. These Fire Units were of non-profit oriented or voluntary oriented types. The emergency services provided to other areas were mainly based on a consideration of not servicing any occurrences caused by mass aggression or chaos. The services given to the people were closely related to religious and humanistic factors. In providing services to the people, however, these self-sufficient Fire Units were also based on the principles of organization with both vertical and horizontal hierarchies as well as collectively agreed working procedures.

The existence and the future development of these Fire Units will certainly depend on active involvement and participation of members of the local societies for providing peaceful settlements relatively free from the threats of fire. In practice, though, people participation may be influenced, both internally and externally, by social, economic, political and religious factors

## ABSTRAKSI

Kondisi lingkungan fisik Kota Banjarmasin, terutama kondisi geologi dan hidrologinya adalah termasuk daerah yang mempunyai ketinggian yang relatif rendah dan relatif datar " *Plate* " secara keseluruhan. Letak kota Banjarmasin yang berada pada ketinggian - 0,15 s/d 0,50 meter diatas permukaan laut (MAL) dan dipengaruhi pasang surut air laut yang menyebabkan terjadinya genangan air dan rawa-rawa pada daerah yang rendah. Kondisi yang demikian itu, menyebabkan konstruksi bangunan yang ada didominasi oleh bangunan yang berbentuk panggung "*Rumah Panggung*". Konstruksi bangunan yang ada kebanyakan sifat bangunan semi permanen dan non permanen yang terbuat dari bahan kayu. Hal ini pula, menyebabkan timbulnya kerawanan kebakaran yang lebih besar dari pada konstruksi yang permanen.

Kebakaran yang menimpa Kota Banjarmasin selama periode tahun 1995 s/d 2000, terjadi 144 kali dengan kerugian Rp. 43.435.000.000, korban jiwa 3 orang, kehilangan tempat tinggal 1.654 KK. Sebaran kejadian kebakaran selama periode tersebut adalah di Kecamatan Banjar Timur 44 kali, Banjar Barat 61 kali, Banjar Utara 20 kali dan Banjar Selatan 19 kali. Penyebaran musibah kebakaran hampir merata di empat kecamatan dan yang paling banyak tertimpa musibah kebakaran adalah Kelurahan Kertak Baru Ulu - Kecamatan Banjar Barat sebanyak 11 kali.

Oleh karena keterbatasan pemerintah kota Banjarmasin didalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi, atas partisipasi warga dibentuk unit pemadam Kebakaran (BPK) secara swadaya murni. Terbentuknya unit-unit BPK yang dikelola masyarakat terus berkembang dan bertambah. Sampai tahun 2000, jumlah satuan unit BPK mandiri sebanyak 83 Unit yang terdiri dari 1 Unit milik pemerintah kota, Kecamatan Banjar Timur 34 Unit, Kecamatan Banjar Barat 20 Unit, Kecamatan Banjar Selatan 19 unit dan Kecamatan Banjar Utara 20 Unit. Meningkatnya jumlah unit BPK mandiri dapat pula menghemat anggaran pemerintah kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum, khususnya pemadam kebakaran.

Pelayanan yang diberikan unit BPK mandiri kepada masyarakat adalah pelayanan setempat dan bantuan darurat kepada pihak lain. Orientasi pelayanan unit - unit BPK adalah bersifat kesukarelaan atau "*Non profit Oreinted*". Pelayanan pemadaman kebakaran yang diberikan kepada pihak lain, pertimbangan paling utama adalah bukan akibat perbuatan massa/kerusuhan. Unsur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak terlepas dari sifat religi dan kemanusiaan. Walaupun demikian, satuan unit BPK mandiri didalam memberikan pelayanan tidak terlepas dari kerja suatu organisasi yang mempunyai hirarki didalam menjalankan tugas baik secara vertikal maupun horisontal dan sesuai dengan prosedur kerja yang telah disepakati bersama.

Perkembangan dan keberlanjutan unit-unit BPK mandiri kemasa depan, keberadaanya tergantung dari keterlibatan secara aktif dan peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan pemukiman warga yang aman dan tenteram dari ancaman bahaya kebakaran. Walaupun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan agama baik secara internal maupun eksternal.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya serta anugerah yang telah dilimpahkanNya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis merupakan prasyarat akademik dalam menyelesaikan studi di lingkungan Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota – Universitas Diponegoro, sehingga penyusun berhak untuk menyandang gelar Magister Teknik.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung studi dan penyusunan Tesis ini, yaitu :

1. Ibunda, isteri dan anak serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril, material dan spritual yang penulis butuhkan sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA, Ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota–Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Ir. Nany Yulianti, MSP, Sekretaris Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota – Universitas Diponegoro.
4. Ir. Wisnu Pradoto, MT, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan ini.
5. Semua dosen pengajar pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota – Universitas Diponegoro.
6. Rekan-rekan mahasiswa Reguler II dan CBUM II serta semua pihak yang dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu diingatkan, karenanya kami menerima segala saran dan kritikan yang dapat memberikan kesempurnaan pada tesis ini.

Akhirnya, atas perhatian dan saran dari semua pihak penyusun menyampaikan terimakasih.

Semarang, Juli 2001  
Penyusun,

Achmad Sugianto.Hs  
L 4 B 099 104

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstraksi .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1.5.1 Ruang Lingkup Materi .....	11
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah .....	12
1.6 Kerangka Pemikiran .....	12
1.7 Hipotesa .....	12
1.8 Rancangan Penelitian .....	13
1.8.1 Sifat Penelitian .....	13
1.8.2 Pengumpulan Data .....	13
1.8.3 Sampel .....	15
1.8.4 Pengolahan Data .....	16
1.9 Sistematika Laporan Penelitian .....	17
 <b>BAB II KARAKTERISTIK KEBAKARAN DAN ORGANISASI PEMADAM KEBAKARAN (BPK) KOTA BANJARMASIN</b> .....	 20
2.1 Fisik Kota Banjarmasin Secara Umum .....	20
2.1.1 Topografi .....	20
2.1.2 Geologi .....	22
2.1.3 Hidrologi .....	23
2.1.4 Klimatologi .....	24
2.1.5 Tata Guna Tanah .....	25
2.1.6 Kependudukan .....	25
2.2 Karakteristik Kebakaran Kota Banjarmasin .....	26
2.2.1 Perumahan dan Kepadatan Bangunan .....	26
2.2.2 Jenis Bangunan Umum dan Industri .....	29
2.2.2.1 Bangunan Umum/Perdagangan .....	29
2.2.2.2 Industri .....	31
2.3 Kerugian Material Bencana Kebakaran .....	33
2.4 Kelembagaan Unit BPK .....	34

2.4.1	Organisasi Unit BPK.....	34
2.4.2	Sistim Pelayanan Unit BPK.....	39
2.4.3	Sumber Pendanaan.....	41
2.4.4	Operasional Unit BPK.....	42
2.4.5	Jangkauan Pelayanan Unit BPK.....	44
2.4.6	Peralatan Unit Pemadam Kebakaran.....	44a
<b>BAB III</b>	<b>PARA METER PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PROBLEMATIKA KEBAKARAN .....</b>	<b>45</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	45
3.2	Struktur Ruang Kota.....	46
3.2.1	Teori Perkembangan Kota.....	46
3.2.2	Lokasi Pos Pemadam Kebakaran.....	52
3.3	Lingkup Peran Serta Masyarakat.....	53
3.3.1	Pengertian Peran Serta /Partisipasi Masyarakat.....	53
3.3.2	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Pemadam Kebakaran .....	58
3.3.2.1	Peran serta Masyarakat Pengguna.....	58
3.3.2.2	Peran serta Tenaga Sukarela.....	60
3.3.3	Tingkatan Peran serta Masyarakat.....	62
3.3.4	Motivasi Ikut Berperanserta.....	65
3.3.5	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelibatan Peran Serta Masyarakat .....	66
3.4	Tingkat Efektivitas Peran Serta Masyarakat.....	68
3.4.1	Batasan Efektivitas.....	68
3.4.2	Tingkat Efektivitas Peran serta Masyarakat .....	69
3.5	Rangkuman Kajian Literatur .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN UNIT BPK MANDIRI.....</b>	<b>75</b>
4.1	Analisis Spatial Kota Banjarmasin.....	75
4.1.1	Kepadatan Penduduk.....	76
4.1.2	Kepadatan Bangunan .....	78
4.1.3	Kejadian Kebakaran di Kota Banjarmasin.....	80
4.1.4	Pos Pemadam Kebakaran.....	83
4.2	Kajian Efektivitas Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan BPK Mandiri.....	85
4.2.1	Peran Serta Masyarakat Pengguna (User).....	86
4.2.1.1	Tahap Rencana.....	86
4.2.1.2	Tahap Implementasi.....	90
4.2.1.3	Tahap Evaluasi.....	93
4.2.2	Peran Serta Masyarakat Tenaga Sukarela /Volunter .....	95
4.2.2.1	Tahap Komunikasi & Inovasi .....	98



4.2.2.2	Tahap Tujuan – tujuan .....	100
4.2.2.3	Tahap Gaya Kerja .....	102
4.3	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran serta .....	106
4.4	Temuan Studi .....	140
4.4.1	Lingkup Spatial Kota Banjarmasin .....	140
4.4.2	Lingkup Peran serta Masyarakat .....	141
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	
5.1	Kesimpulan .....	145
5.2	Rekomendasi .....	151
5.2.1	Rekomendasi Terhadap Hasil Studi .....	151
5.2.2	Rekomendasi Studi Lanjutan .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	155
<b>LAMPIRAN</b>	.....	158

## DAFTAR TABEL

Tabel II - 1	Jenis dan Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan, tahun 1999/2000 .....	25
Tabel II - 2	Jumlah penduduk pada tiap kelurahan Kota Banjarmasin, Tahun 1999/2000 .....	26a
Tabel II - 3	Jumlah dan Jenis Rumah/Bangunan Masing-masing Kelurahan Kota Banjarmasin, Tahun 1999/2000 .....	28a
Tabel II - 4	Kejadian Kebakaran Bangunan Rumah Tahun 1995 s/d 2000 di kota Banjarmasin.....	29
Tabel II - 5	Sarana Bangunan Umum /Perdagangan yang Ada di Kota Banjarmasin, di rinci perkecamatan Th.1999/2000 .....	30
Tabel II - 6	Bangunan umum /Kantor Yang Terbakar Tahun 1999 s/d 2000 di Kota Banjarmasin.....	31
Tabel II - 7	Jenis Industri Yang Ada Dirinci Per kecamatan di Kota Banjarmasin, Tahun 1999/2000 .....	33
Tabel II - 8	Jumlah Kebakaran dan Kerugian Jiwa/Harta Tahun 1995 s/d 2000 di Kota Banjarmasin.....	34
Tabel II- 8a	Jumlah Kejadian Kebakaran Dirinci Tiap Kelurahan Kota Banjarmasin, tahun 1995 s/d 2000.....	35
Tabel IV - 1	Frekuensi Kejadian Kebakaran Selama Dua Musim Dari Tahun 1995 s/d 2000.....	82
Tabel IV- 2	Kategori Variabel Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Pengguna Pada Tahap Rencana .....	88
Tabel IV- 3	Kategori Variabel Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Pengguna Pada Tahap Implementasi .....	92
Tabel IV - 4	Kategori Variabel Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Pengguna Pada Tahap Evaluasi .....	96

Tabel IV – 5	Kategori Variabel Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Tenaga Sukarela (Volunter) Pada Tahap Komunikasi & Inovasi .....	99
Tabel IV – 6	Kategori Variabel Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Tenaga Sukarela (Volunter) Pada Tahap Menentukan Tujuan .....	101
Tabel IV – 7	Kategori Variabel Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Tenaga Sukarela (Volunter) Pada Tahap Gaya Kerja.....	104
Tabel IV – 8	Prosentase Responden Wilayah Sample ( Kelurahan Melayu – Kecamatan Banjar Timur ) Kelompok Masyarakat Pengguna (User) .....	107
Tabel IV – 9	Prosentase Responden Wilayah Sample ( Kelurahan Melayu – Kecamatan Banjar Timur ) Kelompok Masyarakat Relawan (Volunter).....	107a
Tabel IV – 10	Rangkuman Variabel Yang Berpengaruh Pada Peran Serta Pengelolaan Unit BPK ( Untuk Masyarakat Pengguna )....	130
Tabel IV – 11	Rangkuman Variabel Yang Berpengaruh Pada Peran Serta Pengelolaan Unit BPK ( Untuk Masyarakat Pengguna )....	130
Tabel IV – 12	Rangkuman Variabel Yang Berpengaruh ( Uji F untuk Perbedaan antar elemen setiap faktor) Pada Peran Serta Pengelolaan Unit BPK ( Untuk Masyarakat Pengguna )....	130a
Tabel IV – 13	Rangkuman Variabel Yang Berpengaruh ( Uji F untuk Perbedaan antar elemen setiap faktor) Pada Peran Serta Pengelolaan Unit BPK ( Untuk Masyarakat Relawan/volunter ).....	130a

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - 1	Bagan Kerangka Pemikiran .....	14
Gambar 1 - 2	Peta Wilayah Studi Kelurahan Melayu – Kec. B.Timur .....	19
Gambar 2 - 1	Peta Kota Banjarmasin, Tahun 2000.....	21
Gambar 2 - 2	Peta Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin, Tahun 1999/2000 .....	27
Gambar 2 - 2a	Peta Kerapatan Bangunan Kota Banjarmasin, Tahun 1999/2000 .....	28 b
Gambar 2 - 3	Kondisi Jalan dan Pemukiman Warga .....	28 c
Gambar 2 - 4	Peta Sebaran Kejadian Kebakaran Kota Kota Banjarmasin Tahun 1995 s/d 2000.....	35 a
Gambar 2 - 5	Peta Sebaran POSKO Unit BPK Kota Banjarmasin Tahun 2000.....	37
Gambar 2 - 5a	Aktivitas Anggota Satuan Unit BPK Mandiri .....	38
Gambar 2 - 6	Struktur Organisasi Unit BPK.....	40
Gambar 3 - 1	Eight Rung On The Ladder Of Citizen Participation.....	64
Gambar 4 - 1	Prosentase Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Dalam Tahap Rencana ( Masyarakat Pengguna) .....	88
Gambar 4 - 2	Prosentase Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Dalam Tahap Implementasi (Masyarakat Pengguna) .....	92
Gambar 4 - 3	Prosentase Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi (Masyarakat Pengguna) .....	96
Gambar 4 - 4	Prosentase Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Dalam Tahap Komunikasi & Inovasi (Masyarakat Volunter) .....	99
Gambar 4 - 5	Prosentase Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Dalam Tahap Tujuan ( Masyarakat Volunter) .....	101
Gambar 4 - 6	Prosentase Tingkat Efektivitas Peranserta Masyarakat Dalam Gaya Kerja ( Masyarakat Volunter) .....	104

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. latar Belakang Masalah

Aspek-aspek sosial dari kehidupan kota sejak semula memang menarik dan kota merupakan wilayah yang berisi orang-orang dengan beraneka latar belakang dan mata pencaharian. Semakin bermunculan kegiatan-kegiatan baru, lembaga-lembaga formal dan informal yang bercirikan khas.

Pembangunan, urbanisasi dan perencanaan maupun kerusakan lingkungan hidup merupakan tiga fenomena yang tidak dapat dipisahkan dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah kota, baik itu di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang ataupun negara dunia ketiga (Nurmandi, 1999). Terutama urbanisasi, selain menimbulkan kelas-kelas baru dan akan menciptakan gaya hidup (*way of life*) yang baru pula. Bila dikaitkan dengan pertumbuhan dan penambahan penduduk di dalam perkembangan suatu kota, secara langsung berdampak kepada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, seperti pengadaan air bersih, sistem sanitasi lingkungan baik, pengelolaan persampahan, drainase perkotaan, sistem air limbah kota, penyediaan perumahan beserta lahannya serta transportasi untuk barang dan manusia. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan di berbagai kota di negara-negara berkembang, terutama didalam menangani perumahan-perumahan dan kawasan-kawasan padat, kumuh dan kotor serta permasalahan-permasalahan pokok kota lainnya.

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan merata serta menjangkau seluruh kelompok menjadi terbatas, terutama daerah-daerah atau kota-kota yang mempunyai keterbatasan dalam sumber pendanaan. Namun demikian, fungsi pemerintah sebagai sektor publik wajib memberikan pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat, khususnya menjamin terciptanya rasa aman dari berbagai gangguan,

ancaman dan bahaya. Terutama sekali, kondisi masyarakat yang sangat heterogen dimana kondisi lingkungan perkotaan menyebabkan kawasan-kawasan menjadi padat dan mengakibatkan kondisi lingkungan yang cenderung kumuh.

Kondisi lingkungan masyarakat tidak terlepas dari makna pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, pembangunan yang dilakukan itu mempunyai pengaruh terhadap mutu dan kualitas serta eksistensi hidup dan kehidupan, termasuk didalamnya adalah mutu dan kualitas lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan masyarakat dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi jelas kondisi lingkungan baik lingkungan kota, perumahan, pabrik dan sebagainya harus mempunyai akses yang baik, terutama kondisi lingkungan agar terhindar dari bahaya-bahaya yang akan terjadi seperti bahaya penyebaran penyakit, bahaya kebakaran dan bahaya bencana alam lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah kota mempunyai tugas untuk melayani warganya dalam hal menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, terutama sarana dan prasarana dasar perkotaan. Kota sebagai wadah tempat tinggal penduduk dan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya diharapkan dapat berperan didalam pengembangan dan pengelolaan kota. Di dalam kegiatannya, pemerintah kota tidak lepas dari sistem pengelolaan, adapun sistem pengelolaan/manajemen sebagaimana di ungkapkan oleh M. Manullang (1981), bahwa azas manajemen terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- Unsur manusia / tenaga kerja
- Unsur kapital ( uang / modal )
- Unsur Material ( alat / peralatan )
- Unsur Metode ( cara melakukan pekerjaan )

- Unsur pemasaran (marketing )

Kesemua unsur tersebut diatas, berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya. Hal ini, tidak lepas dari sistem manajerial yang baik dengan maksud untuk mendapatkan keberhasilan yang optimal dengan sumber-sumber yang dimiliki. Dengan cara, sistem perencanaan harus disusun dengan sistematika perencanaan yang matang, dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif dan ekonomis serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian diperlukan tenaga, dana untuk membiayai semua aktivitas, peralatan atau material untuk melakukan aktivitas, metode untuk menentukan cara melaksanakan kegiatan serta tidak kalah pentingnya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dengan tujuan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Akibat menurunnya kondisi lingkungan perkotaan, oleh karena bertambah padatnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak layak dan kondisi demikian banyak dijumpai di daerah perkotaan. Banyaknya kawasan yang menjadi kumuh, baik yang sengaja ataupun yang tidak dapat mempersulit pemerintah kota didalam merencanakan tata ruang kota maupun penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan serta dapat menyebabkan merosotnya kondisi lingkungan perkotaan, misalnya pabrik-pabrik/kawasan industri yang berpeluang menimbulkan pencemaran pada kawasan pemukiman yang berdekatan.

Disamping itu, kemerosotan lingkungan perkotaan dapat disebabkan oleh kecenderungan penduduk untuk mendekatkan diri dengan tempat pekerjaannya, dimana aksesibilitas terhadap transportasi menjadi pertimbangan mereka untuk dekat tempat kerja, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi dapat diminimalkan dan dipergunakan untuk keperluan lain (John Turner, 1968, dalam Hadi, 2000, hal 190-192). Hal lain yang menjadi penyebab kemerosotan kondisi lingkungan, terutama pada kawasan pemukiman di daerah perkotaan adalah para urbanisan yang mencari sumber penghidupan

yang layak di daerah perkotaan daripada di pedesaan. Banyaknya kawasan-kawasan pemukiman penduduk tidak berfungsi lagi sebagai kawasan pemukiman yang nyaman, tenang dan tentram. Adanya kawasan-kawasan pemukiman padat, kumuh serta adanya kawasan-kawasan yang berubah fungsi asalnya seperti kawasan komersial terutama pasar-pasar tradisional menjadi kawasan hunian penduduk. Hal demikian ini, sebenarnya bagi pengelola perkotaan dimana saja berada sangat disadari akan kondisi lingkungan yang demikian. Kemampuan pemerintah kota untuk dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya sangat bergantung pada sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Akibat kondisi lingkungan pemukiman yang tidak kondusif, seperti kondisi pemukiman padat serta banyak dijumpai konstruksi bangunan temporer yang terbuat dari kayu, menyebabkan kebakaran yang terjadi di kota Banjarmasin terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Kerugian yang diderita oleh masyarakat juga meningkat setiap tahunnya. Sejak kejadian kebakaran besar yang pernah terjadi di kota Banjarmasin tahun 1972 dengan kerugian pada waktu itu  $\pm$  Rp. 3 milyar, belum lagi kerugian jiwa yang menelan korban beberapa orang dan kebakaran-kebakaran tersebut setiap tahunnya terus meningkat kejadian, dan setiap tahunnya rata-rata kejadian kebakaran adalah 24 kali /tahun dengan kerugian material rata rata sebesar Rp. 1,6 milyar/tahun. Kejadian kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin dari tahun 1995 sampai tahun 2000 dengan kejadian sebanyak 144 kali, kerugian material sebanyak Rp. 43.435.000.000, kehilangan tempat tinggal sebanyak 1.645 KK dan korban jiwa yang meninggal tiga orang. Adapun penyebab kebakaran yang terjadi disebabkan oleh arus pendek 38 kali atau 26,38 %, kompor meledak 13 kali atau 9,02 % dan lain-lain sebanyak 93 kali atau 64,58 % dan meningkatnya kebakaran di kota Banjarmasin tidak terlepas dari beberapa hal antara lain :

- Kelalaian penduduk
- Bahan konstruksi bangunan / rumah ( terbuat dari bahan kayu )
- Keterbatasan pemerintah kota (Armada terbatas, personel dan biaya )



- Aksesibilitas kurang memadai (terutama kawasan pemukiman penduduk yang tidak tertata).

Bertitik tolak pada ketidakmampuan pemerintah kota Banjarmasin dalam menanggulangi kebakaran yang terus meningkat, serta dengan keterbatasan armada pemadam kebakaran, biaya dan personel yang dimiliki setiap ada permintaan pelayanan pemadam kebakaran. Warga masyarakat yang peduli dengan keadaan demikian, serta didukung oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki HPH (sebelum tahun 1972) jumlahnya cukup banyak, berinisiatif untuk berperan serta di dalam menanggulangi bencana kebakaran dengan membentuk Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) "*HIPINDO*" yang berdiri sejak tahun 1966, keberadaannya sampai saat ini (tahun 1999) masih konsisten didukung dengan armada dan personel yang cukup memadai dengan anggota  $\pm$  250 orang. Keberadaan BPK HIPINDO didalam berperan serta dengan personel warga masyarakat yang kebanyakan adalah warga keturunan *Tionghoa* , sebagai wujud peran serta mereka didalam membantu warga masyarakat yang mengalami musibah/ bencana kebakaran.

Berdasarkan keterbatasan dana pemerintah Kota Banjarrmasin didalam memberikan pelayanan umum kepada warga masyarakat, terutama dibidang penanggulangan bencana kebakaran. Paradigma pembangunan yang ada, peran pemerintah sebagai penyedia segala fasilitas umum sedikit berubah dengan adanya usaha warga masyarakat untuk ikut berperan serta dan keterlibatan pihak swasta (penguasaha kayu) didalam meringankan beban pemerintah kota didalam melayani warga masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Sampai tahun 2000, jumlah satuan pemadam kebakaran (BPK) yang terbentuk secara swadaya murni oleh warga setempat pada kawasan pemukiman penduduk sebanyak 82 unit BPK.

Didalam mewujudkan keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu aktor pembangunan (*Stake holder*) yang ingin diakui eksistensinya adalah untuk memobilisasi

sumber daya yang dimiliki warga masyarakat. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali didalam pembangunan sebagaimana terungkap dalam pernyataan berikut :

" Participation has become the key word for the nineties and probably for the twenty first century when the consequences for many of the industrial excesses of this century will be sorely left " (Habitat and Citynet : 1997).

Keikutsertaan masyarakat menjadi penting sebagaimana publikasi PBB yang dikutip oleh Hadi (1999) yang berbunyi :

" All people and all human being shall have the right to live in dignity and freedom to enjoy the fruits of social progress and should, on their part, contribute to it" .... ( United Nation : Popular Participation in Decision Making for Development).

Jadi masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan dan seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan yang merupakan refleksi dan kontribusinya. Peran serta masyarakat menjadi penting didasarkan beberapa alasan. *Pertama*, masyarakat untuk mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial akan mempengaruhi kehidupan mereka, dalam hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan mereka. Kawasan-kawasan pemukiman penduduk yang mengharapkan kawasan pemukiman yang aman baik secara fisik maupun privacy atau kerahasiaan terjamin dan keselamatan jiwa sangat penting terutama dari bahaya kebakaran. *Kedua* adalah *local expert* tentang lingkungan sekitarnya, sehingga pendapat dan gagasan layak didengar agar program yang akan dilakukan *workable*. *Ketiga*, keberlanjutan dari proyek dimana program dan kebijakan akan terjamin bila masyarakat diikutsertakan. Keberhasilan peran serta dalam proses, apabila didasari oleh kesadaran diri mereka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun juga. Apabila proses tersebut diatas kebutuhan dan sasaran dari masyarakat sendiri bukan disebabkan oleh permintaan dari pemerintah, peran serta

mereka berupa peningkatan sumbangan, baik dana, waktu, keahlian dan pengetahuan/pemikiran dan lainnya.

Pencapaian target tersebut, bila didalam pelaksanaannya ada keterkaitan dan rasa memiliki dengan warga masyarakat dari sasaran-sasaran/program-program serta tujuan yang telah direncanakan. Kebijakan pemerintah, keikutsertaan masyarakat didalam pembangunan perlu adanya dorongan dan dukungan kepada mereka atas jerih payah dan kontribusinya dalam ikut berperan serta pada pembangunan sekarang ini. Terbentuknya barisan pemadam kebakaran (BPK), tidak terlepas dari suatu proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya.

Dengan dimotori oleh BPK Hipindo Banjarmasin keikutsertaan mereka didalam menanggulangi bahaya bencana kebakaran di kota Banjarmasin serta diikuti unit-unit BPK lainnya adalah sebagian wujud rasa memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan. Disamping itu pula, keikutsertaan mereka didalam setiap kegiatan adalah masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi, kepemimpinan dan pertanggungjawaban melalui proses *learning by doing* (Slamet, 1993). Didalam peran serta ini terjadi komunikasi timbal balik/ dua arah, agar informasi yang diperoleh mengalir dari dua belah pihak dan terjadi hubungan yang harmonis serta mengurangi terjadinya salah komunikasi dan salah informasi didalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pola-pola lama selama ini terjadi terutama pada era orde baru dengan munculnya zaman keterbukaan (*era reformasi*) perlu adanya pergeseran pola, yang mana pola *command and control* dan *perlawanan / konfrontatif* dapat disingkirkan dan diubah dengan sistem pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dan kemandirian.

Dengan pola pemberdayaan ini, semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sepantasnya dipandang sebagai bagian jaringan untuk memiliki kesetaraan dengan pengelola-pengelola lainnya. Tetapi seberapa besar keefektifan didalam ikut berperan serta didalam pembangunan, tergantung kepada seberapa jauh peran pemerintah kota

didalam memberikan dorongan dan menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat terutama unit-unit pemadam kebakaran didalam menanggulangi bencana bahaya kebakaran.

## 1.2. Perumusan Masalah

Akibat kebijakan pembangunan pada masa orde baru yang lebih cenderung kepada pendekatan militerisme dengan konsep *command and control* dan *konfrontatif* atau yang banyak dikenal dengan sistem pembangunan berasal dari atas ( *top-down*), menyebabkan keberhasilan yang dicapai tidak mengakar sampai pada masyarakat. Membangun masyarakat tidak menyentuh kepada kepentingan masyarakat dan bahkan masyarakat menjadi korban akibat pembangunan seperti " *gubuk derita* ", Kedung Ombo, pembukaan lahan gambut (PLG) sejuta hektar dan lain-lainnya. Namun masih ada anggapan bahwa memberikan sebanyak-banyaknya bantuan pada masyarakat akan menjadi lebih baik taraf hidupnya. Hal ini sudah barang tentu juga tidak mendidik, bahkan bisa menjadikan ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

Melihat kondisi fisik dan lingkungan kota Banjarmasin, dimana letak tofografinya terletak diantara -0,19 sampai 0,50 meter dari permukaan air laut (MAL) menyebabkan banyak daerah yang menjadi genangan air dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hal ini, sangat mempengaruhi pola keruangan Kota Banjarmasin, terutama pembuatan jaringan jalan dan konstruksi bangunan. Keterbatasan dana pemerintah dalam pembuatan jaringan jalan serta meningkatnya harga tanah, menyebabkan kondisi penggunaan lahan perkotaan terutama kawasan-kawasan pemukiman terjadi penggunaan yang melampaui kapasitasnya. Akibatnya, kondisi lingkungan didaerah perkotaan terutama pada kawasan permukiman penduduk tidak nyaman lagi, padat dan kumuh serta tidak layak lagi untuk dihuni ( terjadi penurunan/degradasi kualitas lingkungan ).

Banyaknya peristiwa kebakaran terjadi di kota Banjarmasin yang diakibatkan kondisi lingkungan yang berasal pemukiman penduduk. Selain dari kondisi lingkungan,

ditunjang lagi oleh bahan bangunan yang dipergunakan, serta konstruksi bangunan yang berbentuk panggung sebagian besar menggunakan bahan kayu mulai dari pondasi sampai atap bangunan. Kebakaran yang terjadi dari tahun 1995 sampai tahun 2000, didominasi oleh bangunan rumah penduduk sebanyak 91 kali kejadian dengan jumlah 1.038 buah rumah yang terbakar dan total kerugian sebanyak Rp. 36,3 Milyar.

Menyadari akan kondisi fisik dan lingkungan kota Banjarmasin yang demikian itu serta sering terjadinya bencana kebakaran yang menimpa kawasan-kawasan pemukiman, timbul inisiatif dari warga pemukiman perumahan untuk melindungi kawasan-kawasan mereka dari bahaya kebakaran. Maka warga masyarakat membentuk unit-unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dengan swadaya murni warga. Disamping itu, dalam usaha membantu pemerintah kota Banjarmasin karena keterbatasannya hanya mempunyai armada mobile engine dua unit dan personel 17 orang, pemerintah kota memberikan dorongan kepada warga masyarakat agar membentuk satuan-satuan pemadam kebakaran setingkat kawasan pemukiman untuk dapat menanggulangi bahaya kebakaran pada kawasan mereka sendiri.

Dengan dioperasikannya unit-unit BPK yang dikelola warga setempat, menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh warga masyarakat baik dari segi pembiayaan dan tenaga kerja. Dalam hal ini, konsekuensi yang dimaksud adalah tanggung jawab warga masyarakat untuk berperan serta didalam mengoperasikan unit – unit BPK tersebut. Adapun peran serta warga masyarakat yang menjadi perhatian didalam penelitian ini adalah warga masyarakat sebagai pengguna (*user*) dan warga masyarakat yang berlaku sebagai tenaga sukarela (*volunter*).

Potensi yang ada pada masyarakat didalam ikut berperan aktif untuk mengelola unit pemadam kebakaran yang mandiri tersebut, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk ikut berperan serta baik faktor internal maupun faktor eksternal yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik dan agama.

Fokus untuk penelitian ini adalah potensi yang ada pada masyarakat untuk berperan serta didalam pengelolaan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang dikelola oleh masyarakat. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan masyarakat dari para pengguna (User) dan tenaga sukarela (Volunter) dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat didalam pengelolaan unit-unit BPK tersebut.

Adapun permasalahan yang timbul akibat dari pengelolaan unit-unit BPK swadaya adalah :

1. Seberapa besar kemampuan warga masyarakat Kota Banjarmasin memberikan pelayanan pemadaman kebakaran, khususnya unit-unit BPK mandiri ?.
2. Potensi yang bagaimanakah yang dapat menumbuhkan peran serta warga masyarakat didalam membentuk unit-unit BPK swadaya tersebut ?
3. Seberapa jauh efektivitas peran serta warga masyarakat didalam ikut mengelola unit-unit BPK mandiri/swadaya yang ada diwilayah mereka ?

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas peran serta masyarakat pengguna (User) dan tenaga sukarela (Volunter) terhadap perkembangan dan keberlanjutan pengelolaan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang dikelola oleh masyarakat yang ada di kota Banjarmasin agar menjadi BPK yang mandiri dan profesional.

Sedangkan sasaran studi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas peran serta masyarakat.
- 2) Merumuskan kebijakan/arahan pengembangan unit-unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang dikelola oleh masyarakat untuk keberlanjutannya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Keunikan dan kekhasannya unit BPK-BPK dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dilihat dari jumlah dan pengelolaannya, maka manfaat dari penelitian adalah :

- Memberikan gambaran model pengelolaan unit BPK sebagai salah satu bentuk lembaga pelayanan publik yang dikelola secara swadaya.
- Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak pemerintah kota Banjarmasin didalam memberikan arahan maupun kebijakan tentang pengelolaan pemadam kebakaran.

#### **1.5. Ruang lingkup Penelitian**

##### **1.5.1. Ruang Lingkup Materi**

Dalam lingkup materi ini adalah untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis merasa perlu untuk membatasi agar tidak menjadi bias dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Pola sebaran sarana dan prasarana yang ada dilihat dari pemanfaatan lahan khususnya pemanfaatan lahan terutama untuk kawasan-kawasan padat penduduk dan padat bangunan yang menjadikan daerah rawan bencana kebakaran .

Sehingga pada tahap ini dapat dilihat peta kepadatan penduduk yang dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran didaerah/kawasan pemukiman penduduk dan kawasan yang berpengaruh didalam menjadikan daerah rawan bencana kebakaran.

2. Membahas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas peran serta masyarakat terhadap perkembangan dan keberlanjutan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang dikelola oleh masyarakat yang ada dikota Banjarmasin baik dari masyarakat pengguna maupun tenaga sukarela dari organisasi tersebut.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang menjadi objek studi adalah Kota Banjarmasin dan yang menjadi sampel wilayah penelitian adalah **Kelurahan Melayu – Kecamatan Banjar Timur**, memiliki wilayah administrasi 53 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 adalah 11.799 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk 223 jiwa / Ha, dan mempunyai kepadatan bangunan > 40 bangunan/ha sebesar 53 ha. Serta kelurahan Melayu adalah wilayahnya sebagian terletak didaerah pinggiran Sungai Martapura dan konstruksi bangunan rumah kebanyakan rumah type panggung dan menggunakan bahan dari kayu .

Di Kelurahan Melayu mempunyai lembaga Unit Pemadam Kebakaran sebanyak lima unit BPK aktif dan satu tidak aktif yang dikelola oleh masyarakat dan sekitar kelurahan tersebut juga ada Unit – unit BPK yang terdekat. Hal ini disebabkan oleh karena kawasan–kawasan yang terdekat juga berpotensi untuk terjadinya bencana kebakaran juga cukup besar, dimana typical dan kerapatan bangunan dan kondisi lingkungannya tidak jauh berbeda dengan kelurahan yang menjadi sampel wilayah.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memperlihatkan kelugasan didalam alur pemikiran penelitian ini, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1:

### 1.7 Hipotesa

Berdasarkan pada faktor- faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat terutama dari masyarakat pengguna dan tenaga sukarelawan pada pengelolaan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri/swadaya murni, maka dalam penelitian ini dapat disusun hipotesa sebagai berikut:

1. Peran serta masyarakat pengguna ( user )



Ho I : Masyarakat tidak mempunyai kekuatan kontrol didalam pengelolaan Unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) mandiri.

H<sub>1</sub> I : Masyarakat mempunyai kekuatan kontrol didalam pengelolaan Unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) mandiri.

2. Peran serta masyarakat tenaga sukarelawan (volunter) :

Ho II : Masyarakat tidak mempunyai kekuatan kontrol didalam pengelolaan Unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) mandiri.

H<sub>1</sub> II : Masyarakat mempunyai kekuatan kontrol didalam pengelolaan Unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) mandiri.

## **1.8 Rancangan Penelitian**

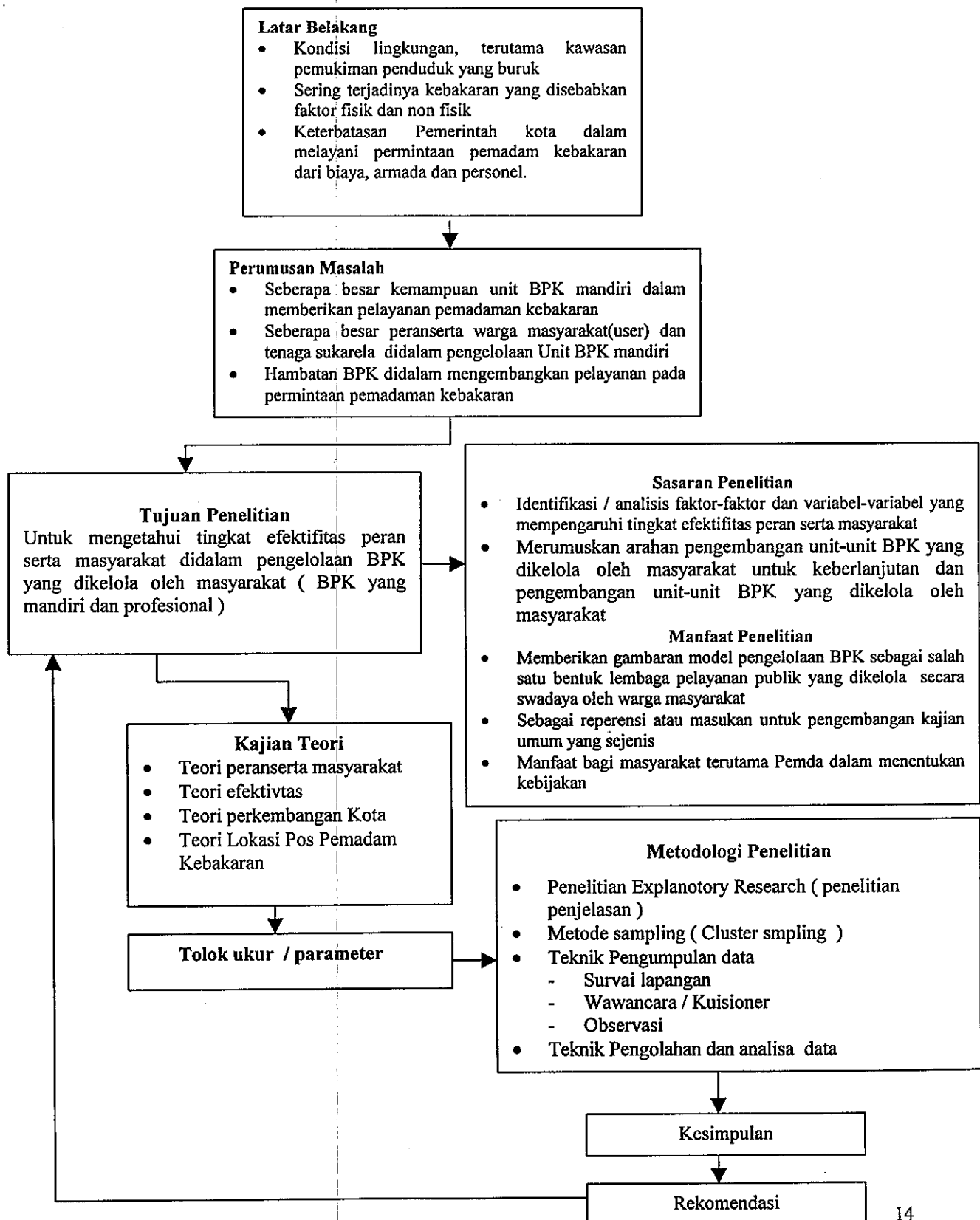
### **1.8.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian Explanatory Research dan untuk membuktikan hipotesa yang telah disusun, akan diteliti variabel –variabel dalam penelitian peran serta masyarakat baik untuk masyarakat pengguna (user) maupun masyarakat tenaga relawan (volunter). Variabel-variabel yang akan digunakan untuk menganalisa menurut Stuart Chapin yang terdiri dari variabel sosial, ekonomi yang meliputi : pendidikan, pekerjaan, penghasilan, keanggotaan, kehadiran, dukungan finansial dan lain sebagainya.

### **1.8.2 Pengumpulan Data**

Hasil penelitian ini sifatnya deskriptif kuantitatif yang menjelaskan mengenai faktor–faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas peran serta masyarakat baik dari masyarakat pengguna maupun tenaga sukarelawan yang ikut berpartisipasi didalam pengelolaan pemadam kebakaran mandiri/swadaya murni. Untuk memperoleh data digunakan kombinasi antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

## Kerangka Pemikiran Studi :



*Penelitian Lapangan.* Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber primer. Dengan mengumpulkan kuesioner yang disusun lebih dahulu, data dikumpulkan langsung dari responden baik oleh peneliti maupun orang lain. Hal ini dilakukan, karena wilayah penelitian terletak pada satu kelurahan dan tidak berjauhan dari masing – masing unit BPK.

*Penelitian Kepustakaan.* Penelitian ini untuk mengumpulkan data sekunder baik dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga untuk mempelajari dasar teoritis mengenai peran serta masyarakat didalam pengelolaan pemadam kebakaran secara mandiri.

### 1.8.3 Sampel

Untuk membuktikan hipotesa akan diteliti 5 (lima) Unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), dimana tiap-tiap unit BPK diambil beberapa sampel yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan pemadam kebakaran yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan publik. Untuk menentukan jumlah sampel (N) dengan menggunakan rumus **Standar Error Prosentase Snodcor** (1964), dimana jumlah proporsi sampel ( p.q ) tidak diketahui secara tepat yang ikut berperan serta, maka diperkirakan yang ikut berperan serta sebesar 50 % dan yang tidak ikut berperan serta sebesar 50 %, batas probabilitas (Z) 90 % - SD = 1,96 dan batas toleransi (T) 10 %.

$$N = ( Z^2 . p.q ) / T^2$$

$$= ( 1,96^2 . 50.50 ) / 10^2$$

$$= 96,4 \text{ sampel} \cong 100 \text{ sampel}$$

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 100 sampel dengan asumsi responden yang homogen. Responden dari masyarakat pengguna (user) 50 sampel dan responden tenaga relawan (volunter) 50 sampel. Data yang dikumpulkan adalah data-data primer untuk mengukur tingkat efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan pemadam kebakaran yang mandiri/swadaya murni. Sedangkan data sekunder diambil untuk melengkapi analisa perkembangan unit BPK mandiri.

#### 1.8.4 Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam bentuk tabel kontijensi agar dapat dianalisa dengan teknik statistika “ Chi – Square “ dan “Analisis of Variance ( ANOVA ).

“ Chi –square test “ dipilih sebagai alat pengolahan data karena berbagai alasan. Alasan *pertama*, teknik dapat mengolongkan secara independen setiap variabel yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas peran serta masyarakat. Alasan *kedua*, teknik dapat digunakan untuk penelitian dengan sampel yang kecil. Alasan *ketiga*, teknik ini dapat digunakan untuk nilai-nilai yang tidak membentuk distribusi normal ( Dayan, 1974 ). Untuk mempercepat proses analisis data digunakan program “*Statistical Product and Service Solution (SPSS)*”.

Langkah –langkah didalam pengolahan data dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

1. Menggolongkan data yang diperoleh ke dalam kedalam tabel kontejensi
2. Menentukan tingkat signifikasi ( level of significant ), dalam penelitian ini digunakan  $\alpha = 0,05$
3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis,dalam hal ini :

$H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak jika :

$\chi^2 < \chi^2_{\{\alpha; (r-1)(k-1)\}}$  atau dilihat dari probabilitasnya

$H_1$  diterima atau  $H_0$  ditolak jika :

$\chi^2 > \chi^2_{\{\alpha; (r-1)(k-1)\}}$  atau dilihat dari probabilitasnya

4. Menentukan frekuensi yang diharapkan (expected frequencies), dengan rumus :

$$p = \frac{n_{1.1} + n_{1.2}}{n} = \frac{n_{1.}}{n}$$

$$e_{1.1} = P(n_{1.1}) \quad e_{1.2} = P(n_{1.2})$$

$$e_{2.1} = n_{.1} \cdot e_{1.1} \quad e_{2.2} = n_{.1} \cdot e_{1.2}$$

5. Menguji hipotesis, yaitu dengan cara menghitung  $\chi^2$  dan membandingkan dengan  $\chi^2_{\{\alpha(r-1)(k-1)\}}$  atau probabilitasnya.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(n_{1.1} + n_{1.2})^2}{e_{ij}}$$

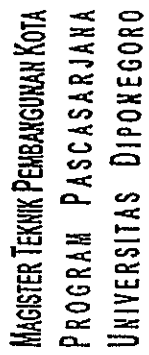
## 1.9 Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika dalam penulisan prathesis ini dibagi menjadi beberapa bab yang menguraikan :

- BAB I : PENDAHULUAN : berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran dari penelitian, ruang lingkup materi dan wilayah kerangka pemikiran dan sistematika penulisan
- BAB II : KARAKTERISTIK KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN DAN ORGANISASI BPK ; berisi tentang kondisi fisik kota yang diperinci per kelurahan

dan kecamatan, sarana dan prasarna kota dan bencana kebakaran serta kelembagaan unit – unit BPK yang ada di Kota Banjarmasin.

- BAB III : PARAMETER PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PROBLEMATIKA KEBAKARAN; berisi teori-teori yang dipergunakan sehingga permasalahan-permasalahan yang diangkat sebagian dapat terjawab walaupun masih sangat bersifat teoritis.
- BAB IV : ANALISA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BPK MANDIRI; Bab ini berisi analisa spatial kota sehubungan dengan kebakaran serta analisa tingkat efektifitas peran serta masyarakat pengguna (user) dan tenaga relawan (volunter).
- BAB V PENUTUP; Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan.
- Daftar Pustaka.
- Lampiran – lampiran.



**EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM KINERJA /PENGELOLAAN UNIT PEMADAM  
KEBAKARAN (BP) MANDIRI  
SEBAGAI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK  
(OBJEK STUDI: KOTA BANJARMASIN )**

KECAMATAN BANJAR. TIMUR  
KODYA BANJARMASIN

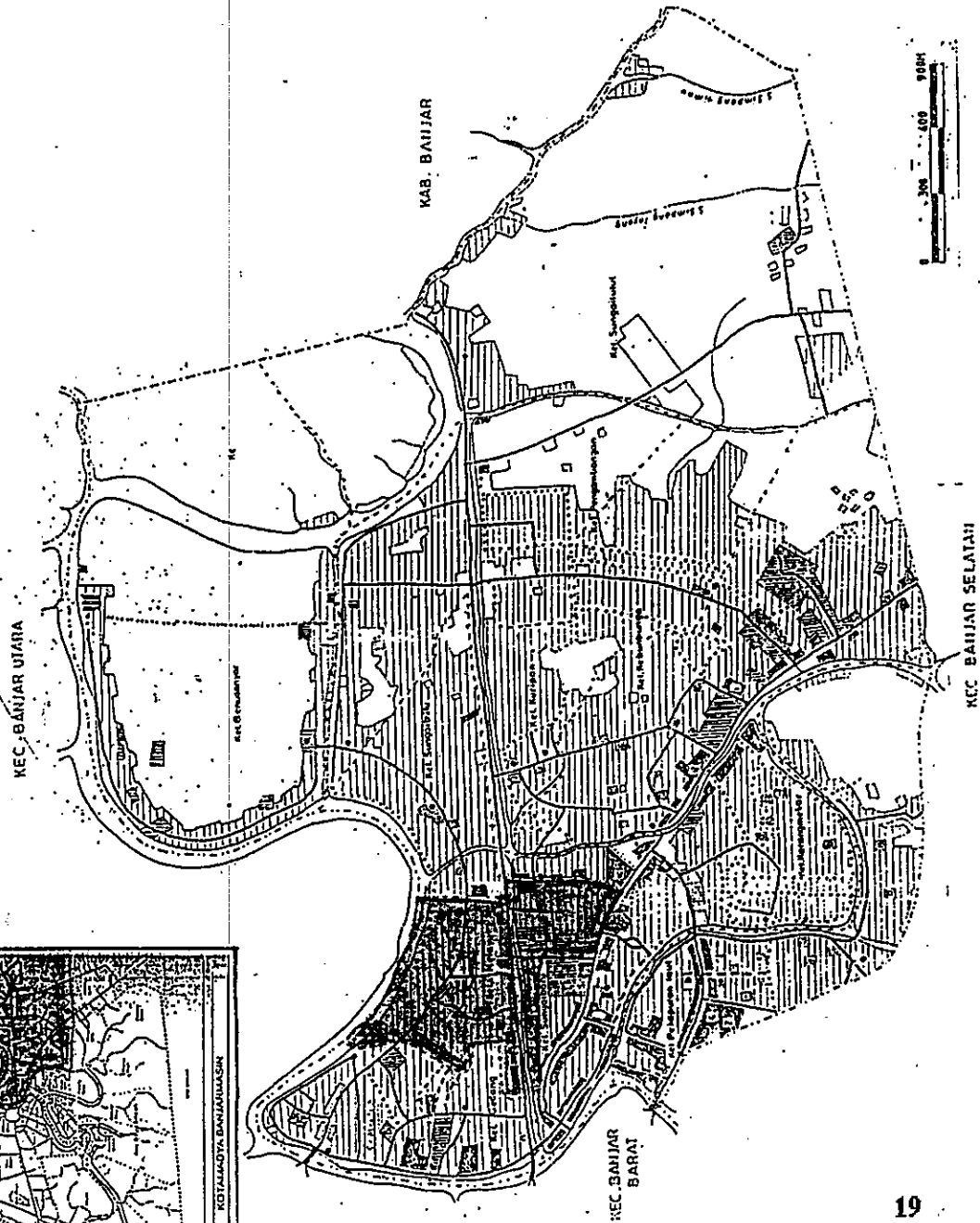
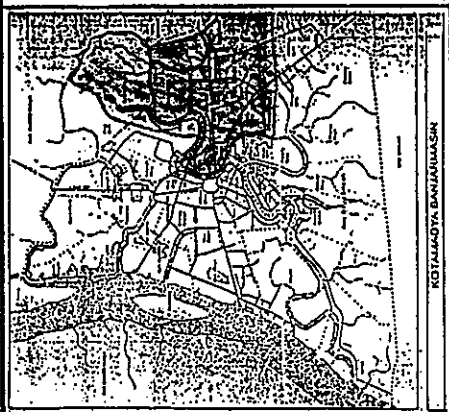
[illegible]

SKALA	NO. GAMBAR
-------	------------

1.  
2

**SUMBER : BAPPEDA KOTA BANJARMASIN**

SAMPEL WILAYAH PENELITIAN.  
KELURAHAN MELAYU - B. TIMUR



## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK KEBAKARAN DAN ORGANISASI PEMADAM KEBAKARAN (BPK) KOTA BANJARMASIN**

#### **2.1 Fisik Kota Banjarmasin Secara Umum**

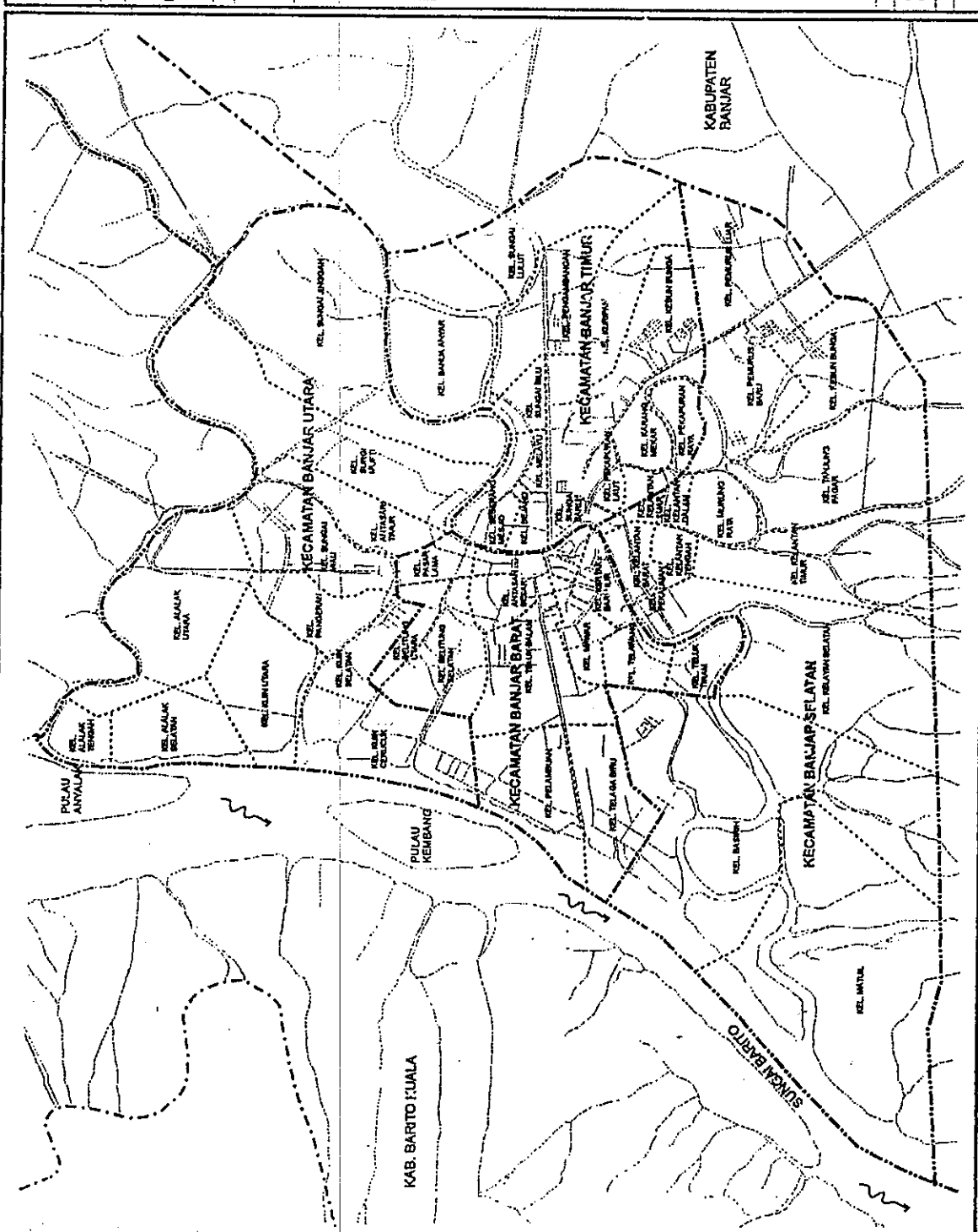
Sebagai ibukota propinsi dan kota, letak Kota Banjarmasin cukup strategis. Hubungan antar pulau maupun antar kota mudah dilakukan, hal ini disebabkan oleh karena terdapatnya pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Sedangkan hubungan antara kota-kota di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dapat dilalukan dengan transportasi darat dan sungai baik lokal maupun regional. Sehingga lalu lintas orang, barang dan jasa dapat dilakukan dari segala arah baik hubungan pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Sulawesi serta pulau-pulau lainnya.

Kota Banjarmasin mempunyai luas wilayah administrasi 7.375,09 Ha, dengan dan empat kecamatan yakni Kecamatan Banjar Barat, Kecamatan Banjar Selatan, Kecamatan Banjar Utara dan Kecamatan Banjar Timur serta 50 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 2.1

##### **2.1.1 Topografi**

Kota Banjarmasin terletak ditepi Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura. Selain kedua sungai tersebut masih ada anak – anak sungai yang mengalir dikawasan kota, seperti Sungai Tatas, Sungai Guring, Sungai Pelambuan dan lain – lain. Hal ini menyebabkan kondisi topografi secara keseluruhan relatif datar dan berawa-rawa, dimana tinggi permukaan dipusat kota ternyata terletak 0,19





meter dibawah permukaan air laut (MAL). Sedangkan kemiringan tanah antara Kota Martapura dan Banjarmasin diprkirakan 0,013 % .

Bila dilihat kondisi tersebut diatas pada dasarnya arah pengembangan kota banyak dilakukan kearah utara, timur, selatan dan barat, sehingga kondisi Kota Banjarmasin dalam pola pemanfaatan lahan dan konstruksi bangunan akan menjadikan hambatan terutama untuk pembuatan jalan dan pondasi bangunan dimana akan memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga masyarakat cenderung untuk membuat konstruksi bangunan terutama bangunan tempat tinggal penduduk type panggung dengan perhitungan biaya lebih murah dari bangunan permanen.

### 2.1.2 Geologi

Banyaknya aliran sungai di Kota Banjarmasin dan ketinggian permukaan yang relatif datar/rendah menyebabkan kondisi tanahnya berawa-rawa. Kota Banjarmasin, termasuk Kota Banjarbaru, Martapura dan Amuntai termasuk kedalam cekung Sungai Barito. Disebelah timur cekung ini dibatasi oleh pegunungan Meratus yang membujur dengan arah utama selatan – utara, disebelah utara melengkung kearah barat yang kemudian bersatu dengan pegunungan di Kalimantan Tengah bagian timur.

Batuan dasar yang dijumpai pada cekung ini adalah batuan jenis metamorf yang terdiri dari skis kristalin, ditemukan juga batuan beku granit dan gneiss yang merupakan intrusi – intrusi baik yang berupa sill atau kedalam batuan sidemen dan secara tidak selaras ditutupi oleh konglomerat dan batu gamping yang berumur eosen sampai oligosen.

Kemudian secara selaras pula diatasnya mengendap batu pasir, lempung dan napal dengan sisipan - sisipan tipis batu gamping yang berumur neosen sampai kuartar.

Bagian teratas cekung ini tertutup endapan baru berupa kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan pengendapan sungai dan rawa.

Hal ini menyebabkan pada pengujian sigma tanah di Kota Banjarmasin sangat kecil yaitu kurang lebih 0,25 kg/cm<sup>2</sup> dan kedalaman tanah yang dijumpai dengan kondisi sigma tanah yang cukup didapat pada kedalaman antara 25–60 meter. Ini menyebabkan untuk pengembangan Kota Banjarmasin untuk bangunan–bangunan tinggi memerlukan biaya pondasi yang mahal. Untuk menanggulangi hal demikian, menurut pengalaman dan pengetahuan para orang terdahulu dan memanfaatkan kemajuan teknologi, warga membuat pondasi bangunan khususnya rumah tempat tinggal dari “*kaca puri*” (*tiang pancang dari kayugalam atau kayu ulin*) walaupun tetap berbentuk panngung. Sehingga bangunan dapat dibuat dengan type semi permanent dengan bahan dari pasangan batu bata untuk dinding dan keramik untuk lantai.

### 2.1.3 Hidrologi

Kota Banjarmasin dilalui oleh Sungai Martapura yang cukup besar, mengalir dari arah timur laut kearah barat daya. Anak–anak sungai lainnya yang mengalir melalui bagian selatan Kota Banjarmasin yaitu sungai Basirih, sungai Pekapuran, sungai Pemurus, sungai Guring, sungai Antasan Segara, Sungai Riam Kiwa, dan sungai Riam Kanan. Sedangkan yang mengalir disebelah utara yaitu sungai Belitung, sungai Pelambuan, sungai Jingah dan lain – lain.

Pada musim kemarau sebagian besar anak–anak sungai Martapura menjadi payau, karena intrusi air laut masuk jauh ke hulu sungai.

Sebagian besar sungai – sungai yang ada di Kota Banjarmasin berfungsi juga sebagai jalur transportasi sungai untuk menghubungkan kota – kota lainnya baik yang ada di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur.

Sebagian besar masyarakat yang mendiami sepanjang sungai menggunakan air sungai sebagai keperluan sehari – hari baik untuk minum, mandi, dan mencuci.

Hal ini menyebabkan pola sebaran air pasang melalui sungai-sungai mengelilingi Kota Banjarmasin, terutama pada kawasan-kawasan yang rendah air akan mengalir dan menyebar secara merata dan menyebabkan genangan-genangan atau rawa-rawa. Kondisi sebaran air yang menyebar ini menjadikan berawa-rawa ini, menyebabkan pola konstruksi bangunan untuk pondasi rumah masyarakat pada umumnya bertipe *panggung* dengan pondasi *cerucuk*. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dapat memanfaatkan air pasang untuk ditampung sebagai cadangan air bila terjadi kebakaran dapat dimanfaatkan.

#### 2.1.4 Klimatologi

Suhu rata-rata Kota Banjarmasin adalah antara  $25,9^{\circ}\text{C}$  –  $28,5^{\circ}\text{C}$ , termasuk kedalam daerah yang beriklim tropis.

Kota – kota di Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh angin musim dari arah barat yang sifatnya basah, karena telah melewati Samudera Hindia yang menyebabkan musim penghujan. Sedang pengaruh angin dari arah timur yang sifatnya kering menyebabkan musim kemarau.

Hujan turun pada musim penghujan antara bulan Nopember sampai April, sedangkan musim kemarau / kering yang panjang terjadi pada bulan Juli sampai Agustus. Curah hujan tahunan rata-rata mencapai 2.400 mm dan hari hujan pertahunnya adalah 150 hari.

Dilihat dari kondisi yang demikian, Kota Banjarmasin pada saat musim kemarau dimana curah hujan dan debit air sungai sangat kecil, menyebabkan kondisi atau kadar air bahan bangunan menjadi kering. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya bencana kebakaran yang lebih banyak.

### 2.1.5 Tata Guna Tanah

Luas Kota Banjarmasin adalah sebesar 7.375,09 ha, dimana penggunaan tanah dikelompokkan dalam empat kelompok besar yaitu perumahan, perindustrian, jasa dan perusahaan.

Dilihat pemanfaatan tanah yang ada, Kota Banjarmasin didominasi oleh penggunaan untuk perumahan, untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Ditinjau dari masing – masing penggunaan tanah yang ada didominasi oleh penggunaan untuk perumahan dan penggunaan lahan belum terbangun sebenarnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lain-lain. Konsentrasi bangunan perumahan kebanyakan berada pada kawasan–kawasan komersial dan pemerintahan serta kawasan industri yang terletak.

**TABEL II.1**  
**JENIS DAN LUAS PENGGUNAAN TANAH**  
**TIAP KECAMATAN, TAHUN 1999/2000**

No.	Kecamatan	Prumahan	Industri	Jasa	Peru-sahaan	Belum Terbangun	Jumlah
1	Bjr. Timur	564,52	1,7	78.02	33,02	479,74	1.175
2	Bjr.Barat	556,97	11,54	39,47	40,45	260,57	909
3	Bjr.Selatan	654,41	29,80	111,53	61,31	1239,39	2.098
4	Bjr. Utara	538,40	83,00	15.55	42.50	2570.55	3.250

Sumber : Monografi Kecamatan  
Kota Banjarmasin, tahun 2000

### 2.1.6 Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 1999, jumlah penduduk Kota

Banjarmasin adalah 522.197 jiwa dengan kepadatan rata-rata 77,52 jiwa/ha, dengan kepadatan yang tertinggi dijumpai di Kecamatan Banjar Barat 161 jiwa/ha dan Kecamatan Banjar Timur sebesar 116 jiwa/ha. Adapun kepadatan rendah dijumpai pada Kecamatan Banjar Selatan 46 jiwa/ha dan Kecamatan Banjar Utara 43 jiwa/ha. Sedangkan kepadatan tinggi tiap-tiap kelurahan dijumpai di kelurahan Kelayan Luar 704 jiwa/ha–Kecamatan Banjar Utara dan kepadatan rendah pada kelurahan Mantuil 11 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk ditiap kelurahan dapat dilihat pada Tabel II . 2 dan Gambar 2.2.

Konsentrasi penduduk di kelurahan Kelayan secara keseluruhan disebabkan oleh karena pada kemudahan–kemudahan terhadap fasilitas umum yang ada didaerah tersebut seperti pelabuhan lama Teluk Tiram, Pusat Perdagangan Kota Banjarmasin (Pasar Baru), Pasar Induk Antasari dan kawasan komersial disekitarnya serta pusat pemerintahan Kota Banjarmasin (Kantor Walikota) dan sarana pemerintahan lainnya. Menyebabkan konsentrasi penduduk disekitar kawasan perdagangan/komersial dan jasa tersebut terlihat sebagai kawasan yang kualitas lingkungannya tidak layak, tempat hunian yang tidak memenuhi syarat serta adanya daerah rawan kejahatan.

## **2.2 Karakteristik Kebakaran Kota Banjarmasin**

### **2.2.1 Perumahan dan Kepadatan Bangunan**

Sarana perumahan merupakan komponen pokok dari kebutuhan masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga dari panas, dingin, dan hujan serta untuk melepaskan lelah dan keletihan dari aktivitas sehari–hari. Selain itu rumah juga digunakan sebagai tempat beristirahat dan bercengkerama didalam keluarga.

Hal ini untuk keluarga dapat berinteraksi dengan sesama keluarga dan masyarakat disekitarnya, sehingga kebutuhan rumah bagi masyarakat menjadi sangat esensial sekali. Walaupun kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat terbatas

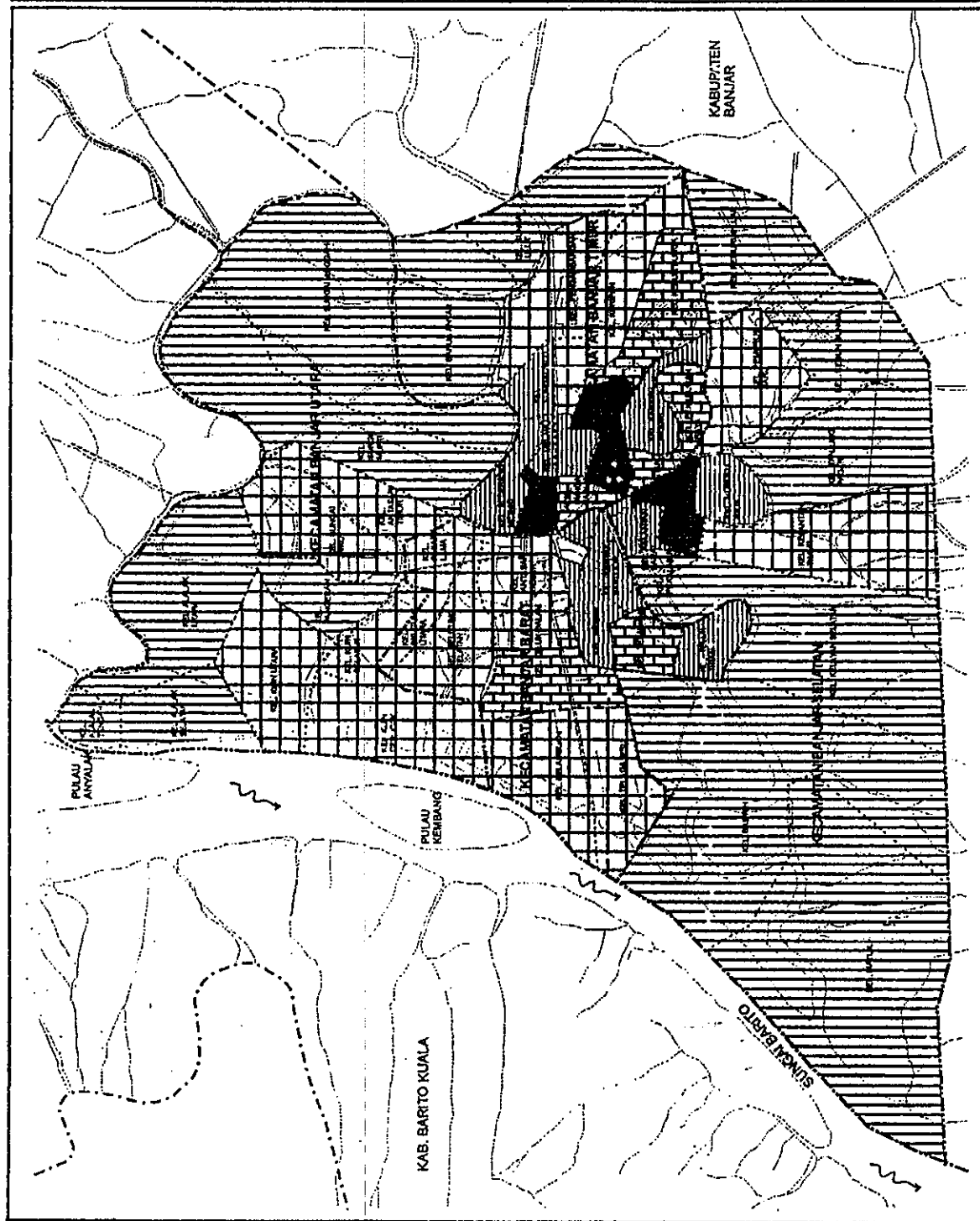
**TABEL II.2**  
**JUMLAH PENDUDUK PADA TIAP KELURAHAN**  
**KOTA BANJARMASIN, TAHUN 1999/2000**

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (org/ha)	No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (org/ha)
<b>A. Banjar Timur</b>									
1	Pekapuran Raya	83	14.281	172	<b>C. Banjar Utara</b>				
2	Karang Mekar	56	14.261	255	1	Kuin Cerucuk	166	16.160	97
3	Kebun Bunga	97	15.241	157	2	Kuin Selatan	122	9.495	78
4	Sungai Lutut	256	5.826	23	3	Kuin Utara	74	5.660	76
5	Kuripan	129	13.771	107	4	Pangeran	150	7.219	48
6	Sungai Baru	45	8.717	194	5	Sungai Mai	230	13.360	59
7	Pekapuran Laut	24	8.994	375	6	Antasan Kecil Timur	76	8.066	106
8	Gedang	26	8.438	325	7	Surgi Mufti	305	7.654	25
9	Seberang mesjid	39	8.430	216	8	Sungai Jingah	245	6.154	25
10	Melayu	53	11.799	223	9	Alalak Utara	430	5.039	12
11	Sungai Bilu	51	10.376	203	10	Alalak Selatan	175	6.139	35
12	Pengambangan	103	10.638	103	11	Alalak Tengah	125	5.112	41
13	Banua Anyar	213	6.092	29	Jumlah		2.098	90.057	43
Jumlah		1.175	136.816	116	<b>D. Banjar Selatan</b>				
<b>B. Banjar Barat</b>									
1	Teluk Tiram	50	10.346	207	1	Mantuil	755	8.337	11
2	Telawang	61	11.498	188	2	Basirih	605	22.798	38
3	Mawar	30	7.932	264	3	Kelayan Selatan	313	12.794	41
4	Kertak Baru Ilir	40	8.443	211	4	Kelayan Timur	119	12.229	103
5	Kertak Baru Ulu	43	4.647	108	5	Tanjung Pagar	300	4.400	15
6	Antasan Besar	72	8.988	125	6	Pemurus Dalam	395	11.972	30
7	Teluk Dalam	149	25.219	169	7	Pemurus Luar	172	7.846	46
8	Telaga Biru	110	14.676	133	8	Pemurus Baru	170	9.700	57
9	Pelambuan	157	20.686	132	9	Murung Raya	54	11.118	206
10	Belitung Selatan	101	13.355	132	10	Kelayan Dalam	16	10.347	647
11	Belitung Utara	56	7.472	133	11	Kelayan Tengah	14	9.038	646
12	Pasar Lama	40	12.296	307	12	Pekamaan	309	10.779	35
Jumlah		909	146.044	161	13	Kelayan Barat	15	3.772	251
Jumlah		909	146.044	161	14	Kelayan Luar	13	9.148	704
TOTAL (A+B)		2.084	282.860	136	Jumlah		3.250	90.057	28
TOTAL (C+D)		5.348		180.114	TOTAL (C+D)		5.348		180.114

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Tahun 2000

**KETERANGAN**

	BATAS KABUPATEN
	BATAS KECAMATAN
	BATAS KELURAHAN
	SUNGAI
	JALAN RAYA
	JALAN LOKAL
	< 50 JIWA
	50 - 150 JIWA
	150 - 200 JIWA
	200 - 300 JIWA
	> 300 JIWA





banyak dijumpai rumah-rumah yang berdesakan dan tidak tertata dengan baik pada kawasan-kawasan perkotaan.

Kepadatan bangunan yang tinggi menyebabkan kondisi lingkungan rumah dan bangunannya lainnya tidak dapat berkembang dan tidak sehat dari segi kesehatan lingkungan serta yang lebih parah lagi adalah lebih mudahnya penjarangan api apabila terjadi musibah kebakaran. Kondisi dan jenis rumah juga sangat berpengaruh sekali terjadinya kebakaran dan penjarangannya akan lebih cepat. Kepadatan bangunan yang terjadi di Kota Banjarmasin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II . 3.

Dengan melihat kondisi kepadatan bangunan pada tiap-tiap kelurahan di Kota Banjarmasin sangat beragam sekali dari kepadatan yang relatif kecil sampai kepada yang sangat rapat. Dimana kerapatan bangunan yang kecil  $\leq 10$  bangunan/ha pada Kelurahan Mantuil – Kecamatan Banjar Selatan dengan kepadatan rata-rata 1,76 bangunan/ha. Sedangkan kerapatan bangunan yang besar  $\geq 40$  bangunan/ha dapat dijumpai kerapatan yang paling tinggi yakni pada Kelurahan Kelayan Dalam – Kecamatan Banjar Selatan dengan kerapatan 134,44 bangunan/ha. Namun hal ini tidak menutupi kemungkinan daerah yang relatif lebih kecil kerapatan bangunannya tidak terdapat wilayah perumahan yang padat. Konsentrasi penduduk biasanya lebih cenderung untuk hidup berkelompok dan mendekati pada daerah kegiatan ekonomi / komersial seperti wilayah perdagangan, pemerintahan dan lainnya. Sehingga kejadian kebakaran di kota Banjarmasin sangat beragam. Hal tersebut diakibatkan dari kondisi fisik bangunan, lingkungan perumahan dan pemukiman serta kegiatan lainnya.

Jumlah kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin dilihat dari banyak kejadian yang berasal dari perumahan setiap tahunnya selama enam tahun terakhir dari

**TABEL II.3**  
**JUMLAH DAN JENIS RUMAH/BANGUNAN MASING - MASING**  
**KELURAHAN KOTA BANJARMASIN, TAHUN 1998/2000**

No.	Kecamatan/Kelurahan	A	B	C	D	E	F	No.	Kecamatan/Kelurahan	A	B	C	D	E	F
<b>A.</b>															
	Banjar Timur							C.	Banjar Utara						
1	Pekapuran Raya	83	1.277	738	2.098	83	25,3	1	Kuin Cencuk	1.112	1.951	156	3.219	166	19,39
2	Karang Mekar	357	1.478	1.431	3.266	56	58,3	2	Kuin Selatan	427	1.446	88	1.961	122	16,07
3	Kekun Bunga	144	1.392	841	2.377	97	24,5	3	Kuin Utara	216	956	156	1.328	74	17,95
4	Sungai Lutut	71	649	442	1.162	256	4,5	4	Pangeran	521	757	60	1.338	150	8,92
5	Kuripan	204	539	1.115	1.858	129	14,4	5	Sungai Mai	1.795	879	60	2.734	230	11,89
6	Sungai Baru	47	559	460	1.066	45	23,7	6	A. Keci Timur	583	1.135	163	1.881	76	24,75
7	Pekapuran Laut	21	417	818	1.256	24	52,3	7	Surgi Muthi	1.190	933	65	2.188	305	7,17
8	Gedang	128	619	422	1.169	26	45,0	8	Sungai Jindah	1.027	1.556	65	2.648	245	10,81
9	Seberang mesjid	16	847	596	1.459	39	37,4	9	Alalak Utara	612	915	541	2.068	430	4,81
10	Melayu	448	1.321	590	2.359	53	44,5	10	Alalak Selatan	111	1.219	353	1.683	175	9,62
11	Sungai Bilu	152	1.300	462	1.914	51	37,5	11	Alalak Tengah	32	703	379	1.114	125	8,91
12	Pengambangan	69	1.452	670	2.191	103	21,3		Jumlah	7.606	10.396	2.240	22.162	2.098	10,56
13	Barua Anyar	5	253	804	1.062	213	5,0								
	Jumlah	1.745	12.203	9.354	23.302	1.175	19,8	D	Banjar Selatan						
<b>B.</b>															
	Banjar Barat							1	Mantui	155	459	714	1.328	755	1,76
1	Teluk Tiram	853	1.021	-	1.874	50	37,5	2	Basirih	1.551	1.833	246	3.630	605,0	6,00
2	Telawang	900	1.192	-	2.092	61	34,3	3	Kelayan Selatan	1.520	1.005	175	2.700	313	8,63
3	Mawar	600	516	-	1.116	30	37,2	4	Kelayan Timur	1.119	986	92	2.197	119	18,46
4	Kertak Baru Iir	2.211	394	-	2.605	40	65,1	5	Tanjung Pagar	300	246	272	818	300	2,73
5	Kertak Baru Ulu	895	133	-	1.028	43	23,9	6	Pemurus Dalam	395	2.671	214	3.280	395	8,30
6	Antasan Besar	635	701	-	1.336	72	18,6	7	Pemurus Luar	50	-	1.952	2.002	172	11,64
7	Teluk Dalam	1.881	2.709	-	4.590	149	30,8	8	Pemurus Baru	198	827	241	1.266	170	7,45
8	Telega Biru	904	1.845	-	2.749	110	25,0	9	Murung Raya	154	-	1.831	1.985	54,0	36,76
9	Pelambuan	1.806	2.216	-	4.022	157	25,6	10	Kelayan Dalam	166	1.926	91	2.183	16	136,44
10	Belitung Selatan	1.038	1.156	-	2.194	101	21,7	11	Kelayan Tengah	145	1.069	100	1.314	14	93,86
11	Belitung Utara	618	788	-	1.406	56	25,1	12	Pekaman	1.210	868	68	2.146	309	6,94
12	Pasar Lama	568	1.091	-	1.659	40	41,5	13	Kelayan Barat	451	612	46	1.109	15	73,93
	Jumlah	12.902	13.764	-	26.666	909	29,3	14	Kelayan Luar	134	855	55	1.044	13	80,31
									Jumlah	7.548	10.835	5.860	24.263	3.250	7,47

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, Tahun 2000

BPN Kota Banjarmasin, Tahun 2000

Keterangan :

A = rumah permanen      D = jumlah rumah  
B = rumah Semi permanen      E = luas wilayah kelurahan  
C = rumah tidak permanen      F = kerapatan bangunan

**MAGISTER TEKNIK  
PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**TESIS**

**EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM KINERJA/ PENGELOLAAN  
UNIT PEMADAM KEBAKARAN (BPQ MANDIRI)  
SEBAGAI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK  
(OBJEK STUDI KOTA BANJARMASIN)**

**PETA**

**KEPADATAN BANGUNAN  
TAHUN 2000  
KOTA BANJARMASIN**

**KETERANGAN**

[Symbol]	BATAS KABUPATEN
[Symbol]	BATAS KECAMATAN
[Symbol]	BATAS KELURAHAN
[Symbol]	SUNGAI
[Symbol]	JALAN RAYA
[Symbol]	JALAN LOKAL
[Symbol]	< 10 BANGUNAN/HA
[Symbol]	10 - 20 BANGUNAN/HA
[Symbol]	21 - 40 BANGUNAN/HA
[Symbol]	> 40 BANGUNAN/HA



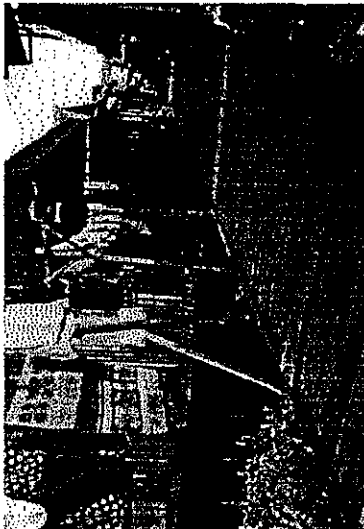
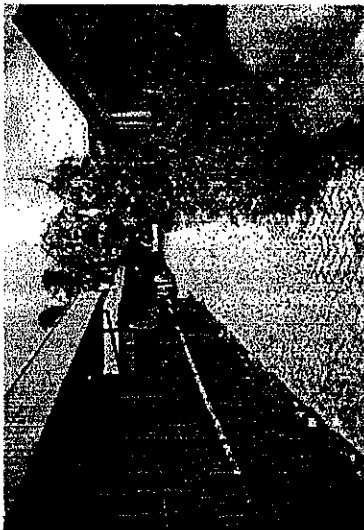




UTARA

SKALA  
0 500 1000

N  
W  
E  
S

NOMOR GAMBAR  
**2. 2 a**



 <p>MAKASUD DAN TUJUAN PEMERINTAH KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KINERJA/PENGELOLAAN UNIT PEMDAM KEBAKARAN (BPK) MANDIRI SEBAGAI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK (OBJEK STUDI KOTA BANJARMASIN)</p>	<p>PETA</p>	<p>KONDISI JALAN DAN PERUMAHAN WARGA</p>	<p>KETERANGAN</p>			<p>SKALA NO. GAMBAR</p>	<p>2. 3</p>	<p>SUMBER :</p>
 	 	 							

tahun 1995 sampai tahun 2000 sebanyak 91 kali , jumlah bangunan rumah terbakar sebanyak 1.038 buah rumah. Untuk lebih jelasnya rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL II.4**  
**KEJADIAN KEBAKARAN BANGUNAN RUMAH**  
**TH.1995 – 2000**  
**Di KOTA BANJARMASIN**

No	Tahun	Kejadian Kebakaran		Perkiraan Kerugian (Rpxjuta)
		Kejadian(kali)	Rumah yang terbakar(bh)	
1	1995	6	18	630
2	1996	18	22	770
3	1997	12	134	4.690
4	1998	19	98	3.430
5	1999	23	683	23.905
6	2000	13	83	2.905
	<b>Jumlah</b>	91	1.038	36.330

Sumber : Dinas Tibum –seksi Kebakaran  
Kota Banjarmasin, Tahun 2000

## **2.2.2 Jenis Bangunan umum dan Industri**

### **2.2.2.1 Bangunan Umum /Perdagangan**

Sarana perdagangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin cukup memadai untuk melayani masyarakat, baik untuk masyarakat yang bermukim di Kota Banjarmasin sendiri maupun bagi kota – kota lainnya di Propinsi Kalimantan Selatan dan sebagian kota – kota di Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan daerah

hinterlandnya Kota Banjarmasin.

Sebagai kota yang berfungsi sebagai daerah perdagangan dan jasa, Kota Banjarmasin dilengkapi dengan berbagai fasilitas utama dan penunjang baik berupa pasar induk, terminal kendaraan dan pelabuhan yang dapat mendistribusikan barang ke daerah – daerah yang dapat dijangkau lewat jalan darat, sungai dan laut.

Untuk mengetahui lebih jelas sarana perdagangan yang ada di Kota Banjarmasin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL II.5**  
**SARANA BANGUNAN UMUM /PERDAGANGAN**  
**DI KOTA BANJARMASIN DIRINCI PER KECAMATAN**  
**TAHUN 1999/2000**

No	Kecamatan	Sarana Perdagangan					Ket
		Pasar Umum	Pasar Hewan	Toko	Kios	Gudang	
1	Banjar Timur	9	1	341	971	19	1.349
2	Banjar Barat	26	4	1.486	4.009	19	5.705
3	Banjar Selatan	12	1	351	1.767	80	2.211
4	Banjar Utara	9	1	90	273	20	393
	<b>Jumlah</b>	56	7	2.268	7.028	138	9.497

Sumber : Monografi sekecamatan  
Kota Banjarmasin, Tahun 2000

Dilihat dari jumlah sarana perdagangan yang terdapat di Kota Banjarmasin, terutama pasar umum hampir merata jumlahnya disetiap kecamatan dan jumlah yang terbanyak ada di Kecamatan Banjar Barat sebanyak 26 buah. Sedangkan jumlah toko yang terbanyak di Kecamatan Banjar Barat sebanyak 1.480 buah.

Bila diamati fasilitas perdagangan, terutama pasar – pasar yang berskala lokal sebagian ada yang berubah fungsi yang mana dimanfaatkan sebagai tempat tinggal

/pemukiman penduduk. Disamping sarana perdagangan dapat menjadikan daerah yang rawan kebakaran dan rawan kejahatan, juga dapat menjadi pemicu bencana kebakaran dimana pasar-pasar tersebut dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk.

Kejadian kebakaran yang menimpa untuk bangunan umum tersebut lebih sering dijumpai untuk bangunan perdagangan dan bangunan lainnya. Bangunan perdagangan dan gedung kantor yang terbakar selama enam tahun terakhir dari tahun 1995 sampai tahun 2000 untuk toko/kios dan pasar 17 kali dan perkantoran 7 kali dan untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

**TABEL II.6**  
**BANGUNAN UMUM/KANTOR YANG TERBAKAR**  
**TH. 1995 S/D 2000 DI KOTA BANJARMASIN.**

No	Tahun	Kejadian Kebakaran			Perkiraan kerugian (Rp.x juta)
		Kejadian (kali)	Kios/toko terbakar (bh)	Kantor/ Sekolah (bh)	
1	1995	6/1	112	2	757
2	1996	2/1	2	2	400
3	1997	5/0	5	1	1.401
4	1998	2/3	2	3	3.064
5	1999	3/3	96	3	1.320
6	2000	3/1	83	1	4.450
	<b>Jumlah</b>	17/7	300	11	11.392

Sumber : Dinas Tibum –seksi Kebakaran  
Kota Banjarmasin, Tahun 2000

#### 2.2.2.2 Industri

Berkembangnya kegiatan industri berarti meningkatnya kebutuhan akan

pelayanan fasilitas pemadam kebakaran sesuai dengan jenis industri yang ada. Hal ini disebabkan banyak dari kegiatan industri yang sangat berbahaya bagi kebakaran (Prihartini, 1979 : 42 ).

Kegiatan yang ada dikota Banjarmasin, didominasi oleh kegiatan perekonomian adalah kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan permukiman. Sedangkan kegiatan industri lebih banyak dijumpai pada kawasan industri Basirih dan Alalak. Jenis kegiatan industri terutama jenis pengolahan terutama industri kayu, karet dan udang.

Kegiatan industri yang banyak dijumpai dilingkungan masyarakat adalah industri rumah tangga, namun dengan kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin untuk jenis industri rumah tangga yang dapat merusak/menyemari lingkungan direlokasi ke daerah kawasan lingkungan industri (LIK) **Liang Anggang**. Kebijakan ini untuk menunjang pengaman kawasan dari pencemaran yang tidak terkontrol, sehingga dapat merusak lingkungan serta yang lebih penting lagi adalah menghindari dari bahaya kebakaran baik untuk industrinya sendiri maupun dari pemukiman warga.

Adapun jumlah industri yang ada dikota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel

## II.7.

Kejadian kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin diakibatkan oleh kegiatan industri meliputi kejadian industri kecil dan industri besar, namun kejadian yang diakibatkan oleh industri yang berbahaya seperti industri kayu lapis dan penyimpanan kayu – kayu ( industri plywood dan moulding/mebeller ). Hal ini hampir tidak menyentuh daerah – daerah pemukiman penduduk, sebab kawasan industri tersebut telah dilokalisir pada kawasan industri yang telah diuraikan diatas. Kejadian kebakaran untuk industri kayu lapis dan log kayu 2 kali dan bengkel yang berskala kecil 3 kali.



**TABEL II.7**  
**JENIS INDUSTRI YANG ADA DIRINCI PERKECAMATAN**  
**KOTA BANJARMASIN, TAHUN 1999/2000**

No.	Kecamatan	Jumlah & Jenis			Keterangan
		A	B	C	
1	Banjar Timur	12	13	7	
2	Banjar Barat	17	24	6	
3	Banjar Selatan	26	20	8	
4	Banjar Utara	4	13	2	
	<b>Jumlah</b>	59	70	23	

Sumber : Kantor Dinas Perdagangan & Industri  
Kota Banjarmasin, Tahun 2000

Keterangan :

A = Jenis industri berbahaya      C = Jenis industri tidak berbahaya  
B = Jenis industri agak berbahaya

### 2.3 Kerugian Material Bencana Kebakaran

Pencatatan kejadian kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin selama ini hanya dilakukan oleh Seksi Linmas/Kebakaran-Dinas Ketertiban Umum Kota Banjarmasin, sehingga pencatatan kerugian bencana kebakaran yang terjadi hanya suatu inisiatif dari staf/anggota pemadam kebakaran (BPK) Kota Banjarmasin. Hal ini menyebabkan pencatatan kurang berjalan dengan baik secara administrasi, sehingga dokumentasi kejadian kebakaran tidak terangkum dengan baik. Jadi untuk mengidentifikasi kejadian baik lokasi, kerugian harta benda, penyebab terjadinya kebakaran serta gambaran daerah rawan kebakaran tidak tersedia dengan baik. Hal ini dapat disebabkan kewenangan yang dimiliki Seksi Linmas/Kebakaran tidak diperkuat dengan perda yang mengaturnya, baik pengaturan pencegahan maupun penanggulangan kebakaran sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Perumahan terutama untuk bangunan bertingkat dan bangunan lainnya. Sehingga peta kerugian kebakaran yang

terjadi di kota Banjarmasin tidak terlihat dengan baik dan akurat. Kerugian yang diderita baik jiwa maupun harta benda sangat sulit untuk ditelusuri akurasi, untuk lebih jelasnya jumlah kerugian dan kejadian dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II . 8**  
**JUMLAH KEBAKARAN DAN KERUGIAN JIWA/HARTA**  
**TH. 1995 S/D 2000 DI KOTA BANJARMASIN**

Keterangan / Uraian	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Total
Jumlah kejadian(kali)	14	26	20	35	31	18	144
Kerugian ( juta Rp )	1.324	3.799	5.772	4.535	15.281	6.960	43.435
Korban jiwa	0	0	0	0	0	3	3
Kehilangan rumah/kk	33	47	150	122	1.209	93	1.654

Sumber : Kantor Dinas Tibum Kota Banjarmasin,2000

Untuk mengetahui penyebaran kejadian bencana kebakaran di kota Banjarmasin selama enam tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2000 dirinci perkelurahan dapat dilihat Gambar 2.4.

## **2.4 Kelembagaan Unit BPK**

### **2.4.1 Organisasi Unit BPK**

Terbentuknya organisasi unit BPK yang ada di Kota Banjarmasin tidak terlepas dari tujuan awal dibentuknya, yaitu untuk menanggulangi bencana kebakaran yang menimpa masyarakat terutama pada kawasan – kawasan permukiman penduduk setempat.

Ada penulis yang membagi organisasi kedalam empat kategori ( *Wheele dan Hunger,1990* ) yaitu : (1). Swasta yang mencari untung ( private for profit ) ialah organisasi swasta murni yang terutama menggantungkan kehidupannya pada pasar; (2). Swasta setengah pemerintah (private quasi public) yaitu organisai yang dibentuk

**TABEL II.9 a**  
**JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN DIRINCI TIAP KELURAHAN**  
**KOTA BANJARMASIN, TAHUN 1995 s/d 2000**

No.	Kecamatan/Kelurahan	Tahun					Jumlah	No.	Kecamatan/Kelurahan	Tahun					Jumlah		
		1995	1996	1997	1998	1999				2000	1995	1996	1997	1998		1999	2000
<b>A.</b>																	
1	Banjir Timur							C.	Banjir Utara								
1	Pekapuran Raya	0	0	0	1	3	0	4	1	Kuin Cepuk	1	0	0	0	1	0	2
2	Karang Mekar	0	0	0	0	0	0	0	2	Kuin Selatan	0	0	0	0	0	0	0
3	Kebun Bunga	1	1	0	2	2	2	8	3	Kuin Utara	0	0	0	0	0	0	0
4	Sungai Lutut	0	0	0	2	0	1	3	4	Pangeran	0	0	1	0	1	0	2
5	Kuripan	0	0	1	0	1	0	2	5	Sungai Mial	0	1	0	3	4	1	9
6	Sungai Baru	1	0	3	0	1	0	5	6	Antasan Kecil Timur	0	0	0	0	0	0	0
7	Pekapuran Laut	3	2	0	0	0	1	6	7	Surgi Mufti	0	0	0	2	0	2	4
8	Gedang	0	0	0	2	0	1	3	8	Sungai Jingah	0	0	0	1	1	0	2
9	Seberang mesjid	0	0	0	2	0	1	3	9	Alalak Utara	0	0	0	0	0	0	0
10	Melayu	0	0	1	2	1	0	4	10	Alalak Selatan	0	0	0	0	1	0	1
11	Sungai Bilu	1	0	0	1	0	1	3	11	Alalak Tengah	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengambangan	0	0	0	2	1	0	3		Jumlah	1	1	1	6	8	3	20
13	Banua Anyar	0	0	0	0	0	0	0									
	Jumlah	6	3	5	14	9	7	44	D	Banjir Selatan							
<b>B.</b>																	
1	Banjir Barat								1	Mantuil	0	1	0	0	0	0	1
1	Teluk Tiram	0	3	0	0	0	0	3	2	Basirih	0	1	1	1	1	0	4
2	Telawang	1	0	1	1	0	1	4	3	Kelayan Selatan	0	0	1	0	0	0	1
3	Mawar	0	2	0	0	1	1	4	4	Kelayan Timur	0	0	0	1	0	0	1
4	Kertak Baru Ilir	0	0	4	0	0	0	4	5	Tanjung Pagar	0	0	0	0	0	0	0
5	Kertak Baru Ulu	2	1	1	2	1	4	11	6	Pemurus Dalam	1	0	1	0	1	0	3
6	Antasan Besar	0	0	0	0	0	0	0	7	Pemurus Luar	0	0	0	1	2	0	3
7	Teluk Dalam	0	1	2	1	0	0	4	8	Pemurus Baru	0	0	0	0	0	0	0
8	Telaga Biru	0	3	1	2	1	0	7	9	Murung Rava	0	0	0	0	0	0	0
9	Pelambuan	1	1	0	2	1	0	5	10	Kelayan Dalam	0	0	0	0	0	0	0
10	Belitung Selatan	0	2	2	1	2	0	7	11	Kelayan Tengah	0	0	0	0	1	1	2
11	Belitung Utara	2	0	0	2	0	0	4	12	Pekamaan	0	1	0	0	0	0	1
12	Pasar Lama	0	4	0	1	2	1	8	13	Kelayan Barat	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	5	17	11	12	8	7	61	14	Kelayan Luar	0	2	0	0	1	0	3
	TOTAL (A+B)	12	20	16	26	17	14	105		Jumlah	1	5	3	3	6	1	19
	TOTAL (A+B+C+D) = 144 KEJADIAN									TOTAL (C+D)	2	6	4	9	14	4	39

Sumber : Dinas Tihum - Seksi Linmas Kota Banjarmasin, Tahun 2000

**\* TESIS**

**EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM KINERJA/ PENGELOLAAN  
UNIT PEMADAM KEBAKARAN (BP) MANDIRI  
SEBAGAI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK  
(OBJEK STUDI KOTA BANJARMASIN)**

**PETA**

**LOKASI KEBAKARAN :  
TAHUN 1996 - 2000**

**KETERANGAN**

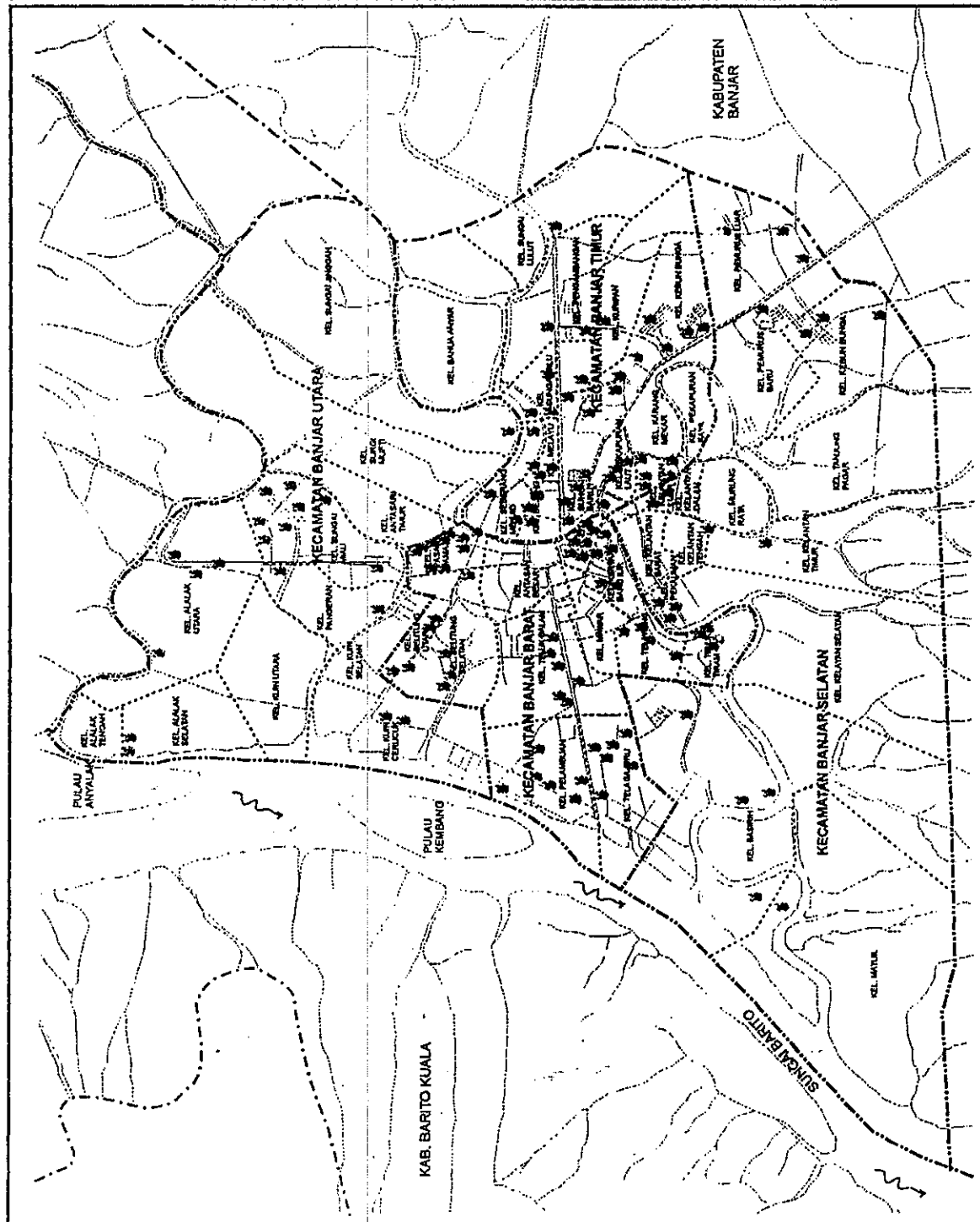
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KELURAHAN
- SUNGAI
- JALAN RAYA
- JALAN LOKAL
- LOKASI KEBAKARAN

SKALA

UTARA



2. 4



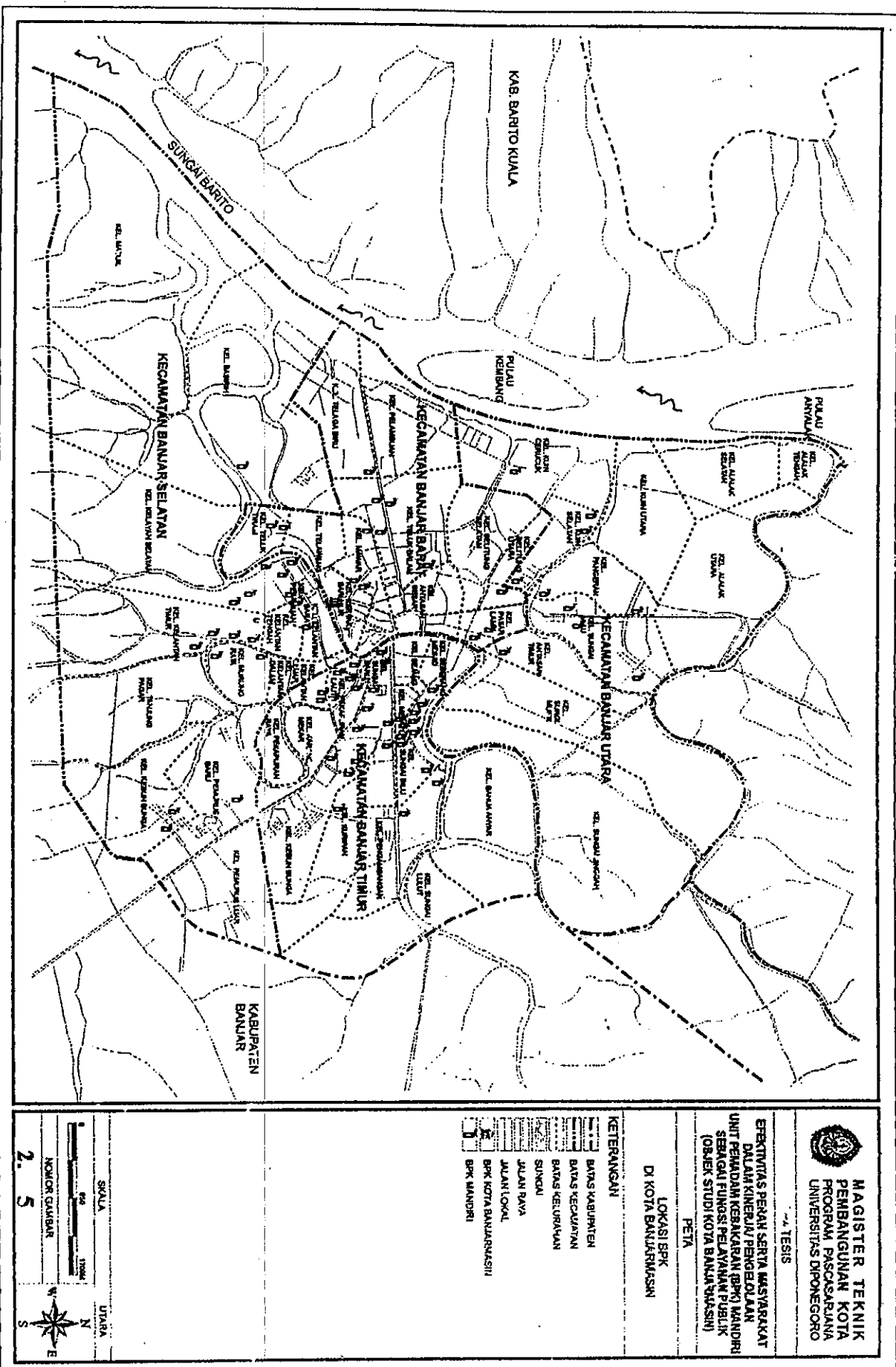
dan ditunjuk oleh pemerintah kemudian wewenang memonopoli dalam bisnis tertentu; (3) swasta non profit ( private non profit ) yaitu organisasi nirlaba; (4). Organisasi publik yaitu badan – badan pemerintah yang memungut pajak dan semacamnya yang memberi pelayanan dan sebagainya.

Jadi organisasi Unit pemadam kebakaran yang dibentuk adalah organisasi non profit yaitu organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utama didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau korporasi yang tidak membagikan keuntungan sedikitpun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya ( *Oleck*, 1988 ).

Oleh karena itu terbentuknya organisasi unit BPK yang ada di Kota Banjarmasin tidak dapat dipisahkan dari tujuan awal dibentuknya yaitu membantu sesama yang terkena musibah dan tidak mencari keuntungan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungannya. Untuk lebih jelasnya jumlah organisasi BPK yang ada di kota Banjarmasin lihat tabel II. 9 dan penyebaran posko Unit – unit BPK mandiri dapat dilihat pada Gambar 2. 5 serta aktivitas anggota unit BPK mandiri pada Gambar 2.5a.

Sedangkan struktur organisasi unit BPK seperti organisasi lainnya, disusun dalam satu susunan hierarki kekuasaan piramidal. Setiap orang bekerja sesuai dengan rincian tugas yang disediakan dan menurut aturan yang umum yang berlaku. Namun demikian, ada kesepakatan diantara para anggota unit BPK yaitu bila terjadi bencana kebakaran seluruh anggota terjun kelokasi kejadian musibah didalam membantu pelayanan pemadaman kebakaran.

Pada umumnya struktur organisasi unit BPK diketuai oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara serta dilengkapi seksi – seksi lainnya, lebih jelasnya lihat Gambar 2.6.





UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM KINERJA/PENGELOLAAN UNIT PENDAM  
KEBAKARAN (BPK) MANDIRI SEBAGAI FUNGSI  
PELAYANAN PUBLIK (OBJEK STUDI KOTA  
BANJARMASIN)

PETA

AKTIVITAS UNIT BPK MANDIRI

KETERANGAN

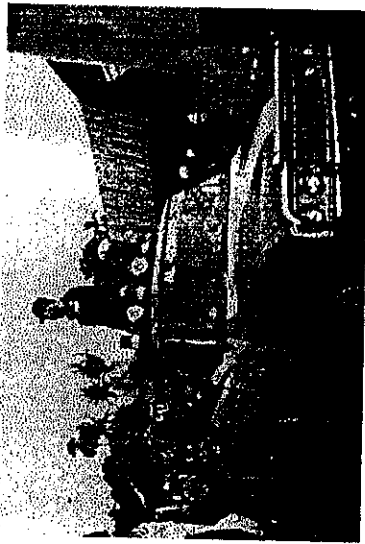
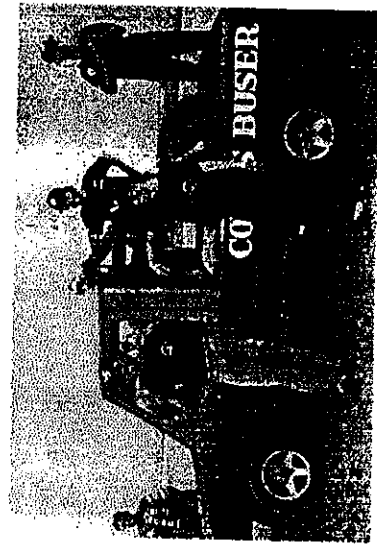


SKALA NO. GAMBAR

2. 5 a

UTARA

SUMBER :



**Tabel II.9**  
**Jumlah Unit BPK Di Kota Banjarmasin**  
**Dirinci Perkecamatan, Tahun 1999/2000**

No.	Kecamatan	Jumlah ( Unit )	Jumlah anggota (org)
1	Banjar Timur	34	1530
2	Banjar Barat	20	680
3	Banjar Selatan	19	570
4	Banjar Utara	9	270
5	Pemerintah Kota B.Masin	1	17
	<b>Jumlah</b>	83	3.067

Sumber : Dinas Tibum - Seksi Linmas  
Kota Banjarmasin, Tahun 2000

Jumlah anggota yang dimiliki rata-rata setiap unit organisasi BPK mempunyai anggota  $\pm 40$  orang. Namun ada Unit BPK yang memiliki anggota  $\pm 250$  orang sesuai dengan armada yang mereka miliki yakni Unit BPK Hippindo dan ada juga unit BPK yang memiliki anggota  $\pm 20$  orang. Dimana anggota yang direkrut untuk dijadikan anggota pemadam kebakaran adalah anggota masyarakat setempat dimana unit-unit BPK berada.

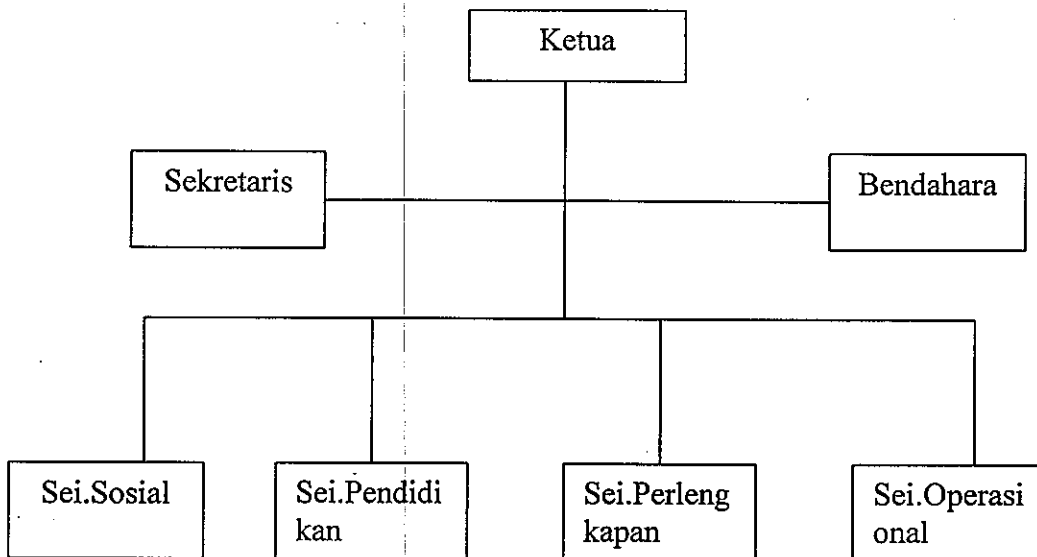
#### **2.4.2 Sistim Pelayanan BPK**

Sistim pelayanan dari keseluruhan unit – unit BPK yang dikelola oleh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin pada intinya adalah pelayanan setempat/lingkungan (in site), sedangkan pelayanan keluar (out site) adalah pelayanan berbantuan kepada unit – unit BPK terdekat sesuai dengan permintaan.

Jadi sistim pelayanan yang diterapkan adalah melaksanakan etika, sesuatu yang berdampak menyenangkan, mensejahterakan sebagian, sekelompok atau seluruh masyarakat yang dilayani (masyarakat yang terkena musibah kebakaran).



**GAMBAR 2.6**  
**STRUKTUR ORGANISASI UNIT BPK\***



♣ Sumber : BPK Beruntung Jaya, tahun 1999/2000

Hal ini, menyebabkan sistim pelayanan yang mandiri lebih dikedepankan. Pelayanan yang diberikan didalam menanggulangi bencana kebakaran adalah penanggulangan mandiri oleh warga setempat baik oleh warga masyarakat itu sendiri maupun anggota unit BPK setempat dan pelayanan sistim "*kerubut (bahasa Banjar)*" yakni pemadaman yang dilakukan secara bersama-sama dengan satuan BPK lainnya. Sebab pelayanan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan peralatan yang dimiliki oleh satuan-satuan BPK yang ada. Terutama peralatan tangki air, sebagian besar satuan-satuan BPK tidak memiliki mobil tangki air. Sehingga kehandalan dan kecepatan memadamkan bencana kebakaran tergantung dari tersedianya sumber air dan tempat-tempat/kolam air yang ada dilokasi kejadian. Istilahnya berangkat ke medan perang tidak membawa peluru, berbeda sekali dengan seorang tentara yang berangkat untuk berperang yang dilengkapi dengan senjata dan pelurunya.

Peran serta warga masyarakat tenaga sukarela ini, didalam menjalankan tugas tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan “ *Protap* “ bersama dengan unit-unit BPK lainnya serta tetap memperhatikan faktor keselamatan kerja/jiwa dan pihak pemerintah kota.

### 2.4.3 Sumber Pendanaan

Untuk pendanaan operasional dan pemeliharaan unit – unit BPK berasal dari beberapa sumber yang berasal dari :

a. Dana Masyarakat :

Unit-unit BPK yang berada dimasing-masing wilayah mempunyai sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat yang berupa :

- Iuran bulanan yang telah ditetapkan
- Donatur : - Masyarakat  
                  - perusahaan/organisasi lain

b. Kegiatan Sosial :

Sumber pendanaan dari kegiatan sosial ini dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh anggota pemadam kebakaran didalam mencari dan menggali sumber-sumber pendanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosial antara lain :

- Penjualan paket ( sembako, stiker, dll )
- Mengadakan pekan amal/lelang, dan lain – lain.

c. Unit Usaha Sendiri

Bagi mereka yang mempunyai unit BPK yang besar, ada unit usaha yang dapat menunjang dana operasional BPK. Sehingga keuntungan yang didapat dari unit usaha tersebut dapat diperuntukkan bagi keberlangsungan operasional unit – unit BPK tersebut. Jadi Unit-unit BPK yang mempunyai unit usaha sendiri dan dapat memanfaatkan alat yang ada untuk keperluan mencari dana. Walaupun demikian,

mereka tidak tidak lepas begitu saja terhadap alat-alat tersebut karena mempunyai alat cadangan.

d. Bantuan Pemerintah Kota

Sumber dana yang berasal dari bantuan pemerintah kota diambilkan dari dana untuk organisasi sosial yang telah ditetapkan dalam anggaran belanja daerah (APBD).

Dilihat dari banyak organisasi sosial yang ada dan juga sama-sama memerlukan dana dari pemerintah kota, menyebabkan dana yang berasal dari pemerintah kota tidak dapat dijadikan andalan pendanaan didalam pengelolaan unit-unit BPK. Untuk itu, unit BPK mandiri berusaha secara swadaya untuk mencari pendanaan alternatif didalam membiayai operasional dan pemeliharaan, serta melakukan pengembangan unit BPK dengan jalan mencari sponsor dan donatur baik dari warga maupun pihak lain.

#### 2.4.4 Operasional Unit BPK

Kegiatan operasional unit BPK yang dikelola oleh masyarakat tidak terlepas hubungannya dengan peran serta masyarakat sebagaimana telah dijelaskan pada sistim pelayanan yang diberikan ( pelayanan setempat ).

Keterlibatan masyarakat setempat didalam penanggulangan bencana kebakaran terbentuk karena kondisi lingkungan baik kondisi lingkungan fisik maupun kondisi sosial - ekonomi.

Peran serta masyarakat didalam penanggulangan kebakaran dapat berupa :

a. Peringatan dini :

Pemberitahuan bila terjadi musibah kebakaran pada suatu wilayah, dengan segera masyarakat yang mengetahui dan melihat memberitahukan dengan cara :

- Pesan berantai ( "*Gethok tular*" bahasa Jawa)
- Membunyikan kentongan/tiang listrik /telepon

- Telepon/radio pemancar 2 meter band / all band, dll
- b. Penanggulangan awal/dini  
Penanggulangan awal dimaksud adalah memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran secara bersama-sama sebelum alat pemadam ( unit BPK ) datang memberikan bantuan. Kebersamaan masyarakat kota didalam menanggulangi bencana kebakaran lebih ditekankan pada mengurangi penyebaran dan menghambat laju penjaran api.
- c. Peran serta anggota BPK  
Anggota satuan unit BPK sebagian besar memiliki alat komunikasi (radio dua meter band), sehingga bila ada panggilan dari radio induk unit BPK, mereka segera untuk berangkat menuju tempat kejadian sesuai dengan yang disampaikan. Anggota satuan Unit BPK yang tidak piket selalu memonitor kegiatan yang disiarkan induk organisasi mereka pada frekuensi emergensi/darurat. Bagi anggota pemadam kebakaran yang tidak mempunyai radio panggil (HT), ada saluran monitor yang dibuat (alarm) pada setiap rumah anggota, terutama pada malam hari. Peralatan yang dimiliki sebagian besar anggota BPK adalah milik pribadi. Sedangkan peralatan monitor yang ada di setiap rumah anggota dibiayai secara bersama-sama dengan anggota serta masyarakat.

Peran serta masyarakat yang diperlukan didalam penelitian ini, yakni dari pihak masyarakat pengguna pada tahapan evaluasi kegiatan unit BPK yang telah direncanakan/ditetapkan bersama pengurus baik dari RT/RW maupun pengurus unit BPK. Sedangkan para tenaga sukarela akan dilihat dari kerja tim, karena kerja unit BPK perlu adanya kebersamaan didalam melaksanakan tugas pemadaman. Sebab rangkaian kerja mereka saling bersambung mulai dari driver/sopir, mesin pompa, selang dan pemegang stang "*conver*" penyemprot air dan ketua/official. Sehingga peran serta para volunteer lebih besar dan lebih berat resikonya didalam ikut aktif dalam

operasionalisasi unit BPK.

#### 2.4.5 Jangkauan Pelayanan Unit BPK

Kemampuan unit BPK didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran tidak terlepas dari :

- Jarak jangkauan pelayanan
- Kecepatan kendaraan
- Responsible alat komunikasi

Sebagaimana telah ditentukan oleh beberapa peraturan yang menangani masalah kebakaran, pelayanan akan efektif bila unit pemadam kebakaran dapat melayani dengan waktu sampai ketempat kejadian dalam waktu  $\pm 12$  menit setelah diterimanya permintaan pelayanan (ketentuan *IFCAA = International Fire City Association Administration*, 1956:166). Sedangkan waktu yang ditetapkan didalam menanggulangi bahaya kebakaran yang dikeluarkan oleh UU.No.24 Tahun 1985 tentang Perumahan dan Permukiman maksimal 30 menit.

Didalam pelaksanaannya, unit BPK memberikan pelayanan yang utama pada pelayanan setempat dan wilayah sekitarnya selama jangkauan yang ditempuh dapat dilaksanakan dan lebih bersifat bantuan kepada wilayah lainnya (sesuai permintaan pemadaman) bahkan pelayanan permintaan kebakaran dapat melampaui luar wilayah kota Banjarmasin. Kemampuan melayani dari unit BPK Kota Banjarmasin terhadap daerah lain, apabila satuan BPK setempat tidak mampu menanggulangi bencana kebakaran tersebut dan yang lebih prinsip lagi adalah bencana kebakaran yang terjadi bukan tindakan massa/kerusuhan. Hal ini dilakukan untuk penyelamatan anggota satuan pemadam kebakaran dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum masyarakat yang bertikai.

#### 2.4.6 Peralatan Unit Pemadam Kebakaran

Alat untuk memobilisasi yang dimiliki oleh Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang ada di kota Banjarmasin adalah :

1. Alat Pemadam Kebakaran :

- Mobil Box /Jenis FFT = 14 buah
- Portable = 80 buah
- Trailler/gandengan = 80 buah

2. Alat Komunikasi

- Telepon
- Radio pemancar all band / 2 meter band

Peralatan yang berupa mobil bok /FFT/mobile engine dimiliki oleh unit – unit BPK yang mempunyai kemampuan besar, walaupun aset yang dimiliki oleh unit BPK ini adalah milik pemerintah kota Banjarmasin dengan perjanjian untuk O & M dibiayai masing-masing unit BPK yaitu :

- BPK Pemerintah Kota
- BPK Hippindo
- BPK Senandung
- BPK Nasa
- BPK Arjuna

Sedangkan unit BPK yang mempunyai kemampuan yang relatif, baru memiliki peralatan yang portable dan trailer/gandeng. Namun demikian, tidak berarti kemampuan alat-alat yang dimiliki unit-unit BPK yang kecil (portable dan trailer) lebih kecil dari segi efektivitasnya. Terasa akan lebih efektif didalam memberikan pelayanan pemadaman kebakaran, bila satuan mobil yang besar/FFT tidak dapat masuk ke daerah-daerah yang mempunyai aksesibilitas yang sulit ( jalan sempit ) dan tidak dapat dilewati oleh jenis kendaraan/mobil tersebut.

### **BAB III**

## **PARAMETER PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PROBLEMATIKA KEBAKARAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam upaya untuk memahami berbagai kendala yang ada didalam menjawab pertanyaan yang menjadi objek penelitian efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan unit pemadam kebakaran (BPK) mandiri sebagai fungsi pelayanan publik dan menjawab hipotesa yang dibuat berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan adanya suatu metode yang dapat mengukur atau menjawab pertanyaan sesuai dengan cara-cara yang dapat dipercaya validitasnya atau keabsahan dan reliabilitas atau alat yang digunakan bila dipergunakan untuk mengukur suatu gejala pada waktu yang berbeda akan menghasilkan suatu hasil yang sama atau paling tidak mendekati hasil yang sama. Reliabilitas merupakan syarat yang penting untuk menentukan pengaruh variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Sehingga hasil tes yang dilakukan tidak reliable tentu saja tidak akan menghasilkan validitas yang baik ( Nasution,S 2000; 77 ).

Untuk mengukur tingkat efektivitas peran serta masyarakat diperlukan beberapa variabel atau parameter yang berkaitan dengan penelitian tersebut, sehingga variabel yang diukur betul-betul dapat mewakili apa yang diukur. Disamping itu, perlu adanya batasan-batasan dalam melakukan penelitian dengan maksud menghindari terjadinya bias serta pengukuran yang tidak perlu atau mubazir.

Adapun unsur-unsur yang diteliti didalam penelitian ini adalah unsur keruangan kota, probelamtika kebakaran, organisasi/lembaga sosial yang menangani kebakaran, aspek peran serta masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta dan efektivitas didalam pengelolaan pemadam kebakaran yang dikelola oleh masyarakat. Skala pengukuran juga mengacu kepada literatur-literatur yang ada, bila tidak ada dicari

padanannya dengan cara menanyakan kepada ahli sesuai dengan kondisi lapangan dan menguji kesahihannya.

## **3.2 Struktur Ruang Kota**

### **3.2.1 Teori Perkembangan Kota**

Banyak sekali pandangan orang mengenai arti sebuah kota, namun dalam hal ini akan diuraikan mengenai pengertian perkembangan kota yang sekiranya mampu mewakili dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

Ditinjau dari segi geografi ( Sumaatmadja, 1988:34 ), kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak bersifat heterogen dan materlistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Pemahaman mengenai pengertian kota juga dapat ditinjau dari segi analisis komunitasnya ( Mumford, 1962:227 ). Untuk menjelaskan kajian analisis komunitas kota ditinjau dari segi sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kondisi ekonomi menentukan jenis kegiatan, bangunan gedung dan bangunan-bangunan lainnya yang terbangun dan dapat terpelihara dengan baik. Unsur-unsur fisik tersebut selanjutnya mempengaruhi kepuasan sosial dan daya tarik komunitas terhadap usaha-usaha produktif dan investasi ekonomi.

Komunitas secara fisik di daerah kota dapat dilihat dari area-area terbangun diperkotaan yang terletak saling berdekatan, meluas dari pusatnya hingga kedaerah pinggiran. Secara fisik, kota dapat dilihat dengan adanya bangunan diatasnya dan struktur bangunan bukan gedung. Dengan adanya perkembangan penduduk dan aktivitasnya (ekonomi dan sosial) maka suatu kota akan berkembang. Faktor perkembangan kota dapat digolongkan dalam tiga hal (Sumaatmadja, 1988:56 ) yaitu :



1. Faktor yang merupakan modal dasar kota.
2. Faktor penunjang yang merupakan fungsi primer dan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kegiatan industri dan jasa komersial yang merupakan sumber tenaga kerja bagi penduduk kota dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam wilayah sekitarnya, serta faktor migrasi.
3. Faktor penunjang yang merupakan fungsi sekunder dan merupakan faktor pembentuk struktur internal kota. Masing-masing faktor terdiri dari unsur-unsur prasarana kota, lingkungan perumahan, fasilitas pelayanan sosial dan tenaga kerja.

Wujud perkembangan kota dapat terlihat dengan struktur internal kota yang terbentuk. Struktur internal kota berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Kota secara sosial terkait dengan tujuan awal dari terbentuknya, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup penduduknya. Sedangkan secara ekonomi kota terkait dengan fungsi dasar kota untuk mendukung penduduknya dan berlangsungnya kota itu sendiri.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan perkotaan (sosial-ekonomi) juga merupakan salah satu petunjuk untuk menjelaskan hubungan pertumbuhan kota dengan peningkatan kebutuhan fasilitas. Perkembangan kegiatan perkotaan dalam hubungannya dengan peningkatan kebutuhan fasilitas terlihat pada kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk kota tersebut. Biasanya kebutuhan kota meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan bergerak secara linear.

Peningkatan aktivitas di wilayah kota akan membuat kota semakin penuh sesak oleh bangunan-bangunan yang merupakan wadah dari aktivitas kota tersebut. Semakin banyak bangunan-bangunan dan gedung-gedung yang dibangun maka semakin tinggi tingkat bahaya kebakaran yang akan ditimbulkan (Marchant, 1972:102 ).

Kerapatan bangunan dan kondisi fisik rumah sangat berpengaruh terhadap kondisi kebakaran. Kerapatan bangunan yang tinggi pada suatu wilayah akan

menyebabkan sifat penjaralan api (kebakaran) menjadi tinggi, sehingga jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan juga akan menjadi besar. Jadi, wilayah seperti ini jelas membutuhkan jumlah fasilitas pemadam kebakaran. Dominasi bangunan rumah berbeda antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap kerawanan bahaya kebakaran.

Selain bangunan rumah yang berkembang diperkotaan, perkembangan industri dan kualitas bangunan industri, perdagangan dan bangunan umum akan berkembang pula. Berkembangnya kegiatan industri dapat mempengaruhi wajah kota, dalam hal ini kebutuhan akan fasilitas pelayanan akan bertambah, khususnya fasilitas pemadam kebakaran. Jenis kegiatan ini merupakan yang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran.

Penyebaran kegiatan industri di perkotaan biasanya terletak disepanjang jalan utama dan dibagian lain terdapat didaerah pinggiran kota. Menurut pengalaman di negara maju kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan industri terutama industri tekstil dan kimia menduduki peringkat yang paling tinggi. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pos pemadam kebakaran didaerah industri sangat diperlukan.

Perkembangan sektor perdagangan suatu kota, untuk perdagangan formal secara fisik dapat dilihat dengan berkembangnya bangunan perdagangan atau pertokoan baik secara horisontal maupun vertikal seperti pusat-pusat perbelanjaan, pasar modern, toko serba ada dan kantor-kantor dagang. Perkembangan sektor perdagangan informal dapat dilihat pada perkembangan pasar pagi dan sore hari, pasar loak, tempat penjualan umum dan perdagangan kaki lima ( Geertz, 1977: 23 ).

Bagian-bagian kota di mana bangunan-bangunan perdagangan berada, terutama yang berintensitas tinggi sangat membutuhkan pelayanan yang memadai dari fasilitas pemadam kebakaran. Hal ini, disebabkan seringnya bangunan perdagangan terbakar dan kerugian yang dapat ditimbulkan sangat besar.

Pengalaman di kota-kota besar menunjukkan, kejadian kebakaran pada bangunan perdagangan adalah sangat tinggi dan kerugian harta benda yang

ditimbulkannya juga sangat besar. Percobaan yang pernah dilakukan oleh negara-negara maju pada bangunan perdagangan atau pusat perbelanjaan bahwa kecepatan penjaran kebakaran berkisar antara 70-200 meter dalam 7 menit. Kecepatan ini merupakan kecepatan penjaran yang tinggi, oleh sebab itu apabila bangunannya tidak dilengkapi oleh fasilitas pemadam kebakaran akan menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda yang besar (IFCAA = *International Fire City Association Administration*, 1956:160). Kondisi seperti inilah menyebabkan bangunan perdagangan atau pusat perbelanjaan dipandang sebagai bangunan yang rawan bahaya atau bangunan dengan tingkat bahaya tinggi.

Bangunan-bangunan umum yang dimaksud disini adalah bangunan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan umum (kecuali bangunan perdagangan) seperti: gedung pemerintahan, hotel, bank, asuransi, langgar, musholla dan sekolah. Kerawanan bahaya kebakaran bangunan-bangunan umum ini sangat tergantung pada intensitas kegiatan dan pengunjungnya. Penyebaran bangunan umum ini hampir terdapat di setiap bagian kota (polanya menyebar keseluruh kota), tetapi ada juga yang berkelompok dipusat kota seperti bank, bioskop. Untuk sekolah atau perguruan tinggi kerawannya sangat tergantung pada jenis kegiatan yang ada di dalamnya.

Kejadian kebakaran bangunan umum di kota-kota besar Indonesia ternyata tidak banyak terjadi, hal ini disebabkan oleh sistem pencegahan yang memadai serta manusia yang bekerja dalam bangunan tersebut cukup menyadari bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat. Untuk itu penyediaan fasilitas pemadam kebakaran pada fasilitas ini juga menjadi penting.

Dengan mengetahui perkembangan kota dan segala aktivitas yang didalamnya, maka kebutuhan akan pemadam kebakaran akan terakomodasi dengan mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Di lihat dari kondisi pembiayaan yang dimiliki pemerintah kota terbatas, para pemilik bangunan khususnya pemukiman perumahan dan daerah komersial dengan swadaya,

mewujudkan unit pemadam kebakaran yang mulai perancangan, pelaksanaan dan operasionalisasi yang melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga kepemilikan dari unit pemadam kebakaran tersebut dari operasional sampai perawatannya dapat berlanjut secara mandiri.

Masalah utama dari perkembangan suatu kota adalah semakin membesarnya kebutuhan fasilitas umum, sedangkan dilain pihak memperlihatkan adanya penurunan kemampuan dalam pengadaanya. Kota-kota di Indonesia terdapat proses penurunan tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas, hal ini juga terjadi pada kota-kota negara berkembang lainnya.

Pengadaan fasilitas-fasilitas umum tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah kota. Bukan saja dalam pengadaannya, pemerintah kota berkewajiban juga dalam masalah efisiensi dan pemerataan pelayanan bagi setiap warga kota. Efisiensi dan pemerataan pelayanan dapat berarti penyediaan fasilitas harus dalam jumlah yang memadai serta tersebar secara merata dimana penduduk berada. Pengadaan fasilitas umum dalam jumlah yang banyak akan menjadikan beban yang berat bagi pemerintah kota. Sebab hal ini karena kemampuan pengadaan fasilitas umum yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk membangun fasilitas pelayanan yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui suatu bangunan berbahaya atau tidak, maka digunakan petunjuk sebagai berikut :

- Bangunan-bangunan yang menyimpan benda-benda, peralatan atau perlengkapan yang mudah terbakar, maka bangunan-bangunan tersebut dikelompokkan sebagai bangunan yang sangat berbahaya ( Marchant, 1972:102 )
- Besarnya premi asuransi, semakin besar premi asuransi suatu bangunan, maka bangunan tersebut dipandang sangat berbahaya, demikian pula sebaliknya (Council of Fire Insurance Companies Indonesia, 1965 )

Untuk bangunan industri, besarnya premi asuransi tergantung kepada proses produksi dan jenis barang hasil produksi, sedangkan bangunan umum dan perdagangan didasarkan kepada intensitas kegiatan dan pengunjungnya.

Disamping pula, seringkali bangunan perdagangan dan pertokoan mengalami kebakaran disebabkan oleh :

- Keseimbangan antara daya tampung dan jumlah barang dagangan sering tidak diperhatikan oleh pihak pedagang sehingga penempatan barang – barang dagangan kurang memperhatikan bahaya timbulnya kebakaran. Sering juga pihak pedagang tidak menghindarkan benda-benda berbahaya seperti kompor, lampu minyak dan listrik, sebagai akibat ingin mencari mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.
- Sebagian besar barang-barang yang dijual dipasar, toko atau pusat-pusat perbelanjaan merupakan bahan yang mudah terbakar.
- Tidak adanya keseimbangan antara intensitas pengunjung dengan pihak penjual sehingga pihak penjual sukar mengawasi tingkah laku pihak pengunjung yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran seperti membuang puntung rokok dan lain – lain.
- Penggunaan bangunan dengan kegiatan yang bermacam-macam seperti ruko. Pencampuran kegiatan tersebut menyebabkan penempatan barang dagangan sering ditempatkan pada tempat sumber api.
- Sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang belum baik atau tidak ada sama sekali.

Selain kondisi tersebut diatas, kondisi lingkungan ikut berpengaruh, terutama kondisi fisik bangunan yaitu jenis konstruksi bangunan gedung baik untuk tempat tinggal, gedung umum maupun industri. Kerapatan bangunan dan jenis konstruksi bangunan pada setiap tempat/daerah/kelurahan pasti akan berbeda sangat berpengaruh pada sifat penyaluran api.

Pada daerah yang didominasi oleh bangunan temporer (non permanen) sering dipandang sebagai daerah yang sangat rawan bahaya kebakaran, hal ini disebabkan oleh :

- Kondisi bahan bangunan yang mudah terbakar dan konstruksinya yang buruk akan menyebabkan sifat penjarannya api lebih cepat dan sebagai akibatnya adalah jumlah manusia yang dapat terkurung serta kehilangan tempat tinggal akan lebih besar.
- Tata letak bangunan pada daerah ini tidak memberi kemudahan bergerak bagi pasukan pemadam kebakaran untuk memberikan pelayanan, hal ini disebabkan jalan – jalan masuk sangat kecil.
- Sistem pencegahan yang kurang memadai serta seringnya penggunaan alat-alat yang berbahaya seperti kompor, lampu minyak sebagai akibat dari kemampuan ekonomi mereka yang terbatas.

### **3.2.2 Lokasi Pos Pemadam Kebakaran**

Posko pemadam kebakaran adalah tempat dimana, terdapat unit pemadam kebakaran yang didalamnya terdapat perlengkapan, peralatan, kendaraan pemadam kebakaran dan pasukan pemadam pemadam kebakaran. Peranan posko pemadam kebakaran adalah tempat untuk menerima dan mengelola informasi yang diterima tentang kejadian kebakaran yang diinformasikan masyarakat dan tempat untuk memberikan bantuan bila ada setiap permintaan pemadaman kebakaran.

Posko Pemadam Kebakaran adalah merupakan tempat memberikan pelayanan keadaan darurat, sudah pasti diperlukan waktu tanggap setiap ada permintaan kebakaran akan menjadi penting. Tempat atau lokasi posko pemadam kebakaran akan menjadi

strategis, bila tempat tersebut mempunyai waktu tanggap yang cepat dan singkat untuk menanggulangi pemadaman kebakaran ( Rushton, 1979:18).

Posko pemadam kebakaran mempunyai hubungan yang erat dengan aksesibilitas suatu lokasi. Hal ini, menyangkut pada kecepatan waktu tanggap dan kelancaran mobilitas kendaraan pemadam kebakaran dari posko ke tempat kejadian kebakaran. Jadi, kecepatan pasukan pemadam kebakaran sangat tergantung pada kepada aksesibilitas yang baik, sehingga dapat menghemat waktu tempuh kendaraan pemadam kebakaran.

Persoalan posko ini sangat bergantung kepada suatu jaringan jalan dan akses, sehingga persoalan lokasi pada suatu jaringan sangat bergantung kepada karakteristiknya yakni : 1) Median suatu jaringan terletak pada simpul jaringan ; 2) Ukuran jarak adalah lintasan terpendek antara simpul pada jaringan tersebut.

Sehingga lokasi posko pemadam kebakaran adalah merupakan waktu terpendek yang dapat ditempuh kendaraan pemadam kebakaran setelah mendapat informasi permintaan pelayanan pemadam yang dapat disebut juga sebagai lokasi pusat fasilitas (Hakimi ,1979 ; 256). Konsep Repositionung yang pernah dirilis oleh S.J Barstein dan W.G Mellon mengenai pelayanan suatu tempat fasilitas, bila dikaitkan dengan posko pemadam kebakaran adalah mempunyai radius pelayanan yang sama sesuai dengan kondisi dan sifat kebakaran tiap daerah. Jarak yang dapat ditempuh relatif singkat atau waktu tempuh yang terpendek dari lokasi ke lokasi permintaan pemadaman.

### **3.3 Lingkup Peran Serta Masyarakat**

#### **3.3.1 Pengertian Peran Serta / Partisipasi Masyarakat**

Sebelum memasuki pembahasan tentang peran serta masyarakat, terlebih dahulu kita mengetahui seluk beluk masyarakat yang hidup di daerah perkotaan, mengingat masyarakat yang ada di perkotaan kurang lebih 60% dari jumlah penduduk suatu kota. Menurut Daldjoeni (1997) didalam menilai masyarakat perkotaan adalah masyarakat kota mempunyai budaya dan peradaban yang tinggi dibanding dengan masyarakat pedesaan. Fasilitas kehidupan yang ada di daerah perkotaan sebagai suatu tarap kekotaan yang dapat membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada lahan. Namun dengan kemajuan teknologi menyebabkan jurang antara desa dan kota dapat diperkecil. Informasi yang diperoleh dari berita kegiatan sampai informasi komersial yang dapat mengembangkan daerah-daerah agropolitan baru. Disamping itu, budaya dikota memaksa masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar wilayahnya.

Tumbuh dan berkembangnya kemajemukan masyarakat perkotaan adalah secara alami menurut kebutuhan dan kepentingan masing-masing didalam menjalani hiruk-pikuknya kehidupan di perkotaan. Dimana setiap pemaksaan suatu kebijakan oleh pembuat kebijakan belum tentu dapat diterima setiap individu-individu masyarakat kota secara menyeluruh. Sekalipun dikemas dalam bentuk yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran-pergeseran permasalahan sosial dan ekonomi di dalam tatanan kehidupan sosial di daerah perkotaan dan selalu timbul dalam konteks keruangan.

"Adanya suatu keinginan manusia untuk turut berperan serta atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sangat tinggi, yang merupakan bagian dari kegiatan manusia semenjak mulai diciptakan di bumi, yang lahir karena adanya desakan biologis" dimana ini merupakan suatu hakekat dari manusia yang sejak dilahirkan yaitu hakekat "*zoon politikon*" (Salusu, 1998 ). Karena manusia didalam berperan serta disebabkan



oleh ingin dipandang sebagai milik dari suatu kelompok dan tidak menyendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Di samping itu adanya upaya untuk mempertahankan harga diri, memperoleh otonomi, tanggung jawab serta kekuasaan yang ada pada dirinya.

Bila dikaitkan dengan pembangunan, maka peran serta (Slamet, 1993) yang dimaksud adalah pembangunan yang mandiri, perwakilan mobilitas sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi sosial dan politik, reformasi sosial atau bahkan yang disebut revolusi rakyat. Namun pengertian tersebut belum menyentuh substansi yang sebenarnya dari definisi yang pasti dari peran serta. Dalam hubungannya dengan pembangunan didalam GBHN 1993 mengamanatkan sebagai berikut:

"Bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang."

Jadi jelaslah bahwa GBHN secara eksplisit mengamanatkan bahwa kegiatan masyarakat dan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritua. Peran pemerintah adalah mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang yang kemudian diterjemahkan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat.

Secara harafiah padanan kata "*partisipasi*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah "*peran serta*". Sedangkan UNCHS sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pemukiman merumuskan peran serta sebagai berikut :

"Voluntary involvement of people in making and implementing all decisions directly affecting their lives , and the activities undertaken by low income household with or without outside assistance to improve their living condition" ( UNCHS, 1991 )

Rumusan UNCHS menekankan pada pelibatan aktif /tanpa disuruh untuk mengambil dan melaksanakan keputusan langsung menyangkut kehidupan mereka. Rumusan ini didukung oleh Deepa Narayan (1995) yang merumuskan peran serta sebagai :

"Voluntary process by which people including the disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the decision, that affect them"

Dimana setiap pihak yang terlibat/berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) merupakan bagian dari proses pembangunan. Utama dan yang terpenting dalam peran serta ini adalah hak serta kewenangan masyarakat untuk memutuskan sebagai pelaku utama.

Juga menurut PBB (Slamet, 1993) definisi peran serta adalah keterlibatan aktif dan mempunyai makna dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda.

- a. Didalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.
- b. Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela
- c. Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

Oleh karena itu pelibatan seseorang dalam berperan serta harus dilakukan pada proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya (O&M, evaluasi dan pengelolaan).

Ada tiga alasan utama mengapa peran serta mempunyai sifat yang sangat penting (Conyers, 1994) *Pertama*, peran serta masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan/proyek-proyek akan mengalami kegagalan.

*Kedua*, masyarakat akan percaya bahwa proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibat dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep "*man-centered development*", yaitu pembangunan yang diarahkan kepada perbaikan dan peningkatan nasib dan bukan hanya sekedar hiasan di bibir saja atau sebagai alat pembangunan. Pembangunan yang ditujukan untuk membangun masyarakat bisa mandiri dan pelibatan masyarakat sebaiknya dimulai sejak awal sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan (Siswono, 1991) atau yang dikenal dengan istilah "Community Based Development (CBD)".

Peran serta masyarakat menurut Godschalk (1996), merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan perencana, sedangkan menurut J. Salusu (1998) menjelaskan bahwa peran serta secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan psikologis yang mendasar yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat. Ini menandakan bahwa manusia ingin berada di dalam kelompoknya dan terlibat dalam segala kegiatan yang ada didalam masyarakat dan juga ingin diakui keberadaannya. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, walaupun negara dalam hal ini berperan sangat besar untuk menjamin berhasilnya suatu pembangunan (Kartasasmita, 1997).

Di dalam jaman keterbukaan sekarang ini, pembangunan yang tadinya selalu berasal dari atas sebagai inspiratornya (*top-down planning*) beralih kepol pada kepentingan masyarakat sebagai pemakai dan pengguna, sehingga masyarakat dapat menentukan arah dan kebijakan pembangunan masyarakatnya (*bottom-up planning*) yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Development*).

### **3.3.2 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Pemadam Kebakaran**

#### **3.3.2.1 Peran Serta Masyarakat Pengguna (User)**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri telah banyak membawa perubahan. Pembangunan tersebut lebih banyak pada kemajuan di bidang fisik dan ekonomi. Pembangunan dibidang sosial politik masyarakat hampir tidak tersentuh sama sekali, sehingga timbul kecemburuan yang terpendam jauh dari dalam sanubari mereka, seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu menggerogoti dari dalam.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal yang ada didalam masyarakat sendiri telah ada sejak manusia diciptakan. Hal ini disebabkan oleh karena ingin mempertahankan diri agar tetap hidup dan keberadaannya dalam masyarakat ingin diakui.

Meskipun masalah peran serta masyarakat telah banyak dibicarakan, namun seringkali yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh tingkat peran serta masyarakat diperlukan agar usaha tersebut dapat berhasil dengan baik. Perlu dipikirkan dengan baik, karena pada kenyataannya terdapat berbagai macam dan tingkat peran serta masyarakat yang tidak mudah di klasifikasikan.

Untuk melibatkan keikutsertaan warga masyarakat didalam berperan serta perlu adanya motivasi dan dedikasi yang baik dari setiap warga. Sebagaimana yang diutarakan dalam “ *Teori Maslow* ” antara lain adanya motivasi, keinginan untuk dihargai eksistensinya dan takut tidak diakui keberadaannya. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dari proses perancangan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. Peran serta masyarakat pada lembaga

sosial unit BPK mandiri yang ada dilingkungan pemukiman warga, perlu adanya keterlibatan masyarakat baik pemikiran, tenaga maupun finansial untuk keberlanjutan unit-unit BPK mandiri pada tahap pemanfaatan pembangunan. Keterlibatan peran serta warga masyarakat pengguna didalam mengevaluasi kegiatan unit BPK pada lingkungan pemukiman mereka sebagaimana telah ditetapkan bersama.

Kondisi masyarakat yang merasa khawatir dengan sering terjadinya kebakaran, perlu melindungi dirinya dengan membentuk unit BPK. Oleh karena unit BPK dibentuk dengan swadaya murni masyarakat, untuk keberlanjutan diperlukan adanya partisipasi warga masyarakat khususnya masyarakat pengguna dan tenaga sukarela. Partisipasi warga diharapkan untuk dapat mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit BPK sesuai dengan musyawarah lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut aspek pembiayaan dan adanya kecurigaan terjadi penyimpangandalam pengelolaannya. Untuk lebih meningkatkan peran serta warga didalam mengevaluasi kegiatan unit BPK, tidak terlepas dari suatu proses yakni yang meliputi (Slamet, 1993; 23-25) : 1) Proses menetapkan rencana ; 2) Proses Implementasi/pelaksanaan; 3) Proses penilaian rencana dan implementasi. Pada tahap-tahap tersebut masyarakat mempunyai kewenangan untuk menyusun, menetapkan tujuan, target, biaya, sumber pendanaan dan mengevaluasi/menilai program-program yang telah ditetapkan. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh peran serta masyarakat didalam melibatkan diri pada tiap-tiap tahap tersebut dengan melihat beberapa parameter :

- Kehadiran didalam rapat
- Usulan yang disampaikan ( kritik, saran, dan pemantauan )
- Sumbangan yang diberikan ( tenaga, pikiran, dan finansial )

Untuk parameter lain ditiadakan, sebagaimana yang diutarakan Stuart Chapin (Skala Chapin) mengenai peran serta masyarakat didalam proses pembangunan. Dengan alasan : 1) Tidak selalu menjadi anggota/pengurus untuk ikut berperan serta; 2) Dalam rangka pembelajaran demokrasi bagi warga masyarakat ; 3) Mencari alternatif tentang efektivitas peran serta warga masyarakat dari sisi lainnya.

Sehingga efektivitas peran serta warga masyarakat pada pengelolaan unit BPK mandiri dalam operasionalisasi unit tersebut, masih dalam koredor proses pembangunan yang meliputi rencana, pelaksanaan dan evaluasi. Relevansi kuisioner yang dijadikan acuan tetap mengacu pada validitas dan reliabilitas dari item-item yang ada. Hal ini dalam upaya masyarakat mempunyai model peran serta yang “ *self help* “ dalam kontek pembangunan komunitas dalam pengadaan sarana dan prasarana lingkungan masyarakat.

#### **3.3.2.2 Peran Serta Tenaga Sukarela ( Volunter )**

Keterlibatan tenaga kerja sukarela didalam pengelolaan unit pemadam kebakaran (BPK) adalah berupa suatu kerja tim. Tanpa adanya kerja tim yang baik, sebaik apapun unit BPK yang ada apabila peran serta tenaga sukarela didalam kerja tim tidak baik, tidak akan menghasilkan efektivitas kerja tim yang memuaskan.

Keterlibatan secara aktif para tenaga kerja sukarela terutama didalam mengoperasikan unit BPK untuk memberikan pelayanan setiap ada permintaan pemadaman kebakaran, baik untuk wilayah komunitas mereka sendiri maupun pelayanan kepada wilayah lain. Derajat kesukarelaan mereka, merupakan tingkatan peran serta didalam memberikan bantuan pelayanan yang sangat mulia, bahkan keselamatan mereka dapat terancam akibat memberikan pelayanan pemadam

kebakaran. Sehingga resiko yang dihadapi waktu menjalankan tugas sangat besar walaupun hal tersebut disadari oleh para tenaga sukarela.

Menjadi bagian dari suatu tim dapat berarti pula turut bertanggung jawab atas berbagai tujuan, strategi dan proses tim tersebut. Walaupun setiap anggota mempunyai tanggung jawab masing-masing berdasarkan tingkatan peran dan tanggung jawabnya, tetapi didalam menetapkan tujuan, strategi, proses dan hasil yang ingin dicapai oleh tim semata-mata bukanlah tanggung jawab ketua tim. Sebaliknya didalam suatu tim kerja yang efektif, setiap anggota harus peduli dan peka terhadap berfungsinya tim itu sendiri.

Tobby Wall ( Michael West, 1999; 37 ), mengusulkan adanya tiga unsur dasar untuk berpartisipasi didalam tim, yang disebut juga sebagai “ *Tiga I* “ yakni *Interactoin, Informination sharing, dan Influence over decision-making* ( interaksi, saling berbagi informasi, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan ).

Sehingga didalam peran serta tenaga suka rela pada kerja tim, pengukurannya dilakukan dengan mencoba menganalisis dari beberapa “*entri-point*” yang telah ditetapkan didalam menjalankan unit BPK mandiri untuk mendapatkan hasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Hackman dan para koleganya dari Universitas Harvard menyimpulkan enam bidang mendasar yang dibutuhkan tim dalam organisasinya yaitu : 1) Target, 2) Sumber, 3) Informasi, 4) Edukasi, 5) Umpan balik dan 6) Bimbingan teknik/proses melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, tim unit BPK didalam menjalankan peran serta perlu adanya kesepahaman mengenai apa yang telah ditetapkan dalam tujuan-tujuan. Hal ini perlu kejelasan tentang visi dan misi tim tersebut, agar didalam pelaksanaan tidak ada para anggota tim lalai didalam melaksanakan tugas serta kegiatan monitoring terhadap gaya kerja yang menjadi semacam kode etiknya para anggota pemadam kebakaran didalam menjalankan tugas.

Dengan demikian perlu adanya komunikasi dan interaksi agar dapat menyamakan persepsi dari seluruh anggota relawan didalam menjalankan tugasnya.

Adapun tahapan yang menjadikan ukuran efektivitas kerja tim dapat dilihat dari tahapan-tahapan komunikasi dan inovasi, tahapan menetapkan tujuan serta pada tahapan menetapkan gaya kerja dari tim.

### 3.3.3 Tingkatan Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Sherry Arnstein di Amerika Serikat (AS) diperkirakan ada 150 tingkatan peran serta masyarakat yang seringkali sulit dibedakan secara tajam dan murni. Untuk mengurangi kerancuan dan kekeliruan didalam menganalisisnya, oleh Sherry Arnstein disederhanakan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. (Dikutip dari Bambang P, 1999).

Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Manipulation / manipulasi

Peran serta masyarakat pada tingkat ini, yang sebenarnya tidak ada dan tidak tulus. Hanya untuk kepentingan publikasi bagi para pengusaha.

#### 2. Therapy / penyembuhan

Istilah ini hanya untuk kelompok penyembuhan yang berkedok peran serta masyarakat pada perencanaan dan mereka tidak mempunyai peran sebagai pengambil keputusan, hanya sebatas untuk mengubah pola pikir saja.

#### 3. Informing / pemberian informasi

Masyarakat hanya diberi kesempatan untuk mendengarkan tidak pada posisi untuk menentukan pilihan yang dapat mempengaruhi dari rencana / program yang diusulkan.

#### 4. Consultation / Konsultasi

Metode yang digunakan pada tahap ini sering menggunakan *attitude Surveys* atau survei tentang arah pikir masyarakat, *neighbourhood meeting* atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

#### 5 Placation / Perujukan



Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat mempunyai kemampuan untuk dijadikan anggota badan-badan kerjasama pengembangan kelompok-kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Ide-ide dari masyarakat pada tingkat bawah dapat dikemukakan, walaupun pada kenyataannya sering didominasi oleh masyarakat yang lebih tinggi. Ini menyebabkan akses orang pada tingkat bawah lebih kecil dan rendah diri.

#### 6 Partnership / kemitraan

Dilakukan kesepakatan bersama, dimana kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan dan pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dan adanya kesepakatan tentang peraturan dasar tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak manapun.

#### 7 Delegated Power / Pelimpahan kekuasaan

Pada tingkat ini masyarakat diberikan pelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Pada tahap ini masyarakat mempunyai kewenangan untuk memperhitungkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul. Pihak penguasa dalam hal ini pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak memberikan tekanan-tekanan dari atas.

#### 8 Citizen Control / kontrol masyarakat

Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan mereka. Mereka mempunyai kewenangan

penuh dibidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan perundingan dengan pihak lain yang hendak melakukan perubahan.

Menurut Arnstein, kedelapan tipologi tersebut diatas secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu :

- 1 Tidak ada peran serta atau *non participation* , yang meliputi peran serta pada tingkat *manipulation* dan *therapy*.
- 2 Peran serta dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan yang diberikan oleh *degress of tokenism*, yang meliputi peran serta pada tingkat *informing*, *consultation* dan *placation*.
- 3 Peran serta masyakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan *atau degress of citizen power*, yang meliputi peran serta pada tingkat *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*.

Meskipun tipologi tersebut diatas berdasarkan kasus-kasus peremajaan kota, program anti kemiskinan dan kota model di Amerika Serikat (AS). Dapat pula digunakan sebagai gambaran atau pada contoh-contoh kegiatan lainnya ( Arnstein, 1969).

**GAMBAR 3 . 1 :**

**EIGHT RUNGS ON THE LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION**

8	Citizen Control	Degree of citizen power
7	Delegated Power	
6	Partnership	
5	Placation	Degree of Tokenism
4	Consultation	
3	Informing	
2	Therapy	Non Participation
1	Manipulation	

Sumber : Sherry Arnstein , 1995

Pengamatan suatu proses pembangunan juga menggunakan tipologi ini, dapat memberikan penjelasan tentang seberapa jauh pengikut sertaan masyarakat didalam proses pembangunan secara keseluruhan dan dapat dijadikan sumber legitimasi alternatif. Sedangkan dalam masyarakat mempunyai penilaian tersendiri tentang peran serta masyarakat yang tepat di lingkungan mereka.

Sistem pemerintahan yang memungkinkan tersalurnya peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah sistem pemerintahan yang demokrasi, khususnya pemerintahan yang menganut sistem demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif menuntut adanya peran serta masyarakat tidak saja melalui wakil-wakil yang telah dipilih, tetapi juga lewat keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Kaunda dalam Conyers, 1991).

Menurut Arnstein (1995), peran serta yang sangat berarti adalah kekuasaan berada pada masyarakat, yaitu strategi dimana masyarakat yang tidak mampu dapat membawa reformasi sosial yang dapat berbagi manfaat dengan masyarakat yang mampu. Pemerintahan demokrasi yang partisipatif menyebabkan kekuasaan/kekuatan warganegara/masyarakat dapat dilihat peran sertanya terutama pada kontrol masyarakat, pelimpahan kekuasaan dan kemitraan.

### **3.3.4 Motivasi Ikut Berperan serta**

Berdasarkan teori dari Maslow dan Mc Clelland (Adam I, 2000), tentang teori hierarki kebutuhan (*hierarchy of need*) atau lebih dikenal dengan *teori motivasi* (teori Maslow) yang lebih cenderung memperhatikan pada psikologis yang sehat dan membangun teori dengan cara deduktif. Berdasarkan teori tersebut Maslow mengasumsikan :

- a. People are wanting animal their desires are never completely satisfied (Manusia adalah makhluk yang selalu beringinan. Keinginan mereka selalu tidak pernah terpenuhi seluruhnya).
- b. A Satisfied need is not a motivator of human behavior  
(Kebutuhan/keinginan yang sudah terpenuhi tidak akan menjadi pendorong lagi).
- c. Human needs are arranged in a hierarchy of importance  
(Kebutuhan manusia tersusun menurut hirarki tingkat pentingnya).

Sedangkan David Mc Clelland berpendapat orang ikut berperan serta karena ingin berprestasi, dia berasumsi bahwa semua kebutuhan adalah karena dipelajari, sehingga kepribadian juga akan berubah kalau seseorang belajar (Adam I, 2000).

Jadi orang yang memahami lingkungan dan berpengalaman akan lebih mudah untuk bermotivasi untuk berprestasi didalam menumbuh kembangkan peran sertanya didalam membangun.

### **3.3.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelibatan Peran Serta Masyarakat**

Didalam pelibatan masyarakat untuk ikut berperan serta, banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan/pengetahuan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian (*faktor internal*). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar (*faktor eksternal*) adalah faktor lingkungan sekitar dapat berupa kelembagaan dan keruangan.

Karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan peran, kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan (*perbedaan gender*) menyebabkan peran serta di berikan seseorang akan berbeda-beda pula. Karena perbedaan tersebut, menimbulkan pula perbedaan antara hak dan kewajiban yang diperankan.

Usia penduduk juga akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat dimana tingkat perbedaan usia menyebabkan adanya kedudukan dan derajat. Terbentuknya perbedaan penduduk dalam usia, terlihat dengan struktur penduduk menurut usia, sehingga menimbulkan senioritas dalam struktur tersebut serta menyebabkan adanya kaum tua dan kaum muda. Dan didalam hal tertentu juga terjadi perbedaan, misalnya didalam menyalurkan dan memberikan pendapat dalam mengambil/memberikan keputusan (Soedarno, dkk, 1992). Karena didalam usia terlihat kematangan dan pengamalan serta pengalaman apabila mengambil dan memberikan keputusan.

Sedangkan faktor pengetahuan masyarakat didalam memberikan peran sertanya, merupakan salah satu partisipan dalam pembangunan partisipatif (Litwin, 1986). Faktor yang mempengaruhi pada tingkat pengetahuan adalah pendekatan yang dimiliki, semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentu mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan mengetahui pula bentuk dan tata cara peran serta yang diberikan masyarakat.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pada tingkat peran serta masyarakat ini adalah tingkat pendapatan/penghasilan penduduk. Karena penduduk yang merasa lebih kaya kebanyakan jarang ikut berpartisipasi didalam kegiatan kerjabakti, hal ini disebabkan mereka bisa membayar orang untuk menggantikan posisinya didalam kegiatan pembangunan yang partisipatif. Sedangkan penduduk yang termasuk berpendapatan rendah (low income) melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa melihat adanya kontribusi uang dan tingkat keikhlasan dan ketulusannya lebih tinggi daripada penduduk yang berpenghasilan tinggi.

Bahkan mata pencaharian penduduk dapat mempengaruhi keikutsertaan didalam pembangunan, sebab warga sudah disibukkan dengan kegiatan sehari-hari dan kurang antusias mereka untuk mengikuti pertemuan, diskusi maupun seminar.

Sedangkan faktor eksternal kami masukan faktor lama menetap dan kepemilikan rumah dari warga masyarakat maupun dari tenaga sukarela. Karena kepemilikan rumah pribadi dapat menjadikan warga didalam memberikan peran sertanya bisa lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki rumah sendiri. Mereka merasa ikut berperan serta untuk dapat menjaga/perlindungan dari bahaya kebakaran. Kepedulian warga juga dapat dipengaruhi oleh lama tinggal/menetap disuatu kawasan untuk ikut berperan serta.

### **3.4 Tingkat Efektivitas Peran Serta Masyarakat**

#### **3.4.1. Batasan Efektivitas**

Menurut Barnard (Gypson, 1996), bahwa efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut Feter F. Drucker (1974) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Bahkan menurut Harvey & Blanchard (1996), bahwa efektivitas bila dihubungkan dengan konteks manajemen adalah tercapainya suatu tujuan yang konsisten dengan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pada tingkatan yang lebih bawah dan berlaku juga bahwa efektivitas tampak seperti kontinum yang beranjak sangat efektif sampai kepada sangat tidak efektif.

Apabila upaya seseorang pemimpin untuk mengarahkan pada tanggapan yang berhasil guna, sedangkan bawahannya / pegawai melakukan pekerjaan itu dikarenakan dia ingin melakukannya dan merasa ada hasil yang diperolehnya dengan konsisten, maka tujuan yang telah dicapai tersebut dapat dikatakan berhasil dan efektif.

Kalau dilihat dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut diatas, maka pengertian efektivitas dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang tersedia.*

Dengan demikian, suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila sumber daya yang digunakan (sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya), dapat seimbang dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Jadi sasaran yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (input sama dengan output) atau lebih dikenal dengan *teori keseimbangan*

#### **3.4.2 Tingkat Efektivitas Peran Serta Masyarakat**

Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kelompok/team, perlu adanya pengukuran dan menurut Etzioni (1980) indikator-indikator pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Orientasi terhadap lingkungan
- b. Alokasi sumber daya secara optimum
- c. Realisasi tujuan

Lebih lanjut dijelaskan oleh Argyris (1980) yang menjadi indikator tingkat efektivitas kelompok / organisasi adalah :

- a. Adaptasi terhadap lingkungan luar kelompok
- b. Pengawasan intern kelompok
- c. Pencapaian tujuan

Jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan dan peluang serta haknya, untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan perkotaan, pembangunan diperkirakan akan berlangsung efektif dan efisien, jadi tujuan dari pembangunan itu dapat benar-benar tercapai misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada sumber daya finansial,

bahan, pengetahuan dan ketrampilan) yang tersia-sia atau bahkan tidak (kurang) dimanfaatkan oleh pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat yang demikian akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama antara masyarakat. Masyarakat sendiri akan berusaha meningkatkan partisipasinya . swadayanya, yang pada akhirnya akan mengurangi beban kebutuhan sumber daya pemerintah.

Disisi lain segi efektivitas dan efisiensi peran serta masyarakat perlu juga diwaspadai, dimana peran serta masyarakat jangan tercipta pandangan dari sumbangan sumber daya yang bersifat nyata dan terukur (uang, tanah dan tenaga). Akan tetapi, peran serta masyarakat bisa juga terlihat dari sumbangan sumber daya yang tidak terlihat/tidak tampak yaitu pengetahuan (sumber daya, kebutuhan, prioritas dan daerah masyarakat tersebut), kreativitas , ketrampilan dan organisasi.

Dengan demikian, agar masyarakat diberi kesempatan untuk menyumbangkan sumber daya yang ada baik tampak maupun tidak tampak. Agar didalam pelaksanaannya tidak kehilangan motivasi, kemauan dan kreativitas serta keantusiasan mereka didalam mewujudkan peran sertanya.

Bahkan seperti dijelaskan oleh Arnstein (1995) bahwa tingkat peran serta dalam pembangunan akan efektif dan efisien bila berada pada jenjang *degrees of citizen Power*, dimana masyarakat memiliki kekuatan mayoritas didalam pengambilan keputusan.

### **3.5 Rangkuman Kajian Literatur**

Temuan yang didapat dalam kajian literatur, yang dapat menjadi bahan dasar acuan studi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **a. Perkembangan Kota**

Adanya perkembangan penduduk dan aktivitasnya (ekonomi dan sosial) maka kota akan berkembang, sehingga dengan berkembangnya penduduk maka permintaan



akan sarana dan prasarana akan meningkat baik untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya penduduk dapat menyebabkan kawasan-kawasan yang berubah fungsi semula terutama pada kawasan dekat pusat kegiatan ekonomi, pemerintah yang dapat menimbulkan penumpukan kegiatan manusia, dilain pihak terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah. Hal ini menjadikan daerah-daerah padat penduduk dan bangunan yang rawan terhadap bahaya kebakaran.

Untuk itu perlu adanya posko-posko pemadam kebakaran yang dapat melayani setiap ada permintaan pemadaman. Penempatan posko pemadam kebakaran tergantung pencapaian pada waktu tanggap yang cepat aksesibilitas yang baik setiap adanya permintaan pelayanan pemadaman. Penempatan posko pemadam kebakaran yang tidak teratur juga dapat menjadikan permasalahan tersendiri.

**b. Kontek Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Unit BPK.**

Perlu adanya pelibatan aktif peran serta masyarakat didalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan. Kontek peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit pemadam kebakaran (BPK) mandiri pelibatan warga baik warga masyarakat maupun tenaga sukarela sangat diperlukan sekali. Pelibatan masyarakat dalam peran sertanya dapat berupa sumbangan tenaga, finansial, pengetahuan dan pemikiran baik secara langsung maupun tidak serta adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelibatan warga masyarakat yakni faktor ekonomi, sosial dan politik baik secara internal maupun eksternal.

**c. Parameter / Tolok Ukur Peran serta Masyarakat**

Untuk mengukur tingkat efektifitas peran serta masyarakat yang diuraikan pada kajian literatur, dapat diukur dari seberapa jauh tingkat efektivitas warga masyarakat dalam melibatkan diri pada berbagai proses. Lebih jauh lagi untuk melakukan pengukuran tingkat efektivitas peran serta masyarakat, perlu adanya

batasan dan alat untuk mengukurnya. Untuk tingkatan peran serta masyarakat pengguna didalam pengelolaan dilihat dari kontribusi mereka didalam memberikan sumbangan pemikiran, tenaga dan finansial didalam evaluasi kegiatan lembaga pemadam kebakaran (BPK). Sedangkan tingkat peran serta tenaga sukarela dapat dilihat dari kerja suatu tim pada tahapan komunikasi & inovasi, menetapkan tujuan dan gaya kerja tim.

▪ **Peran serta masyarakat pengguna ( Slamet, 1993 ; 36 ) diantaranya :**

a. Tahap Rencana :

Pertanyaan yang diajukan kepada responden masyarakat pengguna beberapa pertanyaan ( 7 buah pertanyaan ) dapat disimpulkan secara garis besar diantaranya : 1) Kehadiran dalam rapat, 2) Keaktifan warga dalam memberikan usulan/arahan

b. Tahap Implementasi :

Pertanyaan yang diajukan pada tahapan ini ada beberapa (6 buah pertanyaan) secara garis besar : Kontribusi/ sumbangan yang diberikan.

c. Tahap evaluasi :

Pada tahap ini pertanyaan yang diajukan beberapa pertanyaan (5 buah pertanyaan) berupa kontrol/pengawasan terhadap jalannya lembaga

Pengukuran efektivitas peran serta masyarakat pengguna (user) didalam pengelolaan pemadam kebakaran (BPK) dinilai dari keaktifan mereka dalam ikut berperanserta dari tahap rencana, implementasi dan evaluasi dengan angka yang berskala dari angka 1 sampai 5 (tidak selalu sampai selalu). Kemudian dilakukan penilaian dengan bobot ( 0-20 % = tidak efektif ; 21-40 %= kurang efektif; 41-60 % = sedang ; 61-80 % = efektif ;

81-100 % = sangat efektif ) dari jumlah total nilai dikumpulkan oleh setiap responden.

▪ **Peran serta masyarakat tenaga relawan (volunter) :**

Untuk pengukuran efektivitas dari tenaga relawan/sukarela tidak terlepas dari kerja sama tim, karena mereka merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat saling dipisahkan dari tujuan tim dan motivasi didalam ikut berperan serta didalam menanggulangi bahaya kebakaran. Pengukuran yang dilakukan ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

a. Komunikasi dan Inovasi

Adapun pengukuran dalam tahap ini fokus penelitian dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan untuk mengukur efektivitas peran serta masyarakat relawan pada pengelolaan unit BPKmandiri (ada 17 pertanyaan). Secara garis besar pertanyaan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yakni : 1) Tentang Berbagi Informasi, 2) Hubungan antar personal/anggota tim relawan, dan 3) Kebersamaan yang dimiliki oleh sesama para anggota tim relawan.

b. Tujuan-tujuan

Adapun beberapa aspek pengukuran untuk menentukan efektivitas peran serta masyarakat tenaga sukarela dalam pengelolaan unit BPK mandiri meliputi 11 (sebelas) pertanyaan. Yang secara garis besar dapat dijelaskan 1) Jelas terhadap tujuan-tujuan yang telah digariskan , 2) Pengetahuan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai, dan 3) Pertanggung jawaban terhadap tujuan – tujuan yang dicapai oleh anggota tim.

c. Gaya kerja

Adapun pengukuran efektivitas peran serta masyarakat tenaga relawan dilihat dari tahapan menetap gaya kerja tim satuan unit BPK mandiri dengan membuat beberapa pertanyaan ( 6 buah pertanyaan ) yang meliputi :

1) Saling memantau , 2) Kritik yang membangun, 3) Standar yang jelas dalam ikut berperan serta.

Pengukuran tingkat efektivitas peran serta masyarakat tenaga sukarela/relawan didalam pengelolaan pemadam kebakaran (BPK) dinilai dari tujuan–tujuan dan komunikasi yang terjadi diantara para anggota yang saling berinteraksi dan rasa memiliki serta inovasi–inovasi yang dapat diakomodasi lembaga pemadam kebakaran. Pengukuran dilakukan dengan skala dari angka 1 sampai 5 untuk a.) komunikasi dan inovasi (sangat tidak setuju sampai sangat setuju); b.) Tujuan – tujuan (tidak sama sekali sampai selalu) dan c.) Gaya kerja (sangat sedikit sampai banyak ). Kemudian dilakukan penilaian dengan bobot (0-20 % = tidak efektif ; 21-40 % = kurang efektif; 41-60 % = sedang ; 61-80 % = efektif ; 81-100 % = sangat efektif ) dari nilai total yang dikumpulkan setiap responden

## BAB IV

### ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN UNIT BPK MANDIRI

#### 4.1 Analisis Spatial Kota Banjarmasin

Analisis spatial Kota Banjarmasin sehubungan dengan pengelolaan pemadam kebakaran sebenarnya tidak dapat secara sepintas, melainkan dapat dianalisis dari beberapa aspek. Mengingat keterbatasan peneliti untuk menganalisis lingkup spatial hanya sebatas keadaan dan kondisi kebakaran yang terjadi di kota Banjarmasin. Penelitian yang lebih fokus adalah mengenai penelitian tingkat efektivitas peran serta masyarakat pengguna (user) dan masyarakat tenaga relawan (volunter) didalam pengelolaan unit-unit BPK mandiri yang ada dilingkungan masyarakat yang berfungsi sebagai pelayanan publik untuk lingkungan pemukiman mereka maupun lingkungan pemukiman diluar wilayahnya.

Hal ini menjadi penting bila dikaitkan dengan kondisi fisik kota Banjarmasin, mengingat kondisi tofografi, geografi dan klimatologi yang sangat mempengaruhi pada sistim konstruksi bangunan pelindung didaerah menjadi beragam, terutama bangunan pelindung manusia yang akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada didaerah masing – masing. Kondisi hidrologi, akibat pasang surut yang ada dan kondisi tanah yang labil serta berawa-rawa dapat mempengaruhi pola pondasi bangunan. Masyarakat pada daerah yang kondisi tanahnya berawa dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut baik di Pulau Sumatera maupun Pulau Kalimantan serta pulau – pulau lainnya yang sejenisnya akan membentuk pola bangunan dengan pondasi " *Panggung* ". Pemanfaatan bahan bangunan yang digunakan juga akan didominasi oleh bahan-bahan bangunan yang tersedia didaerah tersebut, mudah didapat dan dapat dijangkau dengan ekonomi masyarakat yang relatif kecil.

Dengan keadaan yang demikian itu, masyarakat akan lebih mudah terinspirasi untuk membuat suatu konstruksi bangunan terutama bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya terbuat dari bahan yang ada didaerahnya. Khususnya untuk daerah kota Banjarmasin dan kota-kota lain di Propinsi Kalimantan Selatan, bangunan tempat

tinggal yang mereka diami rata-rata terbuat dari bahan kayu. Bahan bangunan konstruksi kayu tersebut sesuai dengan kelasnya baik kelas kuat maupun kelas awetnya, ini tergantung dari ekonomi masyarakat untuk menggunakan bahan bangunan tersebut. Bahan bangunan untuk penggunaan atap sampai pondasi semuanya terbuat dari bahan kayu. Ini penyebab utama jumlah bangunan permanen lebih kecil daripada jenis bangunan semi permanen dan temporer/tidak permanen. Melihat kondisi kota Banjarmasin yang demikian itu, dimana dominasi konstruksi bangunan yang ada tidak bersifat permanen dapat berakibat kepada lebih mudah dan cepat penjalarannya bila terjadi musibah kebakaran.

Kemudian bila ditinjau dari pertambahan panjang jalan, baik jalan negara, jalan propinsi dan jalan kota yang ada di kota Banjarmasin pertambahannya relatif kecil setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi panjang jalan baru yang dibuat sangat minim. Disamping itu, sebenarnya kesulitan pemerintah kota Banjarmasin didalam mewujudkan jalan baru disebabkan oleh kondisi morfologinya terutama kekuatan/daya dukung tanah ( $\sigma$ ) relatif kecil yaitu sekitar 0,25-0,50 kg/cm<sup>2</sup>. Sehingga untuk membuat dan memelihara jalan memerlukan biaya yang tinggi. Akibat kondisi demikian, ada kawasan pemukiman penduduk di kota Banjarmasin yang perolehan tanahnya tidak ditata dengan baik menyebabkan tanah yang disediakan untuk jalan tidak memenuhi standar dan relatif lebih kecil atau kira-kira satu sampai dua meter. Aksesibilitas pada daerah pemukiman yang demikian dapat menghambat perjalanan armada pemadam kebakaran bila terjadi musibah kebakaran dan dapat berakibat kepada banyaknya kerugian yang diderita.

#### **4.1.1 Kepadatan Penduduk**

Di tinjau dari kepadatan penduduk, dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan fasilitas pelengkap pada kawasan padat penduduk. Pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan penduduk di daerah padat penduduk akan berbeda pengambilan kebijakannya pada daerah yang lebih sedikit/tidak padat, baik fasilitas sosial, ekonomi, maupun fasilitas lainnya.

Kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu kawasan pemukiman dapat juga mempengaruhi tingginya bencana kebakaran yang dapat terjadi. Dimana bila terjadi bencana kebakaran kemungkinan timbulnya korban jiwa akan lebih banyak, jika dibandingkan dengan kawasan yang penduduk lebih sedikit. Hal ini tidak terlepas dari fasilitas tempat tinggal bagi penduduk yang ada di kawasan pemukiman, jumlah bangunan tempat tinggal akan mempengaruhi kepada sifat bangunan itu sendiri, seperti jumlah bangunan permanen dan temporer yang dapat berakibat pada kerawanan terhadap bencana kebakaran.

Kalau melihat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ( $> 300$  orang/ha) dapat beberapa kelurahan yang mempunyai kepadatan yang lebih dari 300 orang/ha antara lain : Kelurahan Kelayan Luar (704 org/ha), Kelayan Tengah (646 org/ha), Kelayan Dalam (647 org/ha) - Kecamatan Banjar Selatan; Kelurahan Pasar Lama (307 org/ha) - Kecamatan Banjar Barat; Kelurahan Pekapuran Laut (375 org/ha), Gedang (325 Org/ha) - Kecamatan Banjar Timur dan Kelurahan yang memiliki kerapatan penduduk yang relatif lebih kecil ( $< 50$  orang/ha) hampir dijumpai di setiap kelurahan, kelurahan yang memiliki kerapatan sangat kecil yaitu Kelurahan Mantuil - Banjar Utara dengan Kerapatan 11 orang/ha serta Kelurahan Alalak Utara 12 orang/ha. Tetapi tidak menutup kemungkinan kawasan yang memiliki kerapatan yang relatif lebih kecil tidak pernah mengalami bencana kebakaran. Ternyata selama tahun 1995 sampai tahun 2000 Kelurahan Mantuil mengalami kebakaran sebanyak satu kali, sedangkan Kelurahan Kelayan Luar dengan kerapatan 704 orang/ha mengalami kebakaran selama periode tersebut sebanyak 3 kali.

Untuk kasus kerapatan penduduk yang paling besar yakni Kelurahan Kelayan Luar dengan kerapatan 704 orang/ha, kebakaran yang pernah terjadi sangat kecil. Apabila dikaitkan dengan teori, dimana kerapatan penduduk yang besar membuat kawasan tersebut menjadi lebih rawan terhadap bahaya kebakaran. Karena dengan

jumlah penduduk yang demikian besar, fasilitas tempat tinggal dan aktivitas penduduk dapat meningkat pula. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan fasilitas penduduk pada suatu kawasan, dapat menjadikan kerawanan terhadap kebakaran lebih besar pada suatu kawasan. Untuk kasus satu ini, kerawanan kebakaran yang terjadi akibat padatnya penduduk tidak terbukti. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena : 1) Partisipasi warga sangat tinggi didalam mengantisipasi bencana kebakaran; 2) Perlakuan terhadap penyebab kebakaran lebih baik; 3) Kondisi lingkungan yang lebih baik; 4) Konstruksi bangunan dibuat dari bahan yang lebih baik untuk meredam api; 5) Aksesibilitas terhadap kendaraan pemadam lebih baik dan mudah dijangkau.

#### 4.1.2 Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan sebagaimana dijelaskan didalam Bab terdahulu, sebenarnya tidak terlepas dari jumlah penduduk yang mendiami suatu kawasan. Aktivitas yang ada didalamnya sangat mempengaruhi pola penyebaran penduduk dan bangunan. Kegiatan ekonomi seperti kawasan komersial dan perdagangan dapat menyebabkan aktivitas penduduk menjadi meningkat dan beragam. Adapun aktivitas penduduk sebagaimana yang diungkapkan oleh Jhon Turner (1968) dengan teorinya “*Azas Equilibrium*” tentang “*Residential Location*” yang ditentukan adanya empat dimensi yang perlu diperhatikan dalam dinamika perubahan tempat tinggal pada suatu kota yaitu : 1) dimensi lokasi, 2) dimensi perumahan, 3) dimensi siklus kehidupan dan 4) dimensi penghasilan. Dilihat dari teorinya Jhon Turner tersebut kepadatan bangunan suatu kawasan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang mendorong orang untuk mendekatkan diri dalam rangka mengurangi/meminimalkan biaya pengeluaran terutama pengeluaran transportasi dan biaya sewa rumah dan pengeluaran lainnya.

Kepadatan yang ada pada kawasan-kawasan padat bangunan baik bangunan permanen maupun non permanen dapat dilihat kembali pada gambar 2. 2a pada bab II



tentang kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan yang ada di setiap kelurahan terdapat kepadatan bangunan ( $> 40$  bangunan/ha) dijumpai pada Kelurahan Kelayan Dalam (136,44), Kelayan Tengah (93,36), Kelayan Barat (73,93) dan Kelayan Luar (80,31)–Kecamatan Banjar Selatan; Kelurahan Melayu (44,5), Mekar (58,7), Pekapuran Laut (52,3), Gedang (45,0) – Kelurahan Banjar Timur; Kertak Baru Ilir (65,1), Pasar Lama (41,5) – Kecamatan Banjar Barat dan Kecamatan Banjar Utara tidak ada kepadatan bangunan yang lebih dari 40 bangunan/ha. Pada kawasan yang mempunyai kepadatan bangunan yang lebih besar ( $> 40$  bangunan/ha) yang rata – rata setiap tahun pernah terjadi kebakaran adalah Kelurahan Pasar Lama 8 kali (Banjar Barat), Kelurahan Pekapuran Laut 6 kali – Kecamatan Banjar Timur dan yang mempunyai kepadatan bangunan 21- 40 bangunan/ha dijumpai pada Kelurahan Kertak Baru Ulu 11 kali, Telaga Biru 7 kali, Belitung Selatang 7 kali (Banjar Barat); Kelurahan Kebun Bunga 8 kali (Banjar Timur). Sedangkan pada kawasan yang kecil kerapatannya 1,76 bangunan/ha juga pernah terjadi kebakaran yaitu Kelurahan Mantuil 1 kali – Banjar Utara. (data kejadian kebakaran periode tahun 1995 sampai 2000).

Ditinjau dari kepadatan bangunan yang ada di Kota Banjarmasin, musibah kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Terutama musibah kebakaran yang menimpa pada bangunan–bangunan yang non permanen/temporer dan semi permanen (kebanyakan bahan bangunan yang digunakan sebagian besar material bangunan yang dipakai adalah dari bahan yang mudah terbakar yaitu kayu dengan berbagai kualitas bahan). Bangunan industri yang pernah terbakar selama ini boleh dibilang sangat jarang sekali, didominasi oleh bangunan industri pengolahan kayu pada kawasan industri kayu dipinggiran Sungai Barito yang terletak di Kelurahan

Basirih–Kecamatan Banjar Utara. Kejadian yang terjadi sebanyak dua kali menghanguskan pabrik pengolahan kayu dikawasan industri tersebut. Disamping itu kawasan industri biasanya mempunyai standart penanggulangan bahaya kebakaran internal yang ada didalam kawasan pabrik sebagai sarana pelengkap bangunan industri. Penanggulangan bahaya kebakaran dapat dicegah oleh pasukan pemadam kebakaran yang ada didalam kawasan pabrik/industri. Serta adanya relokasi industri kecil kekawasan industri kecil (*LIK*) *Liang Anggang – Kabupaten Banjar* ( ± 21 km arah utara Kota Banjarmasin ), terutama buangan/limbahnya yang mudah mencemari lingkungan.

#### **4.1.3 Kejadian Kebakaran di Kota Banjarmasin**

Kejadian kebakaran yang menimpa Kota Banjarmasin selama periode tahun 1995 sampai tahun 2000, dapat diamati yang menjadi sebab kebakaran dan waktu yang terjadinya kebakaran. Dominasi dari bencana kebakaran yang terjadi dapat dilihat lebih terinci pada Bab II tentang kejadian dan korban serta kerugian yang terjadi akibat bencana kebakaran tersebut. Kejadian kebakaran selama periode tersebut dapat dirinci per kecamatan Banjar Timur 44 kali kejadian (30,55 %), Banjar Barat 61 kali kejadian (42.36 %), Banjar Utara 20 kali (13.89 %) dan Kecamatan Banjar Selatan 39 kali (27.08 %). Selama ini kejadian kebakaran yang menimpa Kota Banjarmasin rata-rata per tahunnya adalah 24 kali.

Kerugian yang dialami baik fisik maupun korban jiwa manusia akibat bencana kebakaran yang terjadi di Kota Banjarmasin selama priode tahun pendataan tahun 1995 sampai tahun 2000 : Korban jiwa yang meninggal dunia 3 (tiga) orang , jumlah kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal sebanyak 1.654 kk, bangunan rumah

yang terbakar 1.038 buah, kantor yang terbakar sebanyak 11 buah, dan sarana umum /perdagangan ( toko/kios) 300 buah.

Total kerugian akibat bencana kebakaran yang menimpa Kota Banjarmasin adalah Rp. 43.435.000.000 yang dapat dirinci untuk bencana bangunan umum dan perdagangan sebesar Rp.11.392.000.000 serta bangunan permukiman / rumah sebesar Rp.36.330.000.000.

Jadi dominasi bencana kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin adalah bangunan tempat tinggal dengan 91 kali kejadian kebakaran. Penyebab kejadian kebakaran yang terjadi didominasi oleh hubungan arus pendek listrik 38 kali kejadian (26.38 %), kompor meledak 13 kali kejadian (9,02 %) dan lain-lain kejadian yang tidak diketahui 93 kejadian (64.58%).

Dengan demikian, bangunan yang bukan permanen baik semi permanen maupun temporer untuk tempat tinggal, komersial/pasar ataupun fasilitas lainnya mengakibatkan lebih rawan terhadap bahaya kebakaran dan perambatan api akan lebih cepat ditambah lagi kejadian kebakaran pada saat kemarau/musim kering. Apalagi didukung oleh kondisi lingkungan yang tidak kondusif seperti kawasan padat bangunan, kumuh dan aksesibilitas yang tidak baik serta tidak ada fasilitas pemadam kebakaran (kran kebakaran /sumber air).

Di lihat kejadian kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin, selama periode tahun 1995 sampai tahun 2000 yakni pada bulan Oktober sampai Maret yang lebih dikenal sebagai musim penghujan dan bulan April sampai bulan September sebagai musim kemarau, prosentase kejadian pada kedua musim tersebut hampir relatif sama frekuensi kejadian. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh beberapa sumber terutama dari seorang peneliti dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan dan mantan Kepala Bagian Linmas Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan bahwa kejadian kebakaran pada musim penghujan lebih sering frekuensi kejadiannya

dibandingkan pada musim kemarau. Hal tersebut ternyata secara empiris kejadian kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin dari data periode tahun 1995 sampai tahun 2000 tidak dapat dipungkiri, dimana pada musim penghujan kejadian kebakaran relatif sama besar bila dibandingkan dengan musim kemarau. Ini disebabkan pada musim penghujan perkiraan kejadian kebakaran yang tidak diketahui asal muasal terjadinya ( 64,58 %) adalah sering terjadinya pemadaman listrik. Sehingga penggunaan lampu minyak dan lampu lilin akan meningkat, karena tidak kehati-hatian dan keteledoran masyarakat didalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadinya musibah kebakaran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1.

**TABEL IV. 1**  
**FREKUENSI KEJADIAN KEBAKARAN SELAMA 2 MUSIM**  
**DARI TAHUN 1995 - 2000**

Periode Musim	Jumlah Kejadian	
	Oktober s/d Maret	April – September
S/d 03 –1995	6	0
04-1995 s/d 03 –1996	6	7
04-1996 s/d 03 –1997	21	14
04-1997 s/d 03 –1998	7	5
04-1998 s/d 03 –1999	18	19
04-1999 s/d 03 –2000	6	20
04-2000 s/d 12 –2000	5	10
<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>75</b>
<b>Prosentase(%)</b>	<b>47.92</b>	<b>52.08</b>

Sumber : Hasil Analisa

#### 4.1.4 Pos Pemadam Kebakaran

Jumlah posko pemadam kebakaran yang dimiliki oleh satuan unit pemadam kebakaran (BPK) swadaya masyarakat dan penyebarannya pada setiap kelurahan (lihat Peta sebaran Posko Unit BPK mandiri pada bab II) sebarannya tidak merata keseluruhan pusat-pusat pelayanan pemadam kebakaran. Sebagaimana diuraikan didalam bab terdahulu, mengenai teori lokasi posko pemadam kebakaran yang diuraikan oleh S.J Barstein dan W.G Mellon mengenai *Konsep Repositioning*, setiap markas pemadam kebakaran (Pos Pemadam) mempunyai radius pelayanan yang sama sesuai dengan kondisi dan sifat bahaya kebakaran tiap daerah (daerah kelurahan), terutama diperuntukkan bagi mobil pemadam kebakaran. Marchant (1972) menambahkan jangkauan pelayanan suatu pos pemadam kebakaran yang telah ditetapkan tersebut (radius pelayanan daerah kelurahan) merupakan jangkauan pelayanan yang paling efektif didalam memberikan pelayanan setiap adanya permintaan pemadaman. Sebenarnya dari uraian tersebut dapat diambil suatu garis lurus yakni pos pemadam kebakaran merupakan suatu jarak terpendek dari pusat permintaan yang bisa diakses didalam memberikan pelayanan setiap kali adanya permintaan pemadaman kebakaran. Waktu terpendek yang diijinkan dalam memberikan pelayanan pemadaman sebagaimana disyaratkan oleh *IFCAA (International Fire City Assosiation Administration)* yakni  $\pm 12$  menit dari posko kelokasi permintaan atau bila dihitung dengan kecepatan kendaraan untuk mencapai sasaran 30 km/jam (kecepatan kendaraan barang dalam kota) jarak yang efektif pos pemadam kebakaran ketempat permintaan adalah dalam radius 6 km.

Apabila ditinjau dari teori dan persyaratan mengenai penempatan posko pemadam kebakaran, posko pemadam yang disediakan oleh pemerintah kota yakni di Balai Kota Kantor Walikota Banjarmasin, sangat jauh dari harapan dan jangkauan

pelayanan. Armada yang dimiliki pemerintah kota Banjarmasin sampai tahun 2000 sebanyak dua unit dengan anggota pemadam kebakaran 17 orang dengan status kepegawaian adalah pegawai negeri sipil kota Banjarmasin. Bahkan armada kendaraan yang ada sekarang ( April 2001) akan diperbantukan pada unit-unit BPK yang dianggap mampu untuk membiayai operasional kendaraan armada pemadam kebakaran. Sesuai dengan kebijakan walikota pemerintah kota Banjarmasin, untuk melikuidasi Seksi Linmas pada Dinas Ketertiban Umum Kota Banjarmasin yang tugasnya menangani masalah kebakaran telah menyerahkan aset satu unit mobil pemadam kepada Unit BPK Hippindo yang dianggap mampu didalam membiayai operasi dan pemeliharannya. Sedangkan satu unitnya lagi, pemerintah kota menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan unit mobil pemadam kepada unit BPK mandiri.

Posko pemadam kebakaran milik unit BPK mandiri penyebarannya tidak merata keseluruh wilayah kelurahan. Ada kelurahan yang memiliki posko pemadam yang relatif banyak yakni Kelurahan Melayu sebanyak lima unit aktif dan satu unit tidak aktif. Disamping itu ada kelurahan yang tidak mempunyai posko sama sekali, walaupun kondisi lingkungan mereka dapat dikatakan cukup rawan kebakaran. Bahkan ada penyebaran posko pemadam pada kelurahan yang berdekatan cukup banyak yakni pada Kelurahan Melayu, Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Seberang Mesjid yang keseluruhannya terletak pada Kecamatan Banjar Timur (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebaran posko pemadam kebakaran ).

Fungsi posko pemadam kebakaran adalah sebagai tempat menerima dan mengelola informasi yang diterima, pool kendaraan pemadam kebakaran dan personel/anggota unit BPK. Kecepatan dan kehandalan didalam menerima dan menyebarkan informasi tergantung pada kemampuan alat komunikasi yang dimiliki. Setiap anggota unit BPK mandiri rata-rata sudah memiliki pesawat komunikasi dua

meter (HT) dan posko-posko pemadam kebakaran telah memiliki alat komunikasi (pesawat telepon dan radio komunikasi dua meter/all band).

Karena sifat pelayanan yang diberikan unit BPK mandiri adalah kesukarelaan dan tidak mencari keuntungan, maka didalam didalam menjalankan tugasnya tim unit BPK mandiri perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang dimaksud untuk lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat setiap ada permintaan pelayanan pemadamam kebakaran. Sebab tanpa adanya partisipasi warga unit BPK mandiri tidak dapat melayani dengan baik. Partisipasi didalam operasional unit BPK dapat berupa penyampaian informasi, sumbangan tenaga, sumbangan finansial, sumbangan pemikiran dan pengetahuan. Jadi pada dasarnya pelayanan pos pemadam kebakaran unit BPK mandiri berkat adanya partisipasi warga dan tenaga kerja sukarela.

#### **4.2 Kajian Efektivitas Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan BPK Mandiri**

Dalam kajian teori sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada bab tiga, peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah pelibatan aktif dan bermakna dari masyarakat pada tingkatan yang berbeda-beda yaitu yang dilaksanakan pada kegiatan – kegiatan yang bertahap sesuai dengan tujuan peran serta itu sendiri. Untuk peran serta yang dimaksudkan pada pengelolaan unit BPK mandiri adalah bersangkutan dengan kondisi dari masyarakat didalam memandang unit BPK mandiri bagian dari mereka. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan peran serta perlu adanya sifat *“Sense of Belonging”* (rasa memiliki) dari masyarakat itu sendiri. Adapun pengelolaan unit BPK mandiri dalam operasionalisasi perlu adanya tahapan-tahapan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan target yang akan dicapai. Tahapan tersebut akan ditinjau untuk masyarakat pengguna (user) dilihat dari tahapan rencana, tahapan implementasi dan evaluasi. Sedangkan peran serta untuk tenaga sukarela (relawan) unit BPK mandiri

akan diungkap dari tahapan komunikasi & inovasi, tujuan/target yang akan dicapai dan gaya kerja dari tim sukarela. Sesuai dengan hipotesa yang disusun didalam bab pendahuluan, dimana bentuk hipotesa yang akan dibuktikan dengan analisis tingkat efektivitas peran serta masyarakat pengguna dan masyarakat relawan didalam mengelola unit BPK mandiri yakni masyarakat mempunyai kekuatan kontrol didalam pengelolaan unit BPK mandiri. Sehingga kelangsungan dari unit BPK mandiri yang ada dapat berlanjut dan berkembang sesuai kehendak masyarakat setempat secara mayoritas dalam menentukan dan memutuskan kebijakan.

#### **4.2.1 Peran serta Masyarakat Pengguna (User)**

##### **4.2.1.1 Tahap Rencana**

Pengukuran dalam operasional unit – unit BPK mandiri pada tahapan ini adalah pada tingkat kehadiran masyarakat didalam mengikuti rapat yang diadakan, keaktifan didalam memberikan usulan dan rencana serta penyampaian usulan yang disampaikan secara langsung didalam forum rapat yang diikuti oleh anggota masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri yang ada dilingkungan mereka.

Pengukuran pada tahap ini, merupakan derajat yang paling tinggi didalam keterlibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal ini disebabkan, melalui perencanaan orang sekaligus diajak untuk turut membuat keputusan. Pembuatan keputusan dalam arti sesungguhnya adalah sama dengan perencanaan ( Slamet, 1993 ). Peran serta warga dalam perencanaan pembangunan mencakup merumuskan tujuan, merumuskan program, biaya, sumber biaya dan sebagainya sesuai dengan keinginan mereka. Dikaitkan dengan peran serta masyarakat dalam tahap rencana operasionalisasi unit-unit BPK mandiri adalah keterlibatan masyarakat yang ada dilingkungan unit BPK yang bersangkutan. Sehingga keberadaan unit BPK mandiri tersebut bukan sebagai barang mati, tetapi dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan



sesuai dengan resiko yang ada akibat dari dioperasikannya peralatan pemadam tersebut baik segi pembiayaan maupun tenaga kerja yang menjadi motor penggerak. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat secara nyata sangat diperlukan untuk menunjang keberlanjutan pengelolaan unit BPK mandiri.

Karena didalam pengelolaan unit BPK mandiri merupakan pelibatan masyarakat secara utuh. Pelibatan masyarakat disini lebih mencerminkan kepada rasa memiliki prasarana dan sarana dimana biaya pengadaannya oleh masyarakat dilingkungan unit –unit BPK mandiri.

Beranjak dari aspek-aspek tersebut diatas, maka untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat didaerah studi (sampel di Kelurahan Melayu) tentang operasionalisasi unit – unit BPK yang ada dapat dilihat pada Tabel IV.2, Gambar 4.1 dan Lampiran B. 1.

Dari tabel distribusi tersebut, diketahui tingkat efektivitas masyarakat pada tahap rencana operasional pengelolaan unit BPK mandiri dari 50 orang anggota responden adalah sebagai berikut : tidak ada yang berada pada tingkat yang tidak efektif ( 0 % ), kurang efektif 4 orang ( 8 %) serta yang berada pada tingkatan sedang sampai pada tingkatan sangat efektif sebesar 92 %.

Dari beberapa sumber pengelola unit-unit BPK mandiri yang ada menyatakan :

“ Masyarakat diajak berperan serta terutama untuk menyamakan persespsi tentang apa yang dilakukan didalam pengelolaan unit BPK mandiri, karena bila mereka tidak diikutkan dalam tahap rencana ini mereka nanti tidak akan percaya lagi dengan apa yang dilakukan oleh unit BPK apalagi bila masalah pembiayaan/dana, terutama bagi masyarakat yang mempunyai standar ekonomi yang pas-pasan. (Wawancara dengan ketua BPK “*Siratul Mustaqim*”, tanggal 11 April 2001 ).

Bila ditinjau dari proses peran serta masyarakat pengguna dibandingkan dianalisa dengan pengukuran skala tingkat peran serta masyarakat (*Ladder of Citizen*

**TABEL IV.2**  
KATEGORI VARIABEL TINGKAT EFEKTIVITAS  
PERAN SERTA MASYARAKAT PENGGUNA  
PADA TAHAP RENCANA

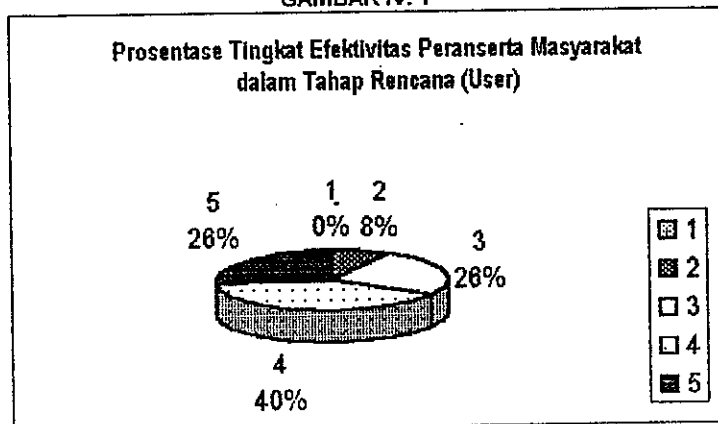
Kategori	Kumulasi Nilai/Bobot	Frekuensi	Prosentase (%)	Ket
Tidak Efektif	0 - 7	0	0,00	1
Kurang Efektif	8 - 14	4	8,00	2
Sedang	15 - 21	13	26,00	3
Efektif	22 - 28	20	40,00	4
Sangat Efektif	29 - 35	13	26,00	5
<b>Jumlah</b>		50	100,00	

Sumber : Hasil Survei

Keterangan :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1 = Tidak Efektif  | 4 = Efektif        |
| 2 = Kurang Efektif | 5 = Sangat Efektif |
| 3 = Sedang         |                    |

**GAMBAR IV. 1**



Sumber : Hasil Analisis

*Participation*) dari Sherry Arnstein, yang terdiri dari delapan tangga : (1) Manipulasi dan (2) Perbaikan, disimpulkan bukan sebagai tingkat peran serta ; Tangga (3) Informasi dan (4) Konsultasi disebut sebagai tingkatan tokeisme atau sekadar formalitas yang memungkinkan masyarakat hanya untuk mendengar dan memiliki hak memberikan suara, namun belum menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan/keputusa; sedangkan tingkatan (5) penetraman dipandang sebagi tokeisme pada tingkat yang lebih tinggi, dimana masyarakat memiliki hak memberikan *advice* tetapi letak pengambilan keputusan tetap ditangan para pemerakarsa. Untuk Tingkatan (6) Kerjasama, masyarakat memiliki ruang untukbernegosiasi dan terlibat dalam *trade off* dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkat (7) Pengerahan kekuatan dan (8) Kontrol masyarakat, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Hal ini, menunjukan bahwa tingkatan efektivitas peran serta warga masyarakat pengguna (user) pada pengelolaan unit BPK mandiri pada tahapan rencana operasinalisasi sebagai wujud peran serta masyarakat baik sekali dilihat dari jawaban responden. Jadi pada tahapan rencana ini peran serta masyarakat betul – betul menunjukan arahan pembangunan yang bertumpu pada fenomena *bottom-up planning*. Keterlibatan masyarakat pada tahapan rencana pengelolaan unit BPK mandiri mampu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada dilingkungan unit BPK terhadap prasarana dan sarana yang dimiliki. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri dimana masyarakat mempunyai kemampuan untuk memberikan arahan dan kebijakan yang diambil sebagai peran sosial politik untuk berdemokrasi didalam pengadaan prasarana dan sarana publik.

Jadi tingkatan peran serta masyarakat pada pengelolaan unit unit BPK mandiri ini pada sampel wilayah (Kelurahan Melayu) berada pada tangga 6,7 dan 8,

dimana tingkatan masyarakat mempunyai kekuatan kontrol dalam mengambil dan memutuskan kebijakan.

#### **4.2.1.2 Tahap Impelementasi**

Dalam tahap implementasi ini, pengukurannya bertolak dari seberapa jauh masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas dari program/rencana yang telah disepakati oleh masyarakat. Peran serta masyarakat didalam tahapan ini akan berlangsung dengan baik, apabila peran serta pada tahap rencana sudah berjalan dengan baik. Warga masyarakat yang sudah terlibat dalam tahap rencana, tentunya akan akan mengetahui dan cenderung untuk terlibat pula didalam impelementasinya.

Sedangkan pengukuran peran serta masyarakat pengguna yang dilakukan dalam tahap implementasi ini adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat secara nyata : Keterlibatan masyarakat ini akan dilihat kemauan mereka untuk ikut ambil ambil dari kegiatan –kegiatan yang telah disetujui. Keterlibatan mereka dapat berupa sumbangan tenaga, sumbangan finansial dan material. Namun besar kecilnya dari keterlibatan dari dari tahap ini adalah bukan diukur dari sumbangan yang diberikan, tetapi bagaimana secara nyata mereka memberikan sumbangsih terhadap pengeleloaan unit BPK mandiri tersebut.
2. Kebersamaan masyarakat didalam berperan serta : Kebersamaan mereka tentu akan dapat dilihat sebagai wujud rasa memiliki didalam pengeloaan unit BPK. Itu tidak dapat dipungkiri, kebersamaan dapat meningkatkan peran serta masyarakat sebagai rasa kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya.
3. Motivasi masyarakat terhadap peran serta mereka : Ini dapat mendorong masyarakat untuk ambil bagian secara nyata untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari yang sudah ada. Jadi motivasi yang diharapkan dari masyarakat

dapat terwujud dari dalam hati sanubari mereka, walaupun pada awalnya ikut ambil bagian dalam pengelolaan unit BPK mandiri ini secara terpaksa atau karena dipaksa.

Karena didalam operasional unit BPK mandiri diperlukan sekali adanya peran serta masyarakat baik masyarakat pengguna maupun tenaga sukarela/relawan anggota pemadam kebakaran. Dari tahap implementasi ini, masyarakat akan diminta kesadaran mereka ikut berperan serta didalam mewujudkan rencana yang telah disusun dan disetujui. Dalam tahap implementasi ada 6 (enam) pertanyaan untuk mengetahui tingkat efektivitas peran serta masyarakat.

Beranjak dari proses tersebut, pelibatan peran serta masyarakat pada tahap implementasi ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari distribusi variabel pada Tabel IV.3, Gambar 4.2 dan lampiran B.2.

Dari tabel distribusi tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas peran serta masyarakat pengguna pada tahap implementasi dari responden yang berjumlah 50 orang, dimana responden yang memiliki nilai tidak efektif 0 % (tidak ada); kurang efektif 4 orang (8 %). Sedangkan responden yang memiliki nilai sedang sampai sangat efektif berjumlah 46 orang yang dirinci bernilai sedang 9 orang (18%), nilai efektif 26 orang (52 %) dan responden yang sangat efektif 11 orang (22 %).

Pelibatan masyarakat pengguna (user) pada tahap implementasi pengelolaan unit BPK mandiri dapat dikatakan dari kurang efektif sampai sangat efektif, walaupun prosentase peran serta masyarakat pada tingkat yang kurang efektif relatif kecil. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan penduduk memberikan waktu/sibuk, tidak mempunyai finansial yang berlebih atau kemampuan ekonomi terbatas.

Hal tersebut diatas diperkuat oleh pengurus Unit BPK, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPK "*Al Qomar*" yang menyatakan bahwa :

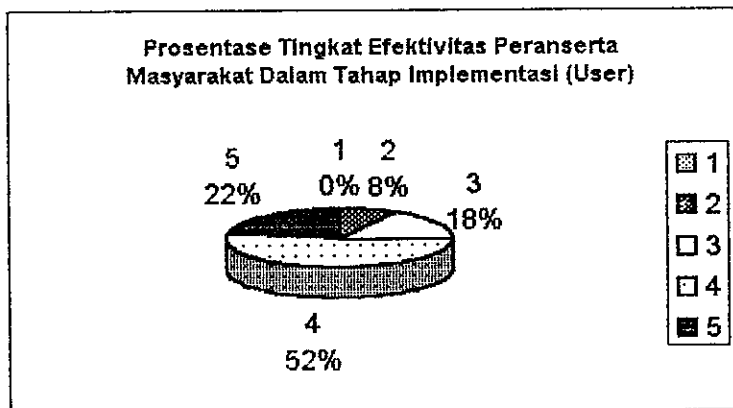
**TABEL IV.3**  
**PENGUKURAN KATEGORI EFEKTIVITAS**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT(USER)**  
**PADA TAHAP IMPLEMENTASI**

Kategori	Kumulasi Nilai/Bobot	Frekuensi	Prosentase( %)	Ket
Tidak Efektif	0 - 6	0	0,00	1
Kurang Efektif	7 - 12	4	8,00	2
Sedang	13 -18	9	18,00	3
Efektif	19 -24	26	52,00	4
Sangat Efektif	25 -30	11	22,00	5
	Jumlah	50	100,00	

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan : 1 = Tidak Efektif      4 = Efektif  
2 = Kurang Efektif      5 = Sangat Efektif  
3 = Sedang

**GAMBAR 4.2**



Sumber : Hasil Analisis

“Memang masyarakat mempunyai kemampuan terbatas, terutama pada kemampuan masyarakat yang beragam dalam finansial, mereka dapat kami berikan keringan sesuai aturan yang telah disepakati yaitu bagi mereka yang betul-betul untuk hidup saja mereka tidak mampu dan bahkan kami sebagai pengurus kadang-kadang memberikan bantuan sembako sebagai wujud kebersamaan kami dan terutama peran sosial kami sebagai organisasi yang berasaskan sosial”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2001).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat didalam penelitian ini, dimana dari responden yang ada menunjukkan tingkat efektivitas peran serta masyarakat pengguna pada tingkat implementasi pengelolaan unit-unit BPK mandiri dapat bergerak dari sedang sampai sangat efektif. Hal ini dimungkinkan karena, pengelolaan unit-unit BPK mandiri ini dibentuk oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat yang ada dilingkungan mereka. Sehingga ketergantungan mereka kepada pihak lain sebenarnya hanya sebagai upaya untuk mencari alternatif lain sebagai penunjang operasionalisasi unit-unit BPK mandiri.

#### **4.2.1.3 Tahap Evaluasi**

Berdasarkan penggolongan pada keterlibatan peran serta dalam berbagai tahap ada enam langkah ( Van Dusseldrop, 1981:35-51) yaitu (1) perumusan tujuan, (2) penelitian, (2) persiapan rencana, (3) penerimaan rencana, (5) pelaksanaan, dan (6) penilaian. Dapat dikatakan partisipasi secara lengkap, bila keseluruhan tahap tersebut diatas diikuti oleh warga masyarakat dan partisipasi sebagian bila sebagian dari kegiatan-kegiatan tersebut diikuti. Berdasarkan keterlibatan peranserta pada tahap evaluasi ini, akan dilakukan beberapa langkah guna melakukan pengukuran apakah peran serta masyarakat pengguna didalam pengelolaan unit-unit BPK mandiri itu efektif atau tidak.

Adapun pengukuran yang dapat dilakukan pada tahap evaluasi ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Memantau dan menanyakan kegiatan yang dilakukan : Kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan segala kegiatan yang menggunakan sumber daya yang ada didalam masyarakat, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya alam. Untuk mendapatkan pantauan yang lebih baik, ada forum komunikasi lingkungan yang dapat membahas problematik yang ada dilingkungan itu. Hal ini tidak mungkin terjadi, apabila tidak ada partisipasi masyarakat. Bila dikaitkan dengan pengelolaan unit BPK mandiri, masyarakat diupayakan untuk memberikan masukan sebagai wujud partisipasi didalam pengelolaan unit BPK tersebut.
2. Kritik / saran yang disampaikan : Dari rencana yang telah dicanangkan dan dirumuskan bersama akan mempunyai konsekuensi dari tujuan itu yaitu adanya kritikan dan saran-saran, baik saran yang paling pahit sampai pujian. Untuk itu bila dikaitkan dengan pengelolaan unit BPK mandiri, memberikan gambaran tingkat efektivitas peran serta masyarakat terhadap tujuan dan target yang direncanakan pada tahap-tahap sebelumnya.
3. Hak masyarakat dalam memutuskan kebijakan program/rencana : Dalam tahapan ini merupakan fase yang sangat penting, dimana hak yang paling mendasar dari seorang adalah untuk memberikan hak politiknya didalam masyarakat yang demokratis yaitu memberikan suara terhadap suatu putusan dan akan sangat demokratis lagi, bila masyarakat mempunyai hak untuk memutuskan kebijakan.

Tingkat peran serta masyarakat pada tahap evaluasi ini, diukur tingkat efektivitas peran sertanya berdasarkan hal tersebut diatas. Untuk itu, pengukuran tingkat efektivitas peran serta masyarakat pada tahapan evaluasi pengelolaan unit BPK mandiri ada 5 (lima) pertanyaan diantaranya adalah pemantauan yang dilakukan oleh



warga, hak untuk memutuskan segala sesuatunya sehubungan dengan operasional unit BPK serta pengambilan keputusan yang oleh warga masyarakat.

Dari data survai yang dilakukan pada kawasan penelitian, responden sebanyak 50 orang warga masyarakat pengguna dari 5 (lima) unit BPK yang aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat distribusinya pada Tabel IV. 4, Gambar 4. 3 dan lampiran B.3.

Dari distribusi variabel pada tahap tahap evaluasi menunjukkan berbagai jawaban yang dikumpulkan. Jawaban tersebut dalam distribusi dari masyarakat pengguna (user) pada tahapan evaluasi pengelolaan unit BPK mandiri adalah tingkat yang tidak efektif 0 % (tidak terdapat warga pada posisi ini ), tingkat kurang efektif 8 % (4 orang), tingkat sedang 22 % (11 orang), pada tingkat efektif sebanyak 40 % (20 orang) sedang pada posisi yang sangat efektif sebanyak 30 % (15 orang).

Tingkat efektivitas peran serta masyarakat pada tahap evaluasi pengelolaan unit BPK mandiri ini berkisar antara kurang efektif sampai kepada sangat efektif. Dimana prosentase peran serta masyarakat pengguna pada tahap evaluasi dari sedang sampai sangat efektif dengan besaran 92 % dari yang tidak efektif dan kurang efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkatan efektivitas peran serta masyarakat pada tahap evaluasi ini sebesar 92 % dari kontinum 8 % sampai pada 92 %. Masyarakat mempunyai kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan/kebijakan pada tahap ini.

#### **4.2.2 Peran serta Masyarakat Tenaga Sukarela**

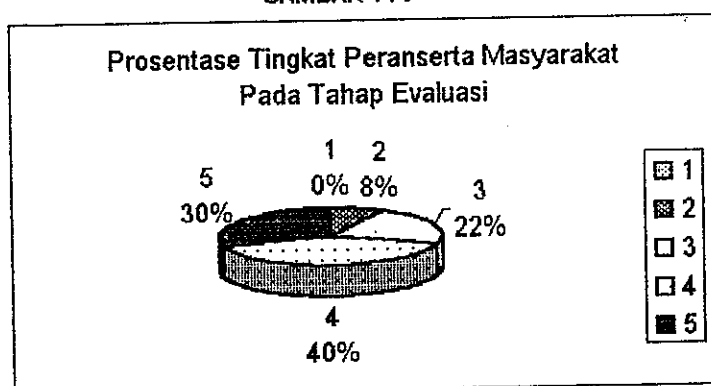
Tobby Wall ( Michael West, 1998: 37 ) mengusulkan tiga unsur dasar dalam berperan serta pada kerja tim yang disebutnya dengan “ *Tiga I* ” yaitu : *Interaction*, *Information sharing*, dan *Influence over decision-making* ( interaksi, saling berbagi informasi, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan ) dalam kajian teori dan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

TABEL IV-4  
KATEGORI VARIABEL TINGKAT EFEKTIVITAS PERAN  
SERTA MASYARAKAT PENGGUNA TAHAP EVALUASI  
PADA PENGELOLAAN BPK MANDIRI

Kategori	Kumulasi Nilai/Bobot	Frekuensi	Prosentase( %)	Ket
Tidak Efektif	0 - 5	0	0,00	1
Kurang Efektif	6 - 10	4	8,00	2
Sedang	11- 15	11	22,00	3
Efektif	16 -20	20	40,00	4
Sangat Efektif	21 -25	15	30,00	5
Jumlah		50	100,00	

Sumber : Hasil Survei

GAMBAR 4.3



Sumber : Hasil Survei

1. Interaksi : Untuk dapat disebut sebagai sebuah tim, sekelompok individu yang memiliki tanggung jawab bersama haruslah mempunyai interaksi yang berkesinambungan. Jika tidak, tidak akan ada kesatuan koordinasi dan kesepakatan dalam upaya yang mereka upayakan. Interaksi dalam pelaksanaan tugas maupun sosial sama pentingnya dalam suatu tim. Interaksi sosial dapat saja mencakup pesta, makan siang, perbincangan informal atau berolah raga bersama. Interaksi ini akan mempererat ikatan sosial. Sementara itu, interaksi dalam pelaksanaan tugas dapat berupa saling tukar informasi, komunikasi dan sebagainya dalam upaya untuk mencapai target-target yang direncanakan.
2. Berbagi informasi : Berbagi informasi dalam konteks tim adalah cara untuk mengubah saling pengertian mengenai tim, baik tim secara keseluruhan maupun individual para anggotanya. Monitor terhadap penyebaran informasi ini penting bagi efektivitas tim. Informasi menjadi sangat penting untuk perubahan-perubahan yang akan dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan pada rencana dan target yang ingin dicapai oleh tim baik secara perorangan maupun oleh tim itu sendiri.
3. Pengaruh dalam pengambilan keputusan : Secara tradisional pengertian partisipasi dipandang sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Partisipasi dapat saja melibatkan konsultasi yang hanya tampak, ketika pandangan para anggota tim diminta namun dalam pelaksanaannya ketua tim atau manajer timlah yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Lebih ekstrim lagi adalah pada demokrasi total, ketika keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara anggota, namun hal ini dapat lebih mengarah pada "kelumpuhan" daripada efektivitas tim itu sendiri.

Jadi didalam peran serta masyarakat tenaga sukarela ditinjau dari komunikasi dan inovasi, tujuan-tujuan yang akan dicapai dan gaya kerja tim para tenaga relawan dalam pengelolaan unit BPK mandiri dalam memberikan pelayanan pemadaman.

#### **4.2.2.1 Tahap Komunikasi dan Inovasi**

Pada tahapan komunikasi ini sangat penting sekali untuk berinteraksi diantara para anggota dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Dalam komunikasi ini paling tidak untuk memperbaharui perkembangan satu sama lainnya didalam operasinalisasi unit BPK tersebut.

Inovasi yang diperlukan didalam pengelolaan unit BPK mandiri merupakan sesuatu yang harus diperlukan, mengingat inovasi didalam tim akan sangat berpengaruh secara langsung agar lembaga atau tim dapat melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih positif, kreatif dari gaya kerja yang sudah ada serta kearah yang lebih dinamis.

Dari survai yang dilakukan pada unit- unit BPK mandiri yang ada (Kelurahan Melayu-Kecamatan Banjar Timur) dengan responden sebanyak 50 orang. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para responden untuk lebih jelasnya lihat Tabel IV. 5, Gambar 4. 4. Dan Lampiran B.4.

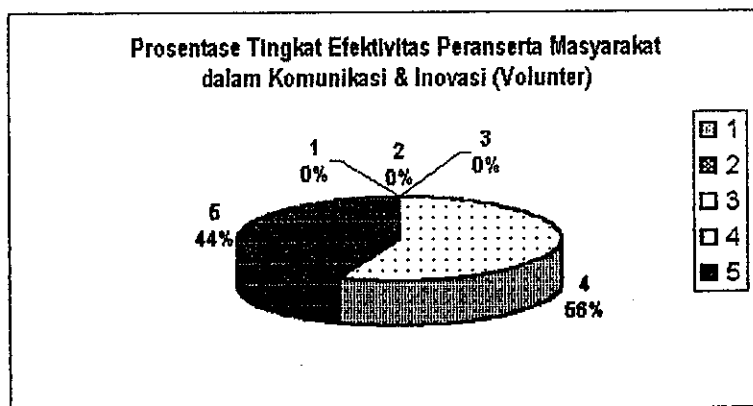
Dari tabel distribusi variabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas peran serta masyarakat tenaga sukarela bergerak dari nilai efektif sampai sangat efektif. Adapun anggota pemadam kebakaran sebagai tenaga sukarela yang mempunyai nilai efektivitas peran sertanya pada tingkat efektif pada pengelolaan unit BPK sebanyak 28 orang (56 %) dan yang sangat efektif sebanyak 22 orang (44% ).

**TABEL IV - 5**  
**KATEGORI VARIABEL TINGKAT EFEKTIVITAS**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT (VOLUNTER) BIDANG**  
**KOMUNIKASI DAN INOVASI PADA PENGELOLAAN**

Kategori	Kumulasi Nilai/Bobot	Frekuensi	Prosentase (%)	Ket
Tidak Efektif	0 - 17	0	0,00	1
Kurang Efektif	18 - 34	0	0,00	2
Sedang	35 - 51	0	0,00	3
Efektif	53 - 68	28	56,00	4
Sangat Efektif	69 - 85	22	44,00	5
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Hasil Analisis

**GAMBAR 4. 4**



Sumber : Hasil Analisis

Hal ini menunjukkan, tingkat efektivitas para anggota relawan pemadam kebakaran (BPK) mandiri sangat mengerti sekali dimana semua unsur (variabel) yang menyangkut peran serta mereka pada tahap komunikasi dan inovasi dapat terakomodai didalam wadah lembaga yang mereka ikuti.

#### 4.2.2.2 Tahap Tujuan – tujuan

Visi dan misi yang jelas akan mempertegas pada tingkat keefektivitasan kerja kelompok didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan sebelumnya melalui interaksi antar anggota tenaga sukarela dan masyarakat lainnya baik dari unsur birokrasi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), agen lainnya, agen sejenis maupun masyarakat lainnya.

Tujuan – tujuan yang ingin dicapai tercermin melalui visi dan misi dari unit BPK mandiri tersebut, sebab tanpa adanya visi dan misi yang jelas pengelolaan unit BPK akan terjadi “ *kepailitan / kelumpuhan* “ yang berakibat unit BPK tidak dapat berfungsi dengan baik (*mati suri*).

Dari survai yang dilakukan pada unit- unit BPKmandiri yang didaerah yang dijadikan sampel ( Kelurahan Melayu – Kecamatan Banjar Timur ) dengan responden tenaga suka rela/relawan/volunter sebanyak 50 orang responden. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para responden untuk lebih jelasnya lihat Tabel IV. 6, Gambar 4 . 5 dan Lampiran B.5.

Dari tabel distribusi variabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas peran serta masyarakat tenaga sukarela/relawan/volunter pada tahapan tujuan–tujuan pengelolaan unit BPK mandiri yang bergerak sampai nilai kontinum. Dari jumlah responden yang mempunyai nilai tingkat peran serta masyarakat relawan/tenaga sukarela efektif berjumlah 29 orang atau sekitar 58 % dari

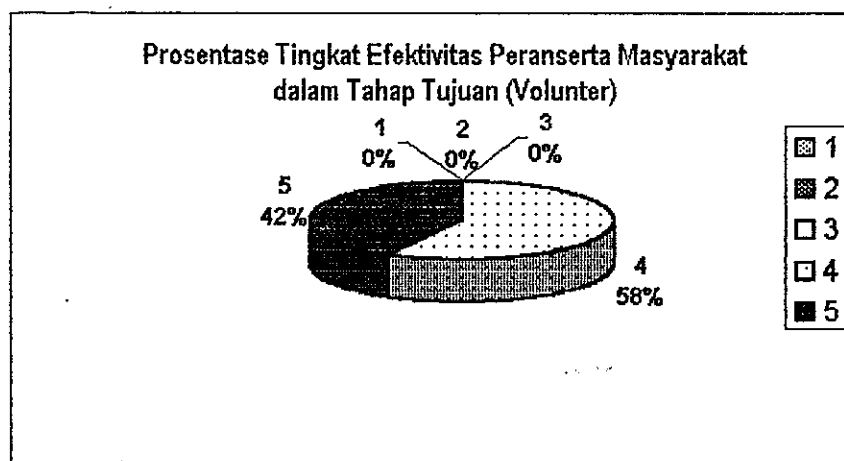
**TABEL IV. 6**  
**KATEGORI VARIABEL TINGKAT EFEKTIVITAS PERAN**  
**SERTA MASYARAKAT (VOLUNTER) PADA TUJUAN-TUJUAN**  
**PENGELOLAAN BPK MANDIRI**

Kategori	Kumulasi Nilai/Bobot	Frekuensi	Prosentase (%)	Ket
Tidak Efektif	0 - 11	0	0,00	1
Kurang Efektif	12 - 22	0	0,00	2
Sedang	23 - 33	0	0,00	3
Efektif	34 - 44	29	58,00	4
Sangat Efektif	45 - 55	21	42,00	5
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan      1 = Tidak Efektif                      4 = Efektif  
                          2 = Kurang Efektif                    5 = Sangat Efektif  
                          3 = Sedang

**GAMBAR IV. 5**



Sumber : Hasil Analisis

responden dan yang mempunyai tingkat yang sangat efektif berjumlah 21 orang atau sekitar 42 %.

Hal ini menunjukkan tingkat peran serta masyarakat tenaga relawan/volunter dapat dikatakan berjalan dengan sangat baiknya, karena hal tersebut tidak lepas peran masyarakat lainnya seperti peran para donatur, para pengurus sepuh pendiri Unit BPK dan sikap tersendiri yang dimiliki para anggota tim unit BPK.

Pendapat beberapa pengurus dan anggota unit BPK sehubungan dengan peran serta masyarakat pada tahapan ini untuk memperkuat argumen-argumen yang ada hubungannya dengan penetapan tujuan-tujuan unit BPK yang ada. Antara lain dikemukakan oleh Bapak Abdul Madjid (mantan kepala Bagian Linmas Kota Banjarmasin ) bahwa :

“Unit BPK yang ada dilingkungan masyarakat mempunyai kewenangan untuk menentukan tujuan-tujuan mereka, kami sebagai lembaga birokrasi pemerintah kota hanya berwenang memberikan ijin operasional dan pembinaan saja. Sedangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka yang menentukan” (Wawancara dilakukan tanggal 5 Mei 2001).

Dengan demikian, tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh forum komunikasi lingkungan dalam pengelolaan unit BPK mandiri setempat sangat dipahami dan dimengerti oleh para anggota. Kegiatan yang mereka lakukan tanpa ada bayaran tersebut sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut sukarela dan tahu resiko yang akan diterima bila menjadi anggota satuan unit BPK dengan membuat pernyataan secara tertulis diatas materai serta diketahui oleh pihak keluarga maupun isteri bagi yang sudah beristri/berkeluarga.

#### **4.2.2.3 Tahap Gaya Kerja**

Didalam mengelola organisasi unit BPK mandiri, tidak terlepas dari pemantauan anggota dalam penegelolaan lingkungan organisasi. Peran serta



masyarakat relawan dalam pengelolaan Unit BPK mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Ancona dan Caldwell (Michael West, 1993: 167-171) yaitu :

1. Bertindak sebagai duta : Hal ini melibatkan komunikasi antara para anggota dengan pengurus teras lainnya (manajer ) yang dapat mempengaruhinya, sehingga efektivitas kerja tim, komitmen dan inovasi yang ada didalam tim tidak terhenti.
2. Aktivitas organisasi tugas : Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan tim-tim lainnya dan departemen secara horizontal. Koordinasi tugas menekankan pada koordinasi, negosiasi dan pemberian umpan balik secara horizontal baik antar anggota lainnya maupun dengan departemen lainnya.
3. Tindakan pemantauan : Tindakan ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru kepada kelompok, mengenai kebutuhan pasar serta dibutuhkannya pengembangan ide-ide dan teknik baru. Pemantauan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal tim.

Dari survai yang dilakukan pada unit- unit BPKmandiri yang ada didaerah sampel (Kelurahan Melayu – Kecamatan Banjar Timur) dengan responden tenaga sukarela/relawan sebanyak 50 orang responden. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para responden untuk lebih jelasnya lihat Tabel IV. 7, Gambar 4. 6 dan Lampiran B.6.

Dari tabel distribusi variabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas peran serta masyarakat tenaga sukarela pada tahapan gaya kerja satuan unit BPK dalam pengelolaan unit BPK mandiri. Dari jumlah responden yang mempunyai nilai tingkat peran serta masyarakat relawan/tenaga sukarela pada

**TABEL IV - 7**  
**KATEGORI VARIABEL TINGKAT EFEKTIVITAS PERAN**  
**SERTA MASYARAKAT (VOLUNTER) BIDANG GAYA KERJA**  
**PADA PENGELOLAAN BPK MANDIRI**

Kategori	Kumulasi Nilai/Bobot	Frekuensi	Prosentase (%)	Ket
Tidak Efektif	0 - 6	0	0,00	1
Kurang Efektif	7 - 12	0	0,00	2
Sedang	13 - 18	0	0,00	3
Efektif	19 - 24	30	60,00	4
Sangat Efektif	25 - 30	20	40,00	5
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

1 = Tidak Efektif

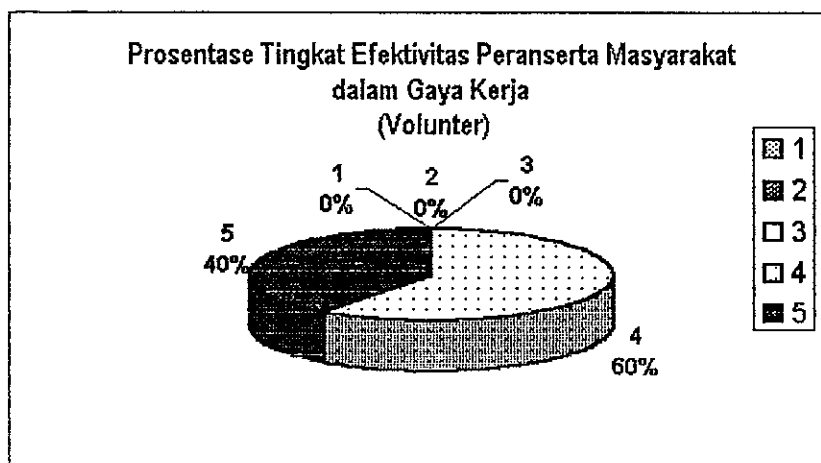
2 = Kurang l

3 = Sedang

4 = Efektif

5 = Sangat Efektif

**GAMBAR 4 . 6**



Sumber : Hasil Analisis

tingkat efektif berjumlah 30 orang atau sekitar 60 % dari responden dan yang mempunyai tingkat yang sangat efektif berjumlah 20 orang atau sekitar 40 %.

Hal ini menunjukkan tingkat peran serta masyarakat tenaga relawan dapat dikatakan sangat baik, karena tidak terlepas dari peran masyarakat lainnya seperti para donatur, pengurus sepuh pendiri Unit BPK mandiri, sikap dan perilaku setiap anggota tim unit BPK yakni ingin membantu menjaga lingkungan sendiri dan pelayanan kepada sesama warga masyarakat yang mendapat musibah.

Untuk memperkuat argumen-argumen yang ada hubungannya dengan gaya-gaya kerja satuan unit BPK yang ada. Antara lain dikemukakan oleh Bapak Abdul Madjid ( mantan kepala Bagian Linmas – Dinas Tibum Kota Banjarmasin ) bahwa :

“Unit BPK yang ada dilingkungan masyarakat mempunyai pengaturan zona pemadaman, untuk wilayah Kecamatan Banjar Timur dan Kecamatan Banjar Selatan kewenangan pemadamannya dibatasi oleh Sungai Martapura. Begitu juga daerah Kecamatan Banjar Barat dan Banjar Utara ditentukan kewenangannya sampai batas Sungai Martapura, namun didalam kenyataannya sistim zona wilayah kewenangan pemadaman kebakaran tidak ditepati. Alasan yang dikemukakan para satuan unit BPK mandiri adalah orang yang akan berbuat baik masa tidak boleh, kalau ada keluarga mereka yang terkena musibah kebakaran “ ( Wawancara dilakukan tanggal 5 Mei 2001).

Hal senada juga disampaikan oleh satuan BPK seperti BPK “Sungai Bilu”; BPK “Hampas B” dan BPK “ Sangga Lima” berkaitan dengan sifat dari pelayanan dan sikap dan perilaku para anggota dimana anggota lainnya berhak untuk memantau rekan/kawannya bila terjadi pelanggaran kode etik para anggota pemadam kebakaran.

Dengan demikian, terlihat sekali bahwa para anggota satuan unit pemadam kebakaran dalam ikut berperan serta pada tingkat gaya kerja tidak terlepas perilaku anggota itu sendiri didalam menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran. Sebagai wujud dari rasa memiliki para anggota telah mempunyai standar yang jelas tentang pelaksanaan tugas sebagai abdi

masyarakat yang sejati ( *prosedur yang tetap /Protap* ) tentang pemadaman kebakaran.

#### 4.3 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran serta

Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri, aspek-aspek sosial ekonomi dan politik yang dapat dilihat yaitu jenis kelamin/sex, usia/umur, tingkat pengetahuan/pendidikan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, kepemilikan rumah dan lama tinggal menetap.

Adapun karakteristik responden pada sampel wilayah penelitian baik untuk responden masyarakat pengguna dan masyarakat tenaga kerja sukarela. Berdasarkan aspek-aspek tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV. 8 dan Tabel IV. 9.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa faktor–faktor yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi peran serta masyarakat baik bagi masyarakat pengguna pada Tahapan Rencana, Tahap Implementasi dan Tahap Evaluasi. Sedangkan para tenaga sukarela dilihat didalam kontek Komunikasi & Inovasi, kontek Tujuan, dan pada Kontek Gaya Kerja. Hal ini didasarkan atas beberapa perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *tabulasi silang* atau *crosstab* dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan *nilai Kai Kuadrat dan Anova*. dan *nilai probabilitas (  $\alpha$  )*:

##### 1. Jenis Kelamin/Sex/Gender

Faktor jenis kelamin akan berpengaruh didalam menentukan seseorang didalam ikut berperan serta. Hal ini, pelibatan seorang pria akan cenderung lebih aktif dari pada wanita, apalagi pelibatan peran serta masyarakat lebih banyak memanfaatkan tenaga yang lebih besar. Sehingga pria cenderung lebih besar dari

**TABEL IV. 8**  
**PROSENTASE RESPONDEN WILAYAH SAMPEL**  
**(KELURAHAN MELAYU - KECAMATAN MELAYU)**  
**KELOMPOK MASYARAKAT PENGGUNA (USER)**

No.	Variabel	Jumlah	Prosentase (%)	No.	Variabel	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Jenis Kelamin						
	- Perempuan	6	12,00	5.	Mata Pencarian		
	- Laki-Laki	44	88,00		- PNS/Pensiun	11	22,00
	Jumlah	50	100,00		- Swasta	15	30,00
					- Non Pegawai	24	48,00
2.	Usia/Umur (tahun)				Jumlah	50	100,00
	< 29	6	12,00				
	30 - 39	15	30,00	6.	Kepemilikan rumah		
	40 - 49	16	32,00		- Pribadi	36	72,00
	50 - 59	8	16,00		- Sewa	9	18,00
	> 60	5	10,00		- Menumpang	5	10,00
	Jumlah	50	100,00		Jumlah	50	100,00
3.	Tingkat Pendidikan			7.	Lama Tinggal		
	- Rendah	6	12,00		< 5 tahun	6	12,00
	- Sedang	34	68,00		5 - 10 tahun	11	22,00
	- Tinggi	10	20,00		> 10 tahun	33	66,00
	Jumlah	50	100,00		Jumlah	50	100,00
4.	Tingkat Pendapatan						
	- Tidak tetap	0	0,00				
	- < 200.000	0	0,00				
	- 201.000-500.000	9	18,00				
	- 501.000-750.000	14	28,00				
	- 751.000-1000.000	19	38,00				
	- > 1000.0000	8	16,00				
	Jumlah	50	100,00				

Sumber : Hasil survei

**TABEL IV.9**  
**PROSENTASE RESPONDEN WILAYAH SAMPEL**  
**(KELURAHAN MELAYU - KECAMATAN MELAYU)**  
**KELOMPOK MASYARAKAT TENAGA SUKA RELAWAN**

No.	Variabel	Jumlah	Prosentase (%)	No.	Variabel	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Jenis Kelamin						
	- Perempuan	0	0,00	5.	Mata Pencaharian		
	- Laki-Laki	50	100,00		- PNS/Pensiun	6	12,00
	Jumlah	50	100,00		- Swasta	20	40,00
					- Non Pegawai	24	48,00
2.	Usia/Umur (tahun)				Jumlah	50	100,00
	< 29	22	44,00				
	30 - 39	14	28,00	6.	Kepemilikan rumah		
	40 - 49	12	24,00		- Pribadi	24	48,00
	50 - 59	2	4,00		- Sewa	9	18,00
	> 60	0	0,00		- Menumpang	17	34,00
	Jumlah	50	100,00		Jumlah	50	100,00
3.	Tingkat Pendidikan			7.	Lama Tinggal		
	- Rendah	10	20,00		< 5 tahun	6	12,00
	- Sedang	34	68,00		5 - 10 tahun	12	24,00
	- Tinggi	6	12,00		> 10 tahun	32	64,00
	Jumlah	50	100,00		Jumlah	50	100,00
4.	Tingkat Pendapatan						
	- Tidak tetap	0	0,00				
	- < 200.000	1	2,00				
	- 201.000-500.000	12	24,00				
	- 501.000-750.000	18	36,00				
	- 751.000-1000.000	15	30,00				
	- > 1000.0000	4	8,00				
	Jumlah	50	100,00				

Sumber : Hasil survei

didalam memberikan sumbangsihnya, walaupun ini tidak selamanya benar bila dibandingkan peran serta wanita Bali serta para wanita aktif lainnya untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Namun didalam pengelolaan unit BPK mandiri yang ada, para responden bila dilihat dari jumlahnya terlihat untuk masyarakat pengguna (user) laki-laki 44 orang atau 88 % dan perempuan 6 orang atau 12 % dan jumlah responden para tenaga sukarela/relawan berjumlah 50 orang atau 100 %. Adapun hasil perhitungan tabulasi silang tentang faktor-faktor yang berpengaruh untuk variabel ini adalah sebagai Berikut :

**Masyarakat Pengguna (User) :**

**a. Pada Tahap Rencana**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Jenis Kelamin/Sex pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 17,693$  dengan probabilitas sebesar 0,001. Oleh karena nilai probabilitas  $0,001(0,1\%) < \text{taraf signifikansi } 0,01 (1\%)$ , maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara jenis kelamin dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana terdapat suatu hubungan yang sangat signifikan dengan arah positif. Keterlibatan responden laki-laki cenderung lebih efektif didalam ikut berperan serta dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin perempuan.

**b. Pada Tahap Implementasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Jenis Kelamin/Sex pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 18,655$  dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas  $0,000(0,0\%) < \text{taraf signifikansi } 0,01 (1\%)$ , maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis

penelitian. Antara jenis kelamin dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi terdapat suatu hubungan yang sangat signifikan dengan arah positif. Keterlibatan responden laki-laki cenderung lebih efektif didalam ikut berperan serta dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin perempuan.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Jenis Kelamin/Sex pada tahap evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 18,406$  dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas  $0,000(0,0\%) < \text{taraf signifikansi } 0,01 (1\%)$ , maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara jenis kelamin dengan peran serta masyarakat pada tahap evaluasi terdapat suatu hubungan yang sangat signifikan dengan arah positif. Keterlibatan responden laki-laki cenderung lebih efektif didalam ikut berperan serta dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin perempuan.

**Tenaga Sukarela / Relawan (Volunter) :**

- a. Tahapan Komunikasi & Inovasi
- b. Tahapan Tujuan
- c. Gaya Kerja

Keterlibatan masyarakat tenaga sukarela mereka pada pengelolaan unit BPK yang ada dikelurahan Melayu berdasarkan jenis kelamin adalah lebih tinggi, sementara ini tenaga sukarela perempuan pada bidang ini belum ada.



## 2. Umur/ Usia

Dilihat dari segi perbedaan usia akan mempengaruhi peran serta masyarakat, terutama dalam masyarakat terdapat perbedaan tentang senioritas dan junior, yang menimbulkan kaum tua dan muda. Sampel responden yang diambil terlihat pada pelibatan masyarakat pengguna dijumpai usia responden yakni usia < 29 tahun berjumlah 6 orang (12 %), usia 30–39 tahun 15 orang (30 %), usia 40–49 tahun 16 orang (32 %), usia 50–59 tahun 8 orang (16 %) dan usia > 60 tahun sebanyak 5 orang (10%). Keterlibatan masyarakat pengguna pada pengelolaan unit BPK mandiri didominasi oleh golongan usia 30–49 tahun sebanyak 31 orang atau 62 %.

Peran serta masyarakat tenaga sukarela/relawan terlihat golongan usia < 29 berjumlah 22 orang atau 44 %, usia 30–39 tahun 14 orang (28 %), usia 40–49 tahun 12 orang (24 %), usia 50–59 tahun 2 orang (4 %) dan diatas usia 60 tahun tidak ada. Hal ini menunjukkan golongan usia yang produktif para tenaga sukarela usia < 29 tahun sampai usia 49 tahun berjumlah 48 orang atau 96 %, sedang usia usia sampai dengan usia 59 tahun 2 orang atau 4 % adalah pengurus/unit ketua BPK sepuh yang sewaktu-waktu bisa membantu dan sebagai motivator bagi anggota lainnya. Adapun hasil perhitungan tabulasi silang untuk variabel ini sebagai berikut :

### **Masyarakat Pengguna (User) :**

#### **a. Tahap Rencana**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Usia pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 8,366$  dengan probabilitas sebesar 0,756. Oleh karena nilai probabilitas 0,756(75.6%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka

inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara usia dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana tidak terdapat suatu hubungan yang signifikan. Antara kelompok umur paling muda dengan kelompok umur paling tua, tidak terdapat suatu perbedaan yang cukup signifikan. Umur seseorang cenderung tidak mempengaruhi peran sertanya pada tahap perencanaan.

b. Tahap Implementasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel usia pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 15,099$  dengan probabilitas sebesar 0,236. Oleh karena nilai probabilitas  $0,236(23,6\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara usia dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi tidak terdapat suatu hubungan yang signifikan. Keterlibatan responden yang lebih tua cenderung tidak berbeda dibandingkan dengan reponden yang berusia lebih muda dalam peran sertanya pada tahap implementasi.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel usia pada tahap evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 8,038$  dengan probabilitas sebesar 0,782. Oleh karena nilai probabilitas  $0,782(78,2\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara usia dengan peran serta masyarakat pada tahap evaluasi tidak terdapat suatu hubungan yang signifikan. Keterlibatan responden yang lebih muda dengan reponden yang berusia lebih tua cenderung tidak berbeda dalam peran sertanya pada tahap evaluasi.

### **Tenaga Sukarela/Relawan ( Volunter ) :**

#### **a. Tahapan Komunikasi & Inovasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel usia pada tahapan komunikasi & inovasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 3,864$  dengan probabilitas sebesar 0,277. Oleh karena nilai probabilitas  $0,277(27,7\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara usia dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Faktor usia responden yang lebih tua dengan yang lebih muda cenderung tidak berbeda didalam ikut berperan serta pada tahap ini.

#### **b. Tahapan Menetapkan Tujuan**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Usia pada tahapan Menetapkan tujuan dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 3,864$  dengan probabilitas sebesar 0,277. Oleh karena nilai probabilitas  $0,277(27,7\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara usia dengan peran serta masyarakat pada tahap menetapkan tujuan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Faktor usia responden yang lebih tua dengan yang lebih muda cenderung tidak berbeda didalam ikut berperan serta pada tahapan ini.

#### **c. Tahapan Gaya Kerja**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Usia pada tahapan Menetapkan Gaya Kerja dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 8,455$  dengan

probabilitas sebesar 0,037. Oleh karena nilai probabilitas  $0,037(3,7\%) < \text{taraf signifikansi } 0,05 (5\%)$ , maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara usia dengan peran serta masyarakat pada tahapan gaya kerja terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Keterlibatan responden yang usia lebih muda cenderung lebih efektif dengan yang lebih tua didalam ikut berperan serta pada tahapan ini.

### **3. Tingkat Pekerjaan/Mata Pencarian**

Dilihat dari segi mata pencarian, dimana penduduk yang mempunyai kesibukan yang sangat akan mempengaruhi kepada pelibatan diri mereka dalam ikut berperan serta dibandingkan dengan masyarakat yang bekerjanya cenderung lebih santai dengan alasan mempunyai waktu yang lebih luang untuk mengikuti aktivitas peran serta.

Didalam pengelolaan unit BPK, responden masyarakat pengguna yang ada mempunyai mata pencarian sebagai pegawai negeri/ pensiunan sebanyak 11 orang (22%), swasta sebanyak 15 orang (30%) dan non pegawai 24 orang (48%). Sedangkan responden dari tenaga sukarela yang bekerja sebagai pegawai negeri/pensiunan sebanyak 6 orang (12%), swasta sebanyak 20 orang (40%) dan yang bermata pencarian non pegawai sebanyak 24 orang (48%). Khususnya para tenaga sukarela sesibuk apapun mereka, bila terjadi musibah kebakaran akan menyempatkan diri untuk berpartisipasi dalam pemadaman.

#### **Masyarakat Pengguna (User) :**

##### **a. Tahap Rencana**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel mata pencarian pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 6,262$  dengan probabilitas

sebesar 0,395. Oleh karena nilai probabilitas  $0,395(39,5\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara mata pencaharian dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana tidak terdapat suatu hubungan yang cukup signifikan, dimana antara kelompok pekerjaan pegawai negeri/pensiun, swasta dan non pegawai, cenderung tidak berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahap perencanaan.

b. Tahap Implementasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel mata pencaharian pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 0,440$  dengan probabilitas sebesar 0,998. Oleh karena nilai probabilitas  $0,998(99,8\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara jenis pekerjaan dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi tidak terdapat suatu hubungan yang cukup signifikan, dimana antara PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai cenderung tidak berbeda secara nyata dalam rangka peran sertanya pada tahap implementasi.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel mata pencaharian pada tahap evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat didalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 8,503$  dengan probabilitas sebesar 0,204. Oleh karena nilai probabilitas  $0,204(20,4\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Pekerjaan dengan peran serta masyarakat pada tahap evaluasi tidak terdapat suatu hubungan yang signifikan, dimana antara PNS/Pensiun, Swasta

dan Non Pegawai cenderung tidak berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahap evaluasi.

**Tenaga Sukarela/Relawan ( Volunter ) :**

**a. Tahapan Komunikasi & Inovasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel mata pencaharian pada tahapan komunikasi & inovasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 11,073$  dengan probabilitas sebesar 0,004. Oleh karena nilai probabilitas  $0,004(0,4\%) <$  taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara jenis pekerjaan dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif, dimana antara Swasta, Non Pegawai cenderung lebih efektif didalam ikut berperan serta pada tahap ini daripada responden yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri/Pensiun.

**b. Tahapan Tujuan**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Jenis Pekerjaan pada tahapan Menetapkan tujuan dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 2,178$  dengan probabilitas sebesar 0,337. Oleh karena nilai probabilitas  $0,337(33,7\%) >$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara jenis dengan peran serta masyarakat pada tahap menetapkan tujuan tidak terdapat hubungan yang signifikan, dimana antara PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai cenderung tidak berbeda didalam ikut berperan serta pada tahapan ini.

c. Tahapan Gaya Kerja

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Jenis Pekerjaan pada tahapan gaya kerja dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 2,178$  dengan probabilitas sebesar 0,337. Oleh karena nilai probabilitas  $0,337(33,7\%) > \text{taraf signifikansi } 0,05 (5\%)$ , maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara jenis pekerjaan dengan peran serta masyarakat pada tahap gaya tidak terdapat hubungan yang signifikan, dimana antara PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai cenderung tidak berbeda didalam ikut berperan serta pada tahapan ini.

4. Tingkat Pendidikan/Pengetahuan

Tingkat pengetahuan akan membedakan seseorang dalam menangkap aspirasi dan perspektif dari pelibatan peran serta masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat, maka akan semakin luas pengetahuan yang diperoleh tentang usaha-usaha peran serta. Dari responden masyarakat pengguna diperoleh data masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi ( lulus akademi dan PT ) sebanyak 10 orang (20 %), pendidikan pada tingkat sedang berjumlah 34 orang (68 %) dan yang pendidikan rendah (s/d lulus SD) 6 orang (12 %). Sedangkan jumlah tenaga sukarela/relawan terlihat bahwa yang mempunyai pendidikan tinggi berjumlah 6 orang (12 %), berpendidikan sedang sebanyak 34 orang (68%) dan rendah sebanyak 10 orang (20 %). Perhitungan tabulasi silang faktor ini terhadap faktor-faktor berikut :

**Masyarakat Pengguna (User) :**

a. Tahap Rencana

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pendidikan pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 38,711$  dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendidikan dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana terdapat suatu hubungan yang signifikan dengan arah hubungan positif. Responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih efektif didalam didalam mempengaruhi peran sertanya pada tahap perencanaan.

b. Tahap Implementasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pendidikan pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 20,878$  dengan probabilitas sebesar 0,002. Oleh karena nilai probabilitas 0,002(0,2%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara tingkat pendidikan dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi terdapat suatu hubungan yang signifikan dengan arah hubungan yang positif. Responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih efektif didalam didalam mempengaruhi peran sertanya pada tahap implemnetasi.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pendidikan pada tahap Evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 35,365$  dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara



tingkat pendidikan dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi terdapat suatu hubungan yang signifikan dengan arah hubungan yang positif. Responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih efektif didalam didalam mempengaruhi peran sertanya pada tahap evaluasi.

**Tenaga Sukarela/Relawan ( Volunter ) :**

**a. Tahapan Komunikasi & Inovasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingka Pendidikan pada tahapan komunikasi & inovasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 12,121$  dengan probabilitas sebesar 0,002. Oleh karena nilai probabilitas 0,002(0,2%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendidikan dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih efektif didalam didalam mempengaruhi peran sertanya pada tahap komunikasi & inovasi.

**b. Tahapan Tujuan**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendidikan pada tahapan Menetapkan tujuan dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 6,917$  dengan probabilitas sebesar 0.031. Oleh karena nilai probabilitas 0.031 (3.1%) < taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendidikan dengan peran serta masyarakat pada tahap menetapkan tujuan terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih efektif didalam mempengaruhi peran sertanya pada tahap menetapkan tujuan – tujuan.

c. Tahapan Gaya Kerja

Hasil tabulasi sialng menunjukan hubungan variabel Tingkat Pendidikan pada tahapan gaya kerja dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 0,686$  dengan probabilitas sebesar 0,710. Oleh karena nilai probabilitas 0,710 (71,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendidikan dengan peran serta masyarakat pada tahap gaya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah cenderung tidak berbeda peran sertanya pada tahap gaya kerja dalam pengelolaan unit BPK mandiri.

## 5. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan akan mempengaruhi seseorang untuk ikut berperan serta, dimana masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan lebih suka menyumbangkan uang daripada masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah. Orang yang mempunyai tingkatan pendapatan rendah lebih cenderung melibatkan diri dari segi tenaga saja.

Dari jumlah responden masyarakat pengguna pada pengelolaan unit BPK mandiri terlihat yang mempunyai tingkat pendapatan Rp.201.000-500.000 sebanyak 9 orang (18 %), berpendapatan Rp. 501.000-750.000 sebanyak 14 orang (28 %), berpendapatan Rp.751.000-1.000.000 sebanyak 19 orang (38 %) dan yang berpenghasilan > Rp.1.000.000 sebanyak 8 orang (16 %). Sedangkan para tenaga kerja sukarela/relawan yang mempunyai tingkat pendapatan yang beragam dari yang berpendapatan  $\leq$  Rp.200.000 sebanyak 1 orang (2 %), berpendapatan Rp.201.000-500.000 sebanyak 12 orang (24 %), berpendapatan Rp.501.000-750.000 sebanyak 18 orang (36 %), antara Rp.751.000-1.000.000

sebanyak 15 orang (30 %) dan mereka yang berpenghasilan > Rp.1.000.000 sebanyak 4 orang (8%).

#### **Masyarakat Pengguna (User) :**

##### **a. Tahap Rencana**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendapatan pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 23.198$  dengan probabilitas sebesar 0,006. Oleh karena nilai probabilitas 0,006 (0,6%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendapatan dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana terdapat suatu hubungan yang signifikan dengan arah hubungan positif. Responden yang berpendapatan tinggi cenderung lebih efektif daripada yang mempunyai tingkat pendapatan rendah didalam peran sertanya pada tahap perencanaan.

##### **b. Tahap Implementasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendapatan pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 17,467$  dengan probabilitas sebesar 0,042. Oleh karena nilai probabilitas 0,042 (4,2%) < taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendapatan dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi terdapat suatu hubungan yang signifikan dengan arah hubungan yang positif. Responden berpendapatan tinggi cenderung lebih efektif daripada tingkat pendapatan rendah didalam peran sertanya pada tahap implementasi.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendapatan pada tahap Evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 26,077$  dengan probabilitas sebesar 0,002. Oleh karena nilai probabilitas 0,002 (0,2 %) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara tingkat pendapatan dengan peran serta masyarakat pada tahap evaluasi terdapat suatu hubungan yang signifikan dengan arah hubungan yang positif. Responden berpendapatan tinggi cenderung lebih efektif didalam didalam mempengaruhi peran sertanya pada tahap evaluasi.

**Tenaga Sukarela/Relawan ( Volunter ) :**

a. Tahapan Komunikasi & Inovasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendapatan pada tahapan komunikasi & inovasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 14,556$  dengan probabilitas sebesar 0,006. Oleh karena nilai probabilitas 0,006 (0,6%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendapatan dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Responden yang berpendapatan tinggi cenderung lebih efektif didalam peran sertanya pada tahap komunikasi & inovasi.

b. Tahapan Tujuan

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendapatan pada tahapan Menetapkan tujuan dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 9,573$  dengan

probabilitas sebesar 0.048. Oleh karena nilai probabilitas 0.048 (4,8%) < taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendapatan dengan peran serta masyarakat pada tahap menetapkan tujuan terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Responden yang berpendapatan tinggi cenderung lebih efektif didalam didalam peran sertanya pada tahap menetapkan tujuan – tujuan.

c. Tahapan Gaya Kerja

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendapatan pada tahapan gaya kerja dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 5,856$  dengan probabilitas sebesar 0,210. Oleh karena nilai probabilitas 0,210 (21,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Tingkat Pendapatan dengan peran serta masyarakat pada tahap gaya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden berpendapatan tinggi dengan pendapatan rendah cenderung tidak berbeda peran sertanya pada tahap gaya kerja dalam pengelolaan unit BPK mandiri.

## 6. Kepemilikan rumah

Didalam pengelolaan pemadam kebakaran yang ada dilingkungan masyarakat akan dipengaruhi juga oleh kepemilikan rumah. Sebab kepemilikan rumah menyebabkan masyarakat akan menjaga kondisi lingkungan mereka, terutama pada kondisi lingkungan yang dapat memudahkan terjadinya kebakaran.

Dari hasil survai yang dilakukan terhadap sejumlah responden, responden masyarakat pengguna didapati kepemilikan rumah sendiri/pribadi sebanyak 36 orang (72 %), menyewa sebanyak 9 orang (18 %), sedangkan yang menumpang sebanyak 5 orang (10 %). Para tenaga sukarela/relawan yang mempunyai rumah

pribadi sebanyak 24 orang (48%), menyewa sebanyak 9 orang (18%) dan yang menumpang sebanyak 17 orang (34%).

Terlihat dominasi dari kepemilikan rumah adalah rumah pribadi dan menumpang, mereka yang menumpang pada peran serta para tenaga relawan/sukarela adalah menumpang pada keluarga/orang tua mereka.

#### **Masyarakat Pengguna (User) :**

##### **a. Tahap Rencana**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pemilikan Rumah pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 7,976$  dengan probabilitas sebesar 0,240. Oleh karena nilai probabilitas 0,240 (24%) > taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Kepemilikan Rumah dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang memiliki rumah sendiri dengan responden yang menyewa dan menumpang cenderung tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam rangka peran sertanya pada tahap rencana.

##### **b. Tahap Implementasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pendidikan pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 9,031$  dengan probabilitas sebesar 0,172. Oleh karena nilai probabilitas 0,172 (17,2%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Kepemilikan Rumah dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang memiliki rumah

sendiri dengan responden yang menyewa dan menumpang cenderung tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam rangka peran sertanya pada tahap implementasi.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pendidikan pada tahap Evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 15,317$  dengan probabilitas sebesar 0,018. Oleh karena nilai probabilitas 0,018 (1,8 %) < taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menerima hipotesis penelitian. Antara Kepemilikan Rumah dengan peran serta masyarakat pada tahap evaluasi terdapat hubungan yang cukup signifikan. Responden yang memiliki rumah sendiri cenderung lebih efektif apabila dibandingkan dengan responden yang menyewa dan menumpang dalam rangka peran sertanya pada tahap evaluasi.

**Tenaga Sukarela/Relawan ( Volunter ) :**

a. Tahapan Komunikasi & Inovasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Pemilikan Rumah pada tahapan komunikasi & inovasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 2,338$  dengan probabilitas sebesar 0,327. Oleh karena nilai probabilitas 0,327 (32,7%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Kepemilikan Rumah dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan. Responden yang memiliki rumah pribadi menyewa/kontrak dan menumpang tidak berbeda secara signifikan didalam peran sertanya pada tahap komunikasi & inovasi.

b. Tahapan Tujuan

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Tingkat Pendidikan pada tahapan Menetapkan tujuan dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 5,612$  dengan probabilitas sebesar 0.060. Oleh karena nilai probabilitas 0.060 (6,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Kepemilikan Rumah dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan. Responden yang memiliki rumah pribadi, menyewa/kontrak dan menumpang tidak berbeda secara signifikan didalam peran sertanya pada tahap menetapkan tujuan-tujuan.

c. Tahapan Gaya Kerja

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Kepemilikan rumah pada tahapan gaya kerja dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 2,631$  dengan probabilitas sebesar 0,263. Oleh karena nilai probabilitas 0,263 (26,3%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara Kepemilikan Rumah dengan peran serta masyarakat pada tahap gaya kerja volunteer tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan. Responden yang memiliki rumah pribadi menyewa/kontrak dan menumpang tidak berbeda secara signifikan didalam peran sertanya pada tahapan gaya kerja tenaga volunteer.

7. Lama Tinggal /menetap

Menetapnya seseorang disuatu tempat juga akan ikut mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peran serta. Makin lama seseorang,



menjadikan masyarakat akan menyatu dengan lingkungannya dan rasa memiliki lingkungan rumahnya semakin besar.

Dari tabel tersebut, diatas terlihat jumlah responden masyarakat pengguna (user) yang menetap < 5 tahun sebanyak 6 orang (12%), antara 5–10 tahun sebanyak 11 orang (22 %) dan > 10 tahun sebanyak 33 orang (66 %). Para tenaga kerja sukarela/relawan yang telah mana menetap pada kawasan/lingkungan mereka adalah < 5 tahun sebanyak 6 orang (12 %), antara 5–10 tahun sebanyak 11 orang (22 %) dan yang menetap lebih dari 10 tahun sebanyak 32 orang (64 %).

Jadi terlihat lama tinggal lebih dari 10 tahun baik dari masyarakat pengguna dan para tenaga kerja sukarela/relawan yang dominan dalam mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat.

#### **Masyararakat Pengguna (User) :**

##### **a. Tahap Rencana**

Hasil tabulasi silang menunjukan hubungan variabel Lama Tinggal/menetap pada tahap Rencana dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 9,031$  dengan probabilitas sebesar 0,172. Oleh karena nilai probabilitas 0,172 (17,2%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara lama tinggal/menetap dengan peran serta masyarakat pada tahap rencana tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang lama menetap > 10 tahun dengan responden kurang dari 5 tahun cenderung tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam rangka peran sertanya pada tahap perencanaan.

##### **b. Tahap Implementasi**

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Lama tinggal/Menetap pada tahap implementasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 7,581$  dengan probabilitas sebesar 0,270. Oleh karena nilai probabilitas 0,270 (27,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara tingkat lama tinggal dengan peran serta masyarakat pada tahap implementasi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang lama menetap > 10 tahun dengan responden kurang dari 5 tahun cenderung tidak berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahap implementasi.

c. Tahap Evaluasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Lama Tinggal pada tahap Evaluasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 7,190$  dengan probabilitas sebesar 0,304. Oleh karena nilai probabilitas 0,304 (30,4%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara tingkat lama tinggal dengan peran serta masyarakat pada tahap evaluasi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang lama menetap > 10 tahun dengan responden kurang dari 5 tahun cenderung tidak ada berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahap evaluasi.

**Tenaga Sukarela/Relawan ( Volunter ) :**

a. Tahapan Komunikasi & Inovasi

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Lama Tinggal pada tahapan komunikasi & inovasi dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 1,426$  dengan

probabilitas sebesar 0,490. Oleh karena nilai probabilitas 0,490 (49,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara tingkat lama tinggal dengan peran serta masyarakat pada tahap komunikasi & inovasi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Responden yang lama menetap > 10 tahun dengan responden kurang dari 5 tahun cenderung tidak berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahap komunikasi & inovasi.

b. Tahapan Tujuan

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Lama Tinggal pada tahapan Menetapkan tujuan dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 0,453$  dengan probabilitas sebesar 0.797. Oleh karena nilai probabilitas 0.797 (79,7%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara tingkat lama tinggal dengan peran serta masyarakat pada tahap menetapkan tujuan tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan. Responden yang menetap > 10 tahun dengan responden kurang dari 5 tahun cenderung tidak berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahapan penetapan tujuan- tujuan.

c. Tahapan Gaya Kerja

Hasil tabulasi silang menunjukkan hubungan variabel Lama Tinggal pada tahapan gaya kerja dalam efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri adalah nilai chi-square  $(\chi^2)_h = 1,866$  dengan probabilitas sebesar 0,393. Oleh karena nilai probabilitas 0,393 (39,3%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil ialah menolak hipotesis penelitian. Antara tingkat lama tinggal dengan peran serta masyarakat pada tahap

menetapkan tujuan tidak terdapat hubungan yang cukup signifikan. Responden yang menetap > 10 tahun dengan responden kurang dari 5 tahun cenderung tidak berbeda dalam rangka peran sertanya pada tahapan penentuan gaya kerja pengelolaan unit BPK mandiri.

Adapun keterlibatan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik pengaruh dari sosial, ekonomi dan pengaruh politik. Adapun pengaruh-pengaruh yang terjadi, dilihat dari aspek-aspek yang tersebut diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.10 dan Tabel V.11.

Untuk menunjang penjelasan dari perhitungan Kai Kuadrat untuk lebih mempertegas pelibatan masyarakat didalam ikut berperan serta dalam pengelolaan unit BPK mandiri ditinjau dari Analisis Of Variance (ANOVA), yang diketahui dari besarnya degree of freedom (DF), sum square (SS), mean square (MS) untuk antar perlakuan, error, dan totalnya serta menentukan besarnya ratio F setiap faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas peran serta masyarakat kemudian dilihat juga perbedaan antar elemen /faktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dapat pada tabel IV.12 dan IV.13. Penjelasan tabel tersebut adalah :

#### **1. Lingkup Peran serta Masyarakat Pengguna (User)**

- Tahap Rencana
  - Jenis Kelamin dengan  $F = 23,343$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0 %) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil adalah menolak hipotesis. Perbedaan antara responden laki-laki dan perempuan dalam peran sertanya pada tahap rencana cukup signifikan.
  - Usia / umur diperoleh  $F = 0,966$  dengan probabilitas 0,435. Probabilitas 0,435 (43,5%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan usia responden

**TABEL IV. 10**  
RANGKUMAN VARIABEL YANG BERPENGARUH  
PADA PENGELOLAAN UNIT BPK MANDIRI  
PERAN SERTA MASYARAKAT PENGGUNA/USER

Variabel Pengaruh	Tahap Rencana			Tahap Implementasi			Tahap Evaluasi		
	Kai Kuadrat	Probabilitas	Signifikansi	Kai Kuadrat	Probabilitas	Signifikansi	Kai Kuadrat	Probabilitas	Signifikansi
Jenis Kelamin	17,693	0,001	0,01(1%) Signifikan	18,655	0,000	0,01(1%) Signifikan	18,406	0,000	0,01(1%) Signifikan
Usia/Umur	8,366	0,756	0,05(5%) tdk Signifikan	15,099	0,236	0,05(5%) tdk Signifikan	8,036	0,782	0,05(5%) tdk Signifikan
Pendidikan	38,711	0,000	0,01(1%) Signifikan	20,878	0,002	0,01(1%) Signifikan	35,366	0,000	0,01(1%) Signifikan
Pendapatan	6,262	0,396	0,05(5%) tdk Signifikan	0,44	0,998	0,05(5%) tdk Signifikan	8,503	0,204	0,05(5%) tdk Signifikan
Mata Pencarian	23,198	0,006	0,01(1%) Signifikan	17,467	0,042	0,05(5%) Signifikan	26,077	0,002	0,01(1%) Signifikan
Kepemilikan rumah	7,976	0,240	0,05(5%) tdk Signifikan	9,031	0,172	0,05(5%) tdk Signifikan	15,317	0,018	0,05(5%) Signifikan
Lama Tinggal Menetap	9,031	0,172	0,05(5%) tdk Signifikan	7,581	0,270	0,05(5%) tdk Signifikan	7,190	0,304	0,05(5%) tdk Signifikan

Sumber : Hasil Analisis

**TABEL IV. 11**  
RANGKUMAN VARIABEL YANG BERPENGARUH  
PADA PENGELOLAAN UNIT BPK MANDIRI  
PERAN SERTA MASYARAKAT TENAGA SUKARELA/RELAWAN

Variabel Pengaruh	Tahap Komunikasi & Inovasi			Tahap Menetapkan Tujuan			Tahap Gaya Kerja		
	Kai Kuadrat	Probabilitas	Signifikansi	Kai Kuadrat	Probabilitas	Signifikansi	Kai Kuadrat	Probabilitas	Signifikansi
Usia/Umur	8,864	0,277	0,05(5%) Tdk Signifikan	8,864	0,277	0,05(5%) Tdk Signifikan	8,455	0,037	0,05(5%) Signifikan
Pendidikan	12,121	0,002	0,01(1%) Signifikan	6,917	0,031	0,01(1%) Signifikan	0,686	0,710	0,05(5%) tdk signifikan
Pendapatan	14,556	0,006	0,01(1%) Signifikan	9,573	0,048	0,05(5%) Tdk Signifikan	6,856	0,210	0,05(5%) Tdk Signifikan
Mata Pencarian	11,073	0,004	0,01(1%) Signifikan	2,178	0,337	0,05(5%) Tdk Signifikan	2,178	0,337	0,05(5%) tdk signifikan
Kepemilikan rumah	2,338	0,327	0,05(5%) Tdk Signifikan	5,612	0,060	0,05(5%) Tdk Signifikan	2,631	0,263	0,05(5%) Tdk Signifikan
Lama Tinggal Menetap	1,426	0,490	0,05(5%) Tdk Signifikan	0,453	0,747	0,05(5%) Tdk Signifikan	1,866	0,393	0,05(5%) Tdk Signifikan

Sumber : Hasil Analisis

**TABEL IV. 12**  
**RANGKUMAN VARIABEL YANG BERPENGARUH**  
 (Untuk Menguji Perbedaan Antar Elemen Setiap Faktor)  
**PADA PENGELOLAAN UNIT BPK MANDIRI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT PENGGUNA/USER**

Variabel Pengaruh	Tahap Rencana			Tahap Implementasi			Tahap Evaluasi		
	Uji F	Probabilitas	Signifikansi	Uji F	Probabilitas	Signifikansi	Uji F	Probabilitas	Signifikansi
Jenis Kelamin	23,343	0,000	0,01(1%) Signifikan	18,549	0,000	0,01(1%) Signifikan	22,902	0,000	0,01(1%) Signifikan
Usia/Umur	0,966	0,435	0,05(5%) tdk Signifikan	0,851	0,501	0,05(5%) tdk Signifikan	0,441	0,778	0,05(5%) tdk Signifikan
Pendidikan	16,242	0,000	0,01(1%) Signifikan	12,707	0,000	0,01(1%) Signifikan	17,027	0,000	0,01(1%) Signifikan
Pendapatan	10,572	0,000	0,01(1%) Signifikan	6,239	0,003	0,01(1%) Signifikan	7,562	0,000	0,01(1%) Signifikan
Mata Pencarian	0,146	0,864	0,05(5%) tdk Signifikan	0,057	0,945	0,05(5%) tdk Signifikan	0,062	0,94	0,05(5%) tdk Signifikan
Kepemilikan rumah	2,767	0,073	0,05(5%) tdk Signifikan	3,110	0,054	0,05(5%) tdk Signifikan	2,392	0,103	0,05(5%) tdk Signifikan
Lama Tinggal Menetap	0,083	0,921	0,05(5%) tdk Signifikan	0,483	0,620	0,05(5%) tdk Signifikan	0,553	0,579	0,05(5%) tdk Signifikan

Sumber : Hasil Analisis

**TABEL IV. 13**  
**RANGKUMAN VARIABEL YANG BERPENGARUH**  
 (Untuk Menguji Perbedaan Antar Elemen Setiap Faktor)  
**PADA PENGELOLAAN UNIT BPK MANDIRI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT TENAGA SUKARELA/RELAWAN**

Variabel Pengaruh	Tahap Komunikasi & Inovasi			Tahap Menetapkan Tujuan			Tahap Gaya Kerja		
	Uji F	Probabilitas	Signifikansi	Uji F	Probabilitas	Signifikansi	Uji F	Probabilitas	Signifikansi
Usia/Umur	2,807	0,050	0,05(5%) Signifikan	1,195	0,322	0,05(5%) Tdk Signifikan	1,843	0,153	0,05(5%) tdk signifikan
Pendidikan	12,185	0,000	0,01(1%) Signifikan	1,268	0,291	0,05(5%) Tdk Signifikan	1,942	0,155	0,05(5%) tdk signifikan
Pendapatan	5,239	0,003	0,01(1%) Signifikan	10,572	0,000	0,01(1%) signifikan	7,562	0,000	0,01(1%) signifikan
Mata Pencarian	6,141	0,004	0,01(1%) Signifikan	0,974	0,385	0,05(5%) Tdk Signifikan	2,434	0,099	0,05(5%) tdk signifikan
Kepemilikan rumah	2,854	0,062	0,05(5%) Tdk Signifikan	1,100	0,341	0,05(5%) Tdk Signifikan	1,013	0,371	0,05(5%) Tdk Signifikan
Lama Tinggal Menetap	0,039	0,962	0,05(5%) Tdk Signifikan	0,101	0,904	0,05(5%) Tdk Signifikan	0,774	0,467	0,05(5%) Tdk Signifikan

Sumber : Hasil Analisis

yang muda dan tua tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap rencana.

- Tingkat Pekerjaan diperoleh  $F=0,146$  dengan probabilitas 0,864. Probabilitas 0,846 (84,6%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara Responden yang mempunyai pekerjaan PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai tidak ada perbedaan secara nyata peran sertanya pada tahap rencana.
- Tingkat pendidikan diperoleh  $F=16,242$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (5%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendidikan tinggi secara nyata ada perbedaan dengan pendidikan sedang dan rendah. Sedangkan pendidikan sedang dan rendah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta mereka pada tahap rencana.
- Tingkat Pendapatan  $F=10,572$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendapatan antara Rp.501.000 s/d Rp.1 juta tidak ada yang berbeda secara nyata. Sedangkan responden yang berpenghasilan Rp.201.000 s/d Rp.500.000 berbeda secara nyata responden yang berpenghasilan di atasnya.
- Kepemilikan rumah diperoleh  $F=2,767$  dengan probabilitas 0,073. Probabilitas 0,073 (7,3%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang memiliki rumah sendiri, menumpang dan menyewa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap rencana.

- Lama Tinggal diperoleh  $F=0,083$  dengan probabilitas 0,921. Probabilitas 0,921 (92,1%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang menetap lebih dari 10 tahun dengan responden yang menetap 5–10 tahun dan kurang 5 tahun tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap rencana.
- Tahap Implementasi
  - Jenis Kelamin dengan  $F= 18,549$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0 %) < taraf signifikansi 0,01( 1%), maka inferensi yang diambil adalah menolak hipotesis. Perbedaan antara responden laki-laki dan perempuan dalam peran sertanya pada tahap implementasi berbeda cukup signifikan pada tahap implementasi.
  - Usia / umur diperoleh  $F=0,851$  dengan probabilitas 0,501. Probabilitas 0,501 (50,1%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan usia responden yang muda dan tua tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap implementasi
  - Tingkat Pekerjaan diperoleh  $F=0,057$  dengan probabilitas 0,945. Probabilitas 0,945 (84,6%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara Responden yang mempunyai pekerjaan PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai tidak ada perbedaan secara nyata peran sertanya pada tahap implementasi
  - Tingkat pendidikan diperoleh  $F=12,707$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (5%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendidikan



tinggi secara nyata ada perbedaan dengan pendidikan sedang dan rendah. Sedangkan pendidikan sedang dan rendah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta mereka pada tahap implementasi.

- Tingkat Pendapatan  $F=5,239$  dengan probabilitas 0,003. Probabilitas 0,003 (0,3%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendapatan antara Rp.501.000 s/d Rp.1 juta tidak ada yang berbeda secara nyata. Sedangkan responden yang berpenghasilan Rp.201.000 s/d Rp.500.000 berbeda secara nyata dengan responden yang berpenghasilan di atasnya.
- Kepemilikan rumah diperoleh  $F=3,110$  dengan probabilitas 0,054. Probabilitas 0,054 (5,4%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang memiliki rumah sendiri, menumpang dan menyewa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap implementasi.
- Lama Tinggal diperoleh  $F=0,483$  dengan probabilitas 0,620. Probabilitas 0,620 (62,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang menetap lebih dari 10 tahun dengan responden yang menetap 5 – 10 tahun dan kurang 5 tahun tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap implementasi.
- Tahap Evaluasi
  - Jenis Kelamin dengan  $F= 22,902$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0 %) < taraf signifikansi 0,01( 1%), maka inferensi yang diambil

adalah menolak hipotesis. Perbedaan antara responden laki-laki dan perempuan dalam peran sertanya pada tahap evaluasi cukup signifikan.

- Usia / umur diperoleh  $F=0,441$  dengan probabilitas 0,778. Probabilitas 0,778 (77,8%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan usia responden yang muda dan tua tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap evaluasi.
- Tingkat Pekerjaan diperoleh  $F=0,062$  dengan probabilitas 0,940. Probabilitas 0,940 (94,0%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara Responden yang mempunyai pekerjaan PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai tidak ada perbedaan secara nyata peran sertanya pada tahap evaluasi.
- Tingkat pendidikan diperoleh  $F=17,027$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (5%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendidikan tinggi secara ada perbedaan dengan pendidikan sedang dan rendah. Sedangkan pendidikan sedang dan rendah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta mereka pada tahap evaluasi.
- Tingkat Pendapatan  $F=7,562$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendapatan antara Rp.501.000 s/d Rp.1 juta tidak ada yang berbeda secara nyata. Sedangkan responden yang berpenghasilan Rp.201.000 s/d Rp.500.000 berbeda secara dengan responden yang berpenghasilan diatasnya.

- Kepemilikan rumah diperoleh  $F=2,767$  dengan probabilitas 0,103. Probabilitas 0,103 (10,3%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang memiliki rumah sendiri, menumpang dan menyewa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap evaluasi.
- Lama Tinggal diperoleh  $F=0,553$  dengan probabilitas 0,579. Probabilitas 0,579 (57,2%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang menetap lebih dari 10 tahun dengan responden yang menetap 5 – 10 tahun dan kurang 5 tahun tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap evaluasi.

## 2. Lingkup Tenaga Sukarela/Relawan

- Tahap Komunikasi dan Inovasi
  - Usia / umur diperoleh  $F=2,807$  dengan probabilitas 0,050. Probabilitas 0,050 (5,0%)  $\leq$  taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan usia responden yang muda dan tua terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap komunikasi & inovasi
  - Tingkat Pekerjaan diperoleh  $F=6,141$  dengan probabilitas 0,004. Probabilitas 0,004 (0,4%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara responden yang mempunyai pekerjaan PNS/Pensiun dengan Swasta dan Non Pegawai ada perbedaan secara nyata peran sertanya pada tahap komunikasi dan inovasi
  - Tingkat pendidikan diperoleh  $F=12,185$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi

yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendidikan tinggi secara nyata ada perbedaan dengan pendidikan sedang dan rendah. Sedangkan pendidikan sedang dan rendah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta mereka pada tahap komunikasi & inovasi.

- Tingkat Pendapatan  $F=10,572$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendapatan antara Rp.501.000 s/d Rp.1 juta tidak ada yang berbeda secara nyata. Sedangkan responden yang berpenghasilan Rp.201.000 s/d Rp.500.000 berbeda secara dengan responden yang berpenghasilan diatasnya.
- Kepemilikan rumah diperoleh  $F=2,954$  dengan probabilitas 0,062. Probabilitas 0,062 (6,2%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang memiliki rumah sendiri,menumpang dan menyewa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap komunikasi & inovasi
- Lama Tinggal diperoleh  $F=0,039$  dengan probabilitas 0,962. Probabilitas 0,962 (96,2%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang menetap lebih dari 10 tahun dengan responden yang menetap 5–10 tahun dan kurang 5 tahun tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap rencana.

- Tahap Menentukan Tujuan-tujuan

- Usia / umur diperoleh  $F=1,195$  dengan probabilitas 0,322. Probabilitas 0,322 (32,2%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan usia responden yang muda dan tua tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap menetapkan tujuan.
- Tingkat Pekerjaan diperoleh  $F=0,974$  dengan probabilitas 0,385. Probabilitas 0,385 (38,5%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara Responden yang mempunyai pekerjaan PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai tidak ada perbedaan secara nyata peran sertanya pada tahap menetapkan tujuan.
- Tingkat pendidikan diperoleh  $F=1,268$  dengan probabilitas 0,291. Probabilitas 0,291 (29,1%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan pendidikan tinggi secara nyata tidak ada perbedaan dengan pendidikan sedang dan rendah. Sedangkan pendidikan sedang dan rendah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta mereka pada tahap menetapkan tujuan.
- Tingkat Pendapatan diperoleh  $F=10,572$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendapatan antara Rp.501.000 s/d Rp.1 juta tidak ada yang berbeda secara nyata. Sedangkan responden yang berpenghasilan Rp.201.000 s/d Rp.500.000 berbeda secara nyata dengan responden yang berpenghasilan di atasnya.

- Kepemilikan rumah diperoleh  $F=1,100$  dengan probabilitas 0,341. Probabilitas 0,341 (34,1%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang memiliki rumah sendiri, menumpang dan menyewa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap menetapkan tujuan.
- Lama Tinggal diperoleh  $F=0,101$  dengan probabilitas 0,904. Probabilitas 0,904 (90,4%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang menetap lebih dari 10 tahun dengan responden yang menetap 5–10 tahun dan kurang 5 tahun tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap menetapkan tujuan.
- Tahapan Gaya Kerja
  - Usia / umur diperoleh  $F=1.843$  dengan probabilitas 0,153. Probabilitas 0,153 (15,3%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan usia responden yang muda dan tua tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap gaya kerja para volunteer.
  - Tingkat Pekerjaan diperoleh  $F=2,434$  dengan probabilitas 0,099. Probabilitas 0,099 (9,9%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara Responden yang mempunyai pekerjaan PNS/Pensiun, Swasta dan Non Pegawai tidak ada perbedaan secara nyata peran sertanya pada tahap gaya kerja para volunteer.

- Tingkat pendidikan diperoleh  $F=1,942$  dengan probabilitas 0,155. Probabilitas 0,155 (15,5%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara golongan pendidikan tinggi secara nyata tidak ada perbedaan dengan pendidikan sedang dan rendah dalam peran serta mereka pada tahap gaya kerja.
- Tingkat Pendapatan  $F=10,572$  dengan probabilitas 0,000. Probabilitas 0,000 (0%) < taraf signifikansi 0,01 (1%), maka inferensi yang diambil menolak hipotesis penelitian. Antara golongan pendapatan antara Rp.501.000 s/d Rp.1 juta tidak ada yang berbeda secara nyata. Sedangkan responden yang berpenghasilan Rp.201.000 s/d Rp.500.000 berbeda secara dengan responden yang berpenghasilan diatasnya.
- Kepemilikan rumah diperoleh  $F=1,013$  dengan probabilitas 0,371. Probabilitas 0,371 (37,1%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang memiliki rumah sendiri, menumpang dan menyewa tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap gaya kerja para volunteer
- Lama Tinggal diperoleh  $F=0,774$  dengan probabilitas 0,467. Probabilitas 0,467 (46,7%) > taraf signifikansi 0,05 (5%), maka inferensi yang diambil menerima hipotesis penelitian. Antara responden yang menetap lebih dari 10 tahun dengan responden yang menetap 5 – 10 tahun dan kurang 5 tahun tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam peran serta pada tahap gaya kerja volunteer.

#### **4.4 Temuan Studi**

##### **4.4.1 Lingkup Spatial Kota Banjarmasin**

1. Kelurahan yang terbanyak mengalami musibah kebakaran adalah Kelurahan Kertak Baru Ulu–Kecamatan Banjar Barat sebanyak 11 dari tahun 1995-2000 dan mempunyai kerapatan bangunan rata-rata sebesar 23,9 bangunan/ha serta termasuk pada kerapatan bangunan sedang. Sedangkan daerah dengan kerapatan bangunan yang relatif kecil yakni Kelurahan Mantuil terjadi kebakaran sebanyak satu kali selama periode tersebut. Namun pada kerapatan yang besar yakni Kelurahan Kelayan Dalam dengan kerapatan 136,44 bangunan/ha dalam periode tahun 1995–2000, pada daerah tersebut tidak pernah terjadi kebakaran.
2. Frekuensi kejadian kebakaran yang menimpa Kota Banjarmasin selama periode tahun 1995-2000 pada dua musim yakni musim kemarau (bulan April s/d Oktober) sebanyak 75 kali kejadian (52,08 %) dan musim penghujan (bulan Nopember s/d Maret) 69 kali kejadian (47,92 %), tidak ada perbedaan yang sangat mencolok kejadian kebakaran pada kedua musim tersebut.
3. Sebaran posko pemadam kebakaran (BPK) mandiri tidak merata pada setiap kelurahan. Hal ini disebabkan oleh karena keberadaan posko pemadam kebakaran mandiri terbentuk dari kondisi fisik dan lingkungan pemukiman penduduk seperti bangunan yang terbuat dari konstruksi kayu, kerapatan bangunan yang tinggi, kepadatan penduduk yang besar serta aksesibilitas yang sulit dan sempit serta pengalaman pemukiman mereka pernah terbakar.
4. Unit Pemadam Kebakaran milik pemerintah kota Banjarmasin, yang dimiliki pada saat ini sedang dalam rangka untuk dilimpahkan pengelolaannya pada unit-unit BPK mandiri. Pelimpahan pengelolaan kepada pihak kedua dengan ketentuan mampu untuk membiayai operasional dan pemeliharaannya, baik untuk tenaga kerja maupun pemeliharaan alat-alat pemadam yang diserahkan. Pelimpahan



pengelolaan ini dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran di kota Banjarmasin.

5. Sistem operasional unit-unit pemadam kebakaran (BPK) mandiri setiap melayani pelayanan pemadam kebakaran berpola pada “ *sistim kerubut* “ ( bahasa Banjar ) atau melakukan pemadaman secara bersama-sama dengan unit BPK lainnya dan air yang digunakan untuk pemadaman api dicari dilokasi kejadian kebakaran.

#### 4.4.2 Lingkup Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit pemadam kebakaran (BPK) mandiri dapat disimpulkan bahwa :

##### 1. Masyarakat Pengguna (User)

- Tahap rencana : Peran serta pada tahap ini masyarakat yang mempunyai nilai sedang sampai dengan sangat efektif adalah 46 orang atau 92 %. Sehingga masyarakat pada tahap ini mempunyai kewenangan untuk memutuskan rencana yang disusun. Partisipasi warga masyarakat, pada tahapan rencana ini perlu dipandang sebagai wacana untuk mengetahui bentuk keikutsertaan secara aktif dan rasa memiliki agar perkembangan unit BPK mandiri tidak tersendat dan mati karena tidak adanya perhatian warga.
- Tahap Implementasi : Peran serta pada tahap implementasi bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut yang mempunyai nilai efektivitas sedang sampai sangat efektif adalah 46 orang atau 92 %. Sehingga pada tahapan implementasi ini peran serta masyarakat dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Partisipasi warga masyarakat didalam tahap ini sebenarnya sebagai bentuk perwujudan dari rencana-rencana yang telah disetujui dalam forum komunikasi lingkungan berupa tenaga, pikiran, dan finansial. Derajat partisipasi dalam tahapan ini tergantung pada masing-

masing warga masyarakat, namun bila dikaitkan dengan pengelolaan pemadam kebakaran yang berswadaya murni tersebut yang menyangkut secara langsung dari kepentingan warga akan antusias. Sebab hal itu bisa saja karena pemikiran mereka, daripada rumah terbakar lebih baik menyumbang (unsur keterpaksaan) namun lama kelamaan partisipasi mereka derajat kesukarelaan menjadi lebih besar.

- Tahap Evaluasi : Peran serta masyarakat dalam tahap evaluasi operasional pengelolaan unit BPK yang mempunyai nilai efektivitas sedang sampai sangat efektif berjumlah 46 orang atau 92 %. Jadi dapat dikatakan peran serta masyarakat pada tahap ini, masyarakat mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Tahap evaluasi adalah menilai dan memonitor dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Upaya warga masyarakat agar dari yang problem ada berupa kekurangan, kebuntuan, cacat, penyimpangan, yang ada hubungan dengan partisipasi warga dalam pengelolaan unit BPK mandiri dapat dicarikan keluar. Evaluasi yang dilakukan warga masyarakat secara berkala bersama para pengurus RT/RW dan pengurus unit BPK dalam forum komunikasi lingkungan.

## 2. Tenaga Relawan/Sukarela :

- Tahap Komunikasi & Inovasi : Peran serta tenaga volunteer pada pengelolaan unit BPK yang ada di Kelurahan Melayu-Kecamatan Banjar Timur pada tahapan komunikasi & inovasi yang mempunyai nilai efektivitas sangat efektif sebanyak 22 orang atau 44 % dan nilai sangat efektif sebanyak 28 orang atau 56 %. Jadi dapat dikatakan peran serta masyarakat pada tahap ini mempunyai kewenangan didalam memutuskan kebijakan. Didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan unit BPK mandiri, sebenarnya tergantung

interaksi dan komunikasi yang terjadi didalam memonitor setiap adanya permintaan pemadaman kebakaran dari warga. Peran komunikasi dan inovasi dalam kegiatan sukarela ini, sebenarnya menghindari kebuntuan dan perselisihan diantara para tenaga kerja. Di samping itu untuk bertukar informasi untuk kemajuan masing-masing unit BPK mandiri.

- Tahap Penetapan Tujuan : Peran serta tenaga relawan dalam pengelolaan unit BPK didalam tahap menetapkan tujuan–tujuan didalam operasionalisasi BPK tersebut, dimana yang mempunyai nilai efektivitas sangat efektif sebanyak 21 orang atau 42 % dan yang mempunyai nilai efektif sebanyak 29 orang atau 58 %. Jadi dapat dikatakan peran serta masyarakat pada tahap ini mempunyai kewenangan didalam memutuskan kebijakan. Partisipasi para anggota pemadam kebakaran/tenaga kerja sukarela bersama-sama warga menentukan tujuan–tujuan yang dapat meningkatkan peran mereka baik didalam warga sendiri maupun pada waktu menjalankan tugas pemadaman kebakaran. Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi logis dari dibentuknya unit BPK swadaya, untuk menjalankan tugas dengan unsur kesukarelaan dan tanpa pamrih.
- Tahap Gaya Kerja para Relawan : Peran serta tenaga relawan dalam pengelolaan Unit BPK pada tahap ini adalah yang sangat efektif sebanyak 20 orang (40 %) dan efektif sebanyak 30 orang (60 %). Jadi dapat dikatakan peran serta masyarakat pada tahap ini mempunyai kewenangan didalam memutuskan kebijakan terhadap gaya kerja didalam menjalankan operasi Unit BPK. Gaya kerja para anggota pemadam kebakaran dapat dilihat derajat kesukarelaan didalam menjalankan tugas. Sebab gaya kerja disini menyangkut perilaku para anggota pemadam kebakaran sehari-hari. Sehingga

tindak tanduk dan perilaku sehari-hari anggota akan dimonitor oleh warga maupun sesama anggota pemadam. Mereka mempunyai takaran/ukuran untuk menilai perilaku gaya kerja tim, seperti dilarang mengkonsumsi narkoba, minuman keras, mencuri dan perbuatan asusila lainnya.

## BAB V

### P E N U T U P

#### 5.2 Kesimpulan

Dilihat penjelasan yang dilakukan pada bab – bab terdahulu terutama dalam penjelasan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan Unit Pemadam Kebakaran (BPK) yang dikelola oleh masyarakat disimpulkan sebagai berikut :

1. Unit BPK mandiri bentuk pelayanannya sebagai pelayanan setempat dan berbantuan pada unit BPK lain. Orientasi pelayanan adalah pelayanan “ *non profit oriented* ” (tidak berorientasi pada keuntungan) dan sifat pelayanannya bersifat sukarela baik secara organisasi maupun tenaga kerjanya. Sehingga peranan unit Pemadam Kebakaran (BPK) mandiri di kota Banjarmasin menjadi penting, karena sebagai suatu lembaga sosial yang beroperasi secara sukarela didalam menjalankan fungsinya. Unit BPK mandiri dalam menjalankan tugas sosialnya sesuai dengan prosedur tetap “*protap*” yang telah ditetapkan dan disepakati oleh lembaga-lembaga sosial dari unit pemadam kebakaran yang ada di kota Banjarmasin.
2. Kewenangan pemerintah kota Banjarmasin khususnya Seksi Linmas/Pemadam Kebakaran hanya sebatas kepada pembinaan organisasi (fungsi manajerial), apalagi dengan kebijakan pemda Kota Banjarmasin (sejak April tahun 2001) menyangkut armada pemadam kebakaran ( BPK Kota ) akan diserahkan aset Unit BPK Kota kepada unit-unit BPK swadaya untuk mengelola aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak pemerintah kota kepada satuan unit BPK yang mempunyai kemampuan finansial dan tenaga kerja untuk mengelola armada pemadam tersebut. Hal ini disebabkan dari aset-aset yang pernah dimiliki

pemerintah kota juga diserahkan kepada unit BPK yang mempunyai kemampuan finansial secara baik untuk mengoperasikannya, seperti Unit BPK Hippindo, Unit BPK Senandung, Unit BPK Nasa dan Unit BPK Arjuna. Karena dipandang unit-unit BPK mandiri telah cukup banyak jumlah di kota Banjarmasin yang dikelola secara swadaya, pihak pemda berusaha untuk melepas kewenangannya sebagai penyedia pelayanan umum (pelayanan pemadaman kebakaran).

3. Pada kawasan yang kepadatan penduduknya tinggi yakni Kelurahan Kelayan Luar 703 orang/ha, kejadian kebakaran selama 6 tahun terakhir sejak tahun 1995 baru tiga kali dengan jumlah kerugian yang relatif kecil. Hal ini dapat saja terjadi, karena tingkat kesadaran warga masyarakat kawasan tersebut cukup tinggi untuk menanggulangi kebakaran baik secara preventif maupun persuasif.
4. Sebaran Posko pemadam kebakaran yang ada di kota Banjarmasin tidak merata jumlahnya pada masing-masing kelurahan, ada kelurahan yang memiliki unit BPK cukup banyak dan ada yang tidak memiliki sama sekali. Kelurahan melayu yang berdekatan dengan kelurahan Kuripan, kelurahan Gedang dan kelurahan Seberang mesjid jarak antar posko pemadam kebakaran tidak mencapai 1000 meter. Bahkan pada kawasan penelitian Kelurahan Melayu jarak pos unit BPK tidak sampai 200 meter. Hal ini menunjukkan warga masyarakat dan anggota pemadam kebakaran mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi didalam pengelolaan unit BPK mandiri, sehingga jumlah unit BPK lebih banyak dari kelurahan lainnya.
5. Dengan kemampuan sendiri "*Self help*" warga masyarakat pemukiman untuk ikut berpartisipasi, mereka membeli sarana dan prasarana pemadam sederhana dan aksesoriesnya. Secara bertahap dengan partisipasi warga masyarakat untuk

meningkatkan dan mengembangkan unit BPK mandiri, terutama untuk lingkungan mereka sendiri.

6. Pada musim kemarau dan musim penghujan frekuensi kejadian kebakaran di kota Banjarmasin relatif hampir sama dari tahun 1995 s/d 2000 (tahun amatan dari penulis). Hal tersebut disebabkan oleh karena kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kebakaran yang menimpa kota Banjarmasin yaitu kondisi fisik kota dan kondisi sosial-ekonomi serta budaya masyarakat. Walaupun pada musim kemarau/kering dimungkinkan kebakaran yang terjadi akan lebih banyak, mengingat keterbatasan sumber air, suhu yang tinggi dan kelembaban udara menjadi lebih kecil.
7. Melihat morfologi kota Banjarmasin baik dari segi geogarfi, geologi, dan maupun hidrologi, menyebabkan struktur dan konstruksi bangunan yang ada lebih didominasi oleh bangunan semi permanen dan temporer yang terbuat dari bahan kayu. Konstruksi bangunan yang dibuat dari bahan kayu adalah dengan maksud agar beban bangunan lebih ringan, sehingga dapat ditahan oleh daya dukung tanah yang ada.

Dalam pembahasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan unit pemadam kebakaran (BPK) yang mandiri, diperlukan adanya peran serta masyarakat baik dari masyarakat pengguna (user) dan masyarakat yang bertindak sebagai tenaga sukarela/volunter didalam menjalankan roda berputarnya organisasi sosial tersebut. Didalam analisa mengenai keterlibatan masyarakat dalam ikut berperan serta dari tahap merencanakan, mewujudkan rencana serta evaluasi operasionalisasi dari masyarakat dan kegiatan para volunter dalam melaksanakan kegiatan mereka. Dari analisa tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

8. Keterlibatan masyarakat pada pengelolaan unit pemadam kebakaran dilihat dari masyarakat pengguna dalam tahap rencana, tahap implementasi dan tahap evaluasi pada daerah yang dijadikan sampel penelitian, menunjukkan tingkat sebagai mana yang ditunjukkan oleh Arstein mengenai tangga partisipasi masyarakat dalam pembangunan ( 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat ) :

- Tahap Rencana : Masyarakat mempunyai kewenangan didalam memutuskan kebijakan dan menentukan arahan didalam kelangsungan pengelolaan unit BPK mandiri, walau tanpa ikut campur tangan secara langsung pihak birokrasi.
- Tahap Implementasi : Pada tahapan ini masyarakat dapat menentukan target yang telah direncanakan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan mereka, pelibatan warga dalam berbagai kegiatan sebagai bukti warga masyarakat dapat menentukan kebijakannya sendiri. Pelibatan pada tahap ini dapat berupa sumbangan tenaga, material, finansial dan pengetahuan.
- Tahap Evaluasi : Dari rencana sampai implementasi masyarakat didalam tahap ini, mempunyai kewenangan untuk mengontrol apakah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam forum komunikasi lingkungan berjalan sesuai rencana semula, didalam tahapan ini masyarakat selalu dapat memberikan masukan dan kritik terhadap pengurus organisasi unit BPK maupun terhadap pengurus lingkungan didalam pengelolaan unit pemadam tersebut.

Hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian ini adalah “ Masyarakat mempunyai kekuatan kontrol didalam pengelolaan Unit Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) mandiri “ pada desain awal penelitian, mengenai efektivitas



peran serta masyarakat pengguna pada daerah yang dijadikan sampel didalam pengelolaan unit BPK mandiri, dapat dinyatakan :

Masyarakat mempunyai "*kekuatan kontrol*" ( *Degrees Of Citizen Power* ) didalam pengelolaan unit BPK mandiri dari tahap rencana sampai kepada tahap evaluasi pada daerah sampel ( Kelurahan Melayu – Kecamatan Banjar Timur ). Walaupun tetap saja ada faktor yang mempengaruhi peran serta, pada ketiga tahap tersebut faktor pendidikan dan pendapatan yang cukup dominan yang mempengaruhi keterlibatan dalam peran serta mereka pada pengelolaan unit BPK mandiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat didalam pengelolaan unit pemadam kebakaran dengan kemandiriannya diperkirakan dapat membiayai sarana dan prasarana lainnya dengan swadaya masyarakat. Lebih mendasar lagi adalah pada aspek yang diinginkan itu merupakan kebutuhan masyarakat setempat.

9. Pengelolaan tenaga sukrela dilihat dari beberapa tahap antara lain :

- Komunikasi & Inovasi : Dalam berinteraksi sebagai sesama anggota masyarakat dan anggota satuan unit pemadam kebakaran perlu adanya komunikasi diantara mereka, sehingga akan menimbulkan inovasi baru didalam mewujudkan dari komunikasi tersebut. Interaksi yang dilakukan menyebabkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dapat diakomodasi secara merata kepada anggota masyarakat dan para anggota relawan unit BPK. Didalam tahap ini, akan terlihat dari kegiatan yang dicanangkan sesuai dengan penentuan visi dan misi pembentukan unit BPK, sehingga keefektivan para anggota selain mengikuti kegiatan rutin, pertemuan-pertemuan internal anggota serta masyarakat. Dari hasil analisa yang dilakukan, peran serta para anggota pada tahap ini berkisar efektif sampai

sangat efektif. Jadi anggota relawan mempunyai kewenangan dalam lingkup berinteraksi dan berinovasi didalam memajukan organisasinya.

- Menetapkan Tujuan : Selain menetapkan tujuan bersama masyarakat lainnya, para anggota mempunyai kewenangan juga didalam menentukan tujuan-tujuan khusus yang ada didalam organisasinya. Walaupun resiko didalam menetapkan tujuan – tujuan tersebut kadang-kadang merugikan para anggota itu sendiri. Dalam menetapkan tujuan - tujuan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diketahui resikonya. Seperti tidak ada gaji, tunjangan, bahkan tidak ada asuransi yang dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Jadi kewenangan didalam menetapkan tujuan, para anggota satuan berhak untuk memutuskan kebijakan yang ada didalam mengelola unit BPK. Jadi efektivitas peran serta para relawan didalam tahap ini berkisar pada nilai efektif sampai sangat efektif.
- Gaya Kerja : Pada tahap ini, diupayakan para anggota mempunyai kewenangan untuk mengontrol, mengawasi, mengkritik dan menjatuhkan sanksi terhadap para anggota yang didalam melaksanakan melakukan pelanggaran terhadap tujuan – tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penetapan gaya kerja telah dimusyawahkan didalam forum komunikasi lingkungan dengan masyarakat disekitar lingkungan dan forum komunikasi antar anggota satuan. Di samping itu, gaya kerja yang diterapkan didalam lingkungan satuan pemadam kebakaran sangat bersahaja, seperti dilarang mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan kegiatan yang melanggar asusila lainnya.

Kewenangan masyarakat volunter ini, berkaitan erat dengan kepribadian masing – masing anggota. Sebab didalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat anggota harus siap secara fisik dan mental. Karena tanpa kesiapan fisik dan mental yang baik akan dapat membahayakan diri dan orang lainnya.

Disimpulkan Tingkat efektivitas peran serta anggota sukarela pada ketiga tahap tersebut tidak terlepas dari faktor pengaruh baik sosial-ekonomi, politik, budaya dan agama. Faktor- faktor tersebut tidak ada perbedaan secara signifikan didalam mempengaruhi para anggota pemadam kebakaran didalam ikut berperan serta pada ketiga tahap tersebut. Ini membuktikan tingkatan/derajat kesukarelaan betul – betul untuk membantu masyarakat, tanpa pamrih apapun. Dan lebih – lebih lagi organisasi /lembaga sosial ini dapat meningkatkan disiplin para tenaga kerja sukarela serta dapat menumbuhkan kebersamaan dan menghindarkan perdebatan yang membawa kepada konflik (SARA). Karena para anggota pemadam kebakaran terdiri dari suku, agama dan jenjang sosial yang berbeda-beda, mereka bersatu dalam visi dan misi dan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tertimpa musibah.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Terhadap Hasil Studi**

Rekomendasi terhadap hasil penelitian / studi dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### **1. Warga masyarakat dan Tenaga Sukarela/Organisasi unit BPK mandiri :**

- Pada kawasan pemukiman penduduk yang rawan kebakaran perlu membentuk unit BPK mandiri dengan melihat lokasi pemadam kebakaran. Penempatan lokasi unit BPK adalah untuk memperoleh efektivitas dan efesiensi dari

pelayanan pemadaman kebakaran dan menghindari adanya persaingan yang tidak sehat.

- Partisipasi warga masyarakat untuk memanfaatkan air pasang dengan membuat kolam-kolam penampung air yang berguna sebagai sumber air unit pemadam (BPK) bila terjadi kebakaran. Kolam air dimaksudkan dengan memanfaatkan kolong rumah panggung yang ada hampir di setiap rumah penduduk sebagai tempat air .
- Perlu adanya alternatif pengganti terhadap bahan-bahan bangunan yang mudah terbakar, terutama untuk fungsi bangunan pada bangunan semi permanen/non permanen yang mudah dijangkau api seperti dinding dapur dilapisi dengan bahan yang dapat meredam panas api (keramik, aluminium dan beton/pasangan batu bata ).
- Rencana pembuatan jalan masuk agar direncanakan dapat mengakses kendaraan pemadam kebakaran terutama kendaraan roda empat dengan tonase kecil atau peralatan portabel dengan baik dan mudah.
- Perlu adanya kerja sama antar unit-unit BPK yang ada untuk menghindari gesekan/persaingan yang tidak sehat serta memaksimalkan kerja tim terutama satuan BPK mandiri yang berdekatan dengan membentuk assosiasi perkelurahan atau perkecamatan dan kerja sama dengan pihak yang ada hubungannya dengan organisasi sosial lainnya baik ada didalam negeri maupun luar negeri.
- Organisasi sosial unit BPK mandiri yang ada perlu meningkatkan kerja sama dalam bidang pencegahan (preventif) kebakaran dengan cara penyuluhan secara rutin dan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pemanfaatan teknologi untuk pencegahan kebakaran dan penjarannya.

## **2. Kelembagaan :**

Lembaga administrasi (independen) yang menangani penanggulangan dan pencegahan kebakaran belum berfungsi dengan baik, sehingga informasi tentang akurasi mengenai kebakaran menjadi lemah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kewenangan secara politis maupun administrasi pada lembaga yang menangani kebakaran, terutama pada bangunan-bangunan yang berpotensi untuk menimbulkan bencana kebakaran/rawan kebakaran.

### **5.2.2 Rekomendasi Studi Lanjutan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dimungkinkan untuk melanjutkan studi/penelitian dan mengembangkan lagi untuk penelitian yang lebih komprehensif dan lebih baik akurasinya adalah :

1. Pada kawasan yang padat penduduknya dan padat bangunan, jumlah unit – unit pemadam kebakaran yang dikelola oleh masyarakat lebih sedikit dari daerah yang menjadi sampel penelitian. Hal ini dapat dijadikan lanjutan dari penelitian ini, seberapa jauh peran serta masyarakat terhadap pada kawasan yang rawan kebakaran dengan jumlah unit BPK mandiri lebih kecil.
2. Penelitian tentang kejadian kebakaran yang terjadi di Indonesi, khususnya kota Banjarmasin hampir tidak ada. Kalaupun ada, hanya sekedar melakukan identifikasi kebakaran saja. Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji terutama orang yang bergerak pada bidang perencanaan kota, sosiologi kota dan hukum perumahan diperkotaan. Adapun kajian yang dapat dijadikan objek penelitian adalah sebagai berikut :
  - Studi mengenai prasarana dan sarana pemadam kebakaran suatu kota

- Studi kelembagaan/institusi yang menangani penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran yang dapat dijadikan model pengelolaan sarana umum secara swdaya murni.
  - Studi tentang aspek pembiayaan yang dapat dihemat oleh pemerintah kota/kabupaten akibat adanya unit BPK yang dikelola masyarakat.
3. Sedikitnya masukan jenis variabel yang digunakan pada studi, memungkinkan untuk menambah beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat seperti variabel kondisi lingkungan (kumuh), jenis bangunan, kondisi mental /perilaku masyarakat dan lain-lainnya.
4. Mungkin adanya kelemahan didalam penelitian ini yang dapat diperkirakan mempengaruhi hasil analisa yang berupa :
- Variabel yang digunakan kurang relevan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan unit BPK mandiri.
  - Jumlah sampel dimungkinkan terjadi bias, sehingga jumlah yang diambil tidak mencukupi untuk kasus- kasus yang diambil baik untuk user ataupun para volunter.
  - Wilayah sampel yang digunakan kurang mencerminkan secara keseluruhan sampel yang diambil untuk dijadikan anggota sampel.
  - Hasil analisa juga dapat saja kurang maksimal didalam memberikan interpretasi terhadap angka hasil out-put analisa akibat dari penggolongan maupun pembulatan angka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Buku

- Amitai Etzioni dalam Edward E. Lawler III, et. Al. 1980. *Organizational Assesment: Prespectives on the Measurement of Organizational Behavior and the Quality of Worklife*, New York.
- Argyris dalam Edward E. Lawler III, et. Al. 1980. *Organizational Assesment: Prespectives on the Measurement of Organizational Behavior and the Quality of Worklife*, New York.
- Adam.I Indrawijaya.R, 2000, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Arstein, Sherry R. 1995. *A Ladder of Citizen Participation* dalam Jay M. Stein (ed), *Classic Reading in Urban Planning: An Introduction*. McGraw-Hill, Inc, New York.
- A.Steneir, George, M Minner,Jhon, 1997, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*,edisi dua, Erlangga, Jakarta.
- Bambang, P, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Alumni, Bandung.
- Baross, Zsu Zsa. 1993. *Prospek Perubahan bagi Golongan Miskin Kota* dalam Parsudi Suparlan (ed.) *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, Eko. 1991. *Kota itu Milik Siapa Sebenarnya* dalam Eko Budihardjo (ed.) *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Budijardjo, Eko,1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung.
- Conyers, Diana, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sostologi Kota dan Ekologi Sosial*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Daldjoeni, N. 1997. *Geografi Baru : Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Drucker, Peter, F. 1978. *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*, Jakarta, Gramedia.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1990. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*, Jakarta, Erlangga.
- Godschalk dalam Fageance, 1997. *Citizen Participation in the Planning*, Oxford England, Pergamon Press.

- Ickis, John C., 1981. *Structural Responses to New Rural Development Strategy* dalam David C. Korten dan Felipe B. Alfonso, *Bureaucracy and the poor: Closing the Gap*, Singapore : Mc GrawHill International Book Company.
- J. Salusu, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Gramedia, Jakarta
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, CV. Mandar Jaya.
- Litwin, Howard, 1986. *Correlates of Community Collaboration. In Yair Levi and Howard Litwin (Eds) Community and Cooperative in Participatory Development*, England: Gower Publishing Company.
- Manullang, 1981, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nurmandi, Achmad, 1999. *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Lingkaran Bangsa.
- Pabundu, Tika, 1997. *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmana, Nana, Steinberg, Florian dan Robert van der Hoff, 1993. *Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta, LP3ES.
- Rubin, Allen and Earl Babbie, 1989. *Research Methods for Social Work*, Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Santoso, Singgih, 2000. *SPSS: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta, Gramedia.
- Singarimbun, Masri dan Effendi; Sofian, 1995. *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Slamet, 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Soedarno, P, et al. 1992. *Ilmu Sosial Dasar: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sabari, Hadi, 2000, *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sutrisno, Lukman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- West, Michael, 1998, *Effective Team Work: Kerja sama Kelompok yang Efektif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yudohusodo, Siswono, 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

#### Kelompok Artikel

- Oetomo, Andi, 1994. *Mencari Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Kota di Indonesia*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No. 14.



Kelompok Terbitan Terbatas

Hadi, Sudharto P., 1999. *Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Info BPK, *Majalah Khusus Pemadam Kebakaran*, edisi No.2 Tahun I Tanggal 27 Oktober 2000, Banjarmasin.

Kelompok Makalah

Parwoto, 1997, *Pengembangan Partisipatif*, Lokakarya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Permukiman, Jakarta.

Kelompok Buku Data/Laporan

PDAM Banjarmasin, 1999, *Master Plan, Final Report Kalimantan Major Cities Water Supply Studies*, Dirjend Cipta Karya, DEP.PU. Jakarta.

Alie Syahbana, Joesron, 1980, *Konsep Dasar Pelayanan Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Jakarta*, Dep.TPKD-ITB, Bandung.

Kumar, Krisna, 1998, *Studi Penentuan Lokasi Pos Pemadam Kebakaran Di Kotamadya*. Jakarta Pusat, FT.PWK – UNDIP, Semarang.

Kelompok Peraturan dan Perundang-undangan

Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota, Direktorat TK&TD-DEP.PU, Jakarta. 1987

Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Di Bidang Perumahan dan Permukiman, 1995, Jambatan, Jakarta.